

**PDAS-D**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**PRJORJITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



[bpkd.luwukab.go.id](http://bpkd.luwukab.go.id)



[bpkd.luwukab@gmail.com](mailto:bpkd.luwukab@gmail.com)



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR : 180/186/IX/HUK/2022**

**NOMOR : 32/DPRD/IX/2022**

**TANGGAL: 5 September 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAPON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M. Pd  
Jabatan : Bupati Luwu  
Alamat Kantor : Jl. Andi Djemma no. 1 (Kompleks Perkantoran  
Pemkab Luwu) Belopa

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu

2. a. Nama : Rusli Sunali, S.Pd  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu  
Alamat Kantor : Jl. Andi Djemma II (Kompleks Perkantoran  
Pemkab Luwu) Belopa

b. Nama : Mappatunru  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu  
Alamat Kantor : Jl. Andi Djemma II (Kompleks Perkantoran  
Pemkab Luwu) Belopa

c. Nama : Zulkifli, ST, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu  
Alamat Kantor : Jl. Andi Djemma II (Kompleks Perkantoran  
Pemkab Luwu) Belopa

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan, pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Program/Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja serta rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

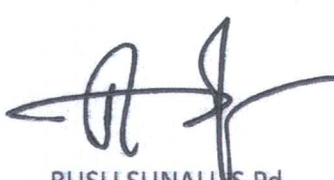
Belopa, 5 September 2022

BUPATI LUWU  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



  
Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M. Pd

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LUWU  
Selaku,

  
RUSLI SUNALI, S.Pd

KETUA

  
MAPPATUNRU  
WAKIL KETUA

  
ZULKFLI, ST, M.Si  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	.....	1
<b>BAB II.</b>	<b>RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	.....	8
<b>BAB III.</b>	<b>PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH</b>	.....	12
<b>BAB IV.</b>	<b>PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b>	.....	368
	1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	.....	370
	2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Bantuan Tidak Terduga	.....	563
<b>BAB V.</b>	<b>RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	.....	567
<b>BAB VI.</b>	<b>PENUTUP</b>	.....	569
<b>LAMPIRAN</b>			

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahn (PPAS-P)**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 26 dan pasal 89 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya dalam menjalankan hal tersebut Kepala Daerah terlebih dahulu melakukan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang selanjutnya dokumen KUA dan rancangan PPAS disampaikan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam masa satu tahun anggaran dan sesuai penegasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara memuat skala prioritas daerah yang hendak dicapai dalam sisa waktu pelaksanaan APBD, dimana didalamnya memuat prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan Prioritas dan Program Nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat. Selain sinkronisasi Nasional, PPAS-P ini juga mengacu pada prioritas dan program Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya tetap mengacu terhadap kekhususan, karakteristik, dan dinamika wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu.

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dilakukan dengan terlebih dahulu menampung Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, kemudian memperhatikan capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, selanjutnya merumuskan capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. Adapun yang dimaksud dengan ketidaksesuaian asumsi KUA yakni pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sesuai penjelasan sebelumnya tentang mekanisme dan dasar penyusunan maka pemerintah Kabupaten Luwu dalam menyusun Prioritas Platfon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022, disusun berdasarkan penjabaran Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 serta berpedoman pada dua Peraturan yakni Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. disamping itu dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022, ditegaskan bahwa program dan kegiatan tetap memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 menjadi dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun RKAP-SKPD serta menjadi patokan batas maksimal anggaran yang dapat diuraikan dalam program dan kegiatan. Disamping itu Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Luwu adalah juga merupakan dokumen Nota Kesepakatan antara Eksekutif

dengan Legislatif yang menggambarkan perencanaan operasional yang substansinya menjabarkan target kinerja dan kegiatan menurut kewenangan dan prioritas yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

### **1.2. Tujuan dan Dasar Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)**

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2022 adalah untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan serta menjadi batasan plafon sementara masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 yang untuk selanjutnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024.
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
31. Peraturan Bupati Luwu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu
32. Peraturan Bupati Luwu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu.
33. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Peberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Luwu;
34. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
35. Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
- BAB III Prioritas Perubahan Belanja Daerah
- BAB IV Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
- BAB V Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
- BAB VI Penutup

**BAB II**  
**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN**  
**PEMBIAYAAN**

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer Pusat terdiri atas a) Dana Perimbangan, b) Dana Insentif Daerah, c) Dana Otonomi Khusus, d) Dana Keistimewaan, dan e) Dana Desa, Sementara untuk Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Daerah lainnya terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Luwu pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 secara umum direncanakan sebesar Rp.1.550.382.055.113,- mengalami peningkatan 12,07% atau sebesar Rp.166.969.487.637,- dibandingkan rencana pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD pokok tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.383.412.567.476,-. Peningkatan penerimaan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah antar daerah yang diperkirakan meningkat sebesar Rp. 26.632.352.689,- dan begitupun juga dari pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan Rp. 66.181.000.000,-.

### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu tahun 2022 pada APBD perubahan ditargetkan sebesar Rp. 145.942.356.330,- mengalami peningkatan 20,75% atau sebesar Rp. 25.082.740.451,- dibandingkan rencana pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD pokok tahun anggaran 2022. Meningkatnya target PAD tersebut dikarenakan adanya optimisme Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencapaian target PAD disisa tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan realisasi yang telah dicapai. Adapun peningkatan tersebut terletak pada beberapa sektor PAD seperti Pajak Daerah meningkat 10,15%, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat 15,31%, dan Lain-lain PAD yang Sah Meningkatkan 28,62%.

### **2.1.2. Pendapatan Transfer**

Pemerintah daerah menargetkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer pada APBD perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.270.732.458.647,- mengalami peningkatan sebesar Rp.27.679.507.050,- atau sekitar 2,23% dibanding APBD pokok tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan transfer terletak pada pendapatan transfer pemerintah pusat dimana pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.186.529.554.361,- meningkat 0.09% atau sebesar Rp. 1.047.154.361,- dibandingkan pada penetapan APBD pokok tahun anggaran 2022. Selain itu untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah turut mengalami peningkatan sebesar Rp. 26.632.352.689,- atau sekitar 46,26% .

### **2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Perubahan tahun 2022 di targetkan mencapai Rp. 72.681.000.000,- mengalami peningkatan sekitar Rp.66.181.000.000,-dibandingkan pada penetapan APBD Pokok. Meningkatnya pendapatan tersebut disebabkan target pendapatan hibah dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan.

## **2.2. Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang akan dibayarkan Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali oleh pemerintah daerah baik ditahun berkenaan maupun ditahun-tahun berikutnya. Pembiayaan pada hakikatnya dilaksanakan dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus berlebih pada anggaran tahun berjalan. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan penerimaan pembiayaan pada APBD perubahan tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 61.026.240.136,- cenderung meningkat sebesar Rp. 48.026.240.136,- dibandingkan pada penetapan pada APBD Pokok.

Sebagai gambaran umum rencana pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>120.859.615.879</b>	<b>145.942.356.330</b>	<b>25.082.740.451</b>
4.1.01	Pajak Daerah	29.835.746.986	32.862.701.284	3.026.954.298
4.1.02	Retribusi Daerah	11.540.000.000	11.540.000.000	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000	5.996.278.246	796.278.246
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.283.868.893	95.543.376.800	21.259.507.907
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.243.052.951.597</b>	<b>1.270.732.458.647</b>	<b>27.679.507.050</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.185.482.400.000	1.186.529.554.361	1.047.154.361
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.570.551.597	84.202.904.286	26.632.352.689
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>72.681.000.000</b>	<b>66.181.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.500.000.000	72.681.000.000	66.181.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.370.412.567.476</b>	<b>1.489.355.814.977</b>	<b>118.943.247.501</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>61.026.240.136</b>	<b>48.026.240.136</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>61.026.240.136</b>	<b>48.026.240.136</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>61.026.240.136</b>	<b>48.026.240.136</b>

### **BAB III**

#### **PRIORITAS PERUBAHAN BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal dan pendanaan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta pendanaan untuk urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah. Adapun klasifikasi belanja terdiri atas a) Belanja Operasi, b) Belanja modal, c) Belanja tidak terduga, dan d) belanja transfer.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Luwu pada Prioritas Platfon Anggaran Sementara perubahan Tahun Anggaran 2022 yang memuat program dan kegiatan telah disesuaikan dengan urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional, yang semata-mata Untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada APBD Perubahan tahun 2022 difokuskan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran prioritas pembangunan nasional, target dan sasaran prioritas pembangunan pemerintah provinsi, serta target dan sasaran prioritas pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, maka dari hal tersebut mendasari ditetapkannya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2022. Adapun sinkronisasi pembangunan nasional dengan pemerintah daerah yang dimaksud adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar; (6)



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. Sementara untuk prioritas pembangunan provinsi yakni (1) pemantapan reformasi birokrasi; (2) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan; (3) percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial; (4) percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya; dan (5) pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara berturut-turut pada tabel 3.1,3.2,3.3, dan 3.4

**Tabel 3.1**

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase penyandang disabilitas telarlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan		
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
			Angka Ketersediaan Energi		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				DINAS PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				DINAS PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi		
				DINAS PERIKANAN	
			Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
				DINAS PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			peningkatan produksi komoditi hortikultuira		
				DINAS PERTANIAN	
			Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Luas cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yang disediakan		
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Penyerapan APBD		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Jumlah Rekomendasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN BAJO BARAT	
			cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN PONRANG	
			cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN PONRANG	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				KECAMATAN SULI	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN SULI BARAT	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				KECAMATAN SULI BARAT	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi yang telah dilakukan Pemberdayaan dan Perlindungan		
				DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PERTANIAN	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
				DINAS PERTANIAN	
			Persentase peningkatan produksi bibit ternak		
				DINAS PERTANIAN	
			Persentase peningkatan produksi peternakan		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANIAN	
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		
				DINAS PERTANIAN	
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		
				DINAS PERTANIAN	
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Peningkatan Populasi Ternak		
				DINAS PERTANIAN	
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		
				DINAS PERTANIAN	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Jumlah Rekomendasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE		
				KECAMATAN BELOPA UTARA		
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				



### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN	
				DINAS KESEHATAN	
			Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan		
				DINAS KESEHATAN	
			Capaian SPM dan Kinerja		
				DINAS KESEHATAN	
			indek kepuasan masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan		
				DINAS KESEHATAN	
			Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	
			Rasio Pembiayaan Operasional rumah sakit (Cast Recovery Ratio/CRR)		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak		
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Cakupan pemberdayaan lembaga desa dan lembaga adat desa		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Cakupan penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentase Penggunaan MKJP		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah cabang olahraga yang di gemari masyarakat Kab Luwu		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah			
				DINAS PERIKANAN		
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERTANIAN		
				SEKRETARIAT DPRD		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				SEKRETARIAT DPRD		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			persentase kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai Formasi		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BAJO	
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				KECAMATAN BAJO	
			Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		
				KECAMATAN BAJO BARAT	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	
			Persentase penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah secara tepat waktu		
				KECAMATAN BELOPA	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	
			Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	
			---		
				KECAMATAN KAMANRE	
			cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah Daerah		
				KECAMATAN LAROMPONG	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN LATIMOJONG	
				KECAMATAN PONRANG	
			Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN SULI	
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai ketentuan		
				KECAMATAN SULI	

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN SULI	
			Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu		
				KECAMATAN SULI	
			Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah		
				KECAMATAN SULI	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN SULI BARAT	
				KECAMATAN WALENRANG	
				KECAMATAN WALENRANG TIMUR	
				KECAMATAN BUA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan		
				KECAMATAN LATIMOJONG	
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik di kecamatan		
				KECAMATAN SULI	
			Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan		
				KECAMATAN WALENRANG TIMUR	



## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		
				KECAMATAN BUA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN BAJO	
				KECAMATAN WALENRANG	
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	
				KECAMATAN BUA	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		
				KECAMATAN BAJO	
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	
				KECAMATAN LAROMPONG	
				KECAMATAN SULI BARAT	
				KECAMATAN WALENRANG	
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	
				KECAMATAN BUA	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	
				KECAMATAN WALENRANG	
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Prosentase tingkat pengembangan Kebudayaan di daerah		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
			Persentase kesenian tradisional yang telah dikembangkan			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
			Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
			Prosentase cagar budaya yang telah dilestarikan dan dikelola			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
				KECAMATAN SULI BARAT		
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan			
				DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			0 Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan			

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio kepatuhan IMB kabupaten		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kabupaten yang tertata		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Jumlah arus penumpang angkutan umum		

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase layanan angkutan darat		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	
				KECAMATAN SULI BARAT	
				KECAMATAN WALENRANG	
				KECAMATAN WALENRANG TIMUR	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN BAJO	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	
<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>				

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase irigasi dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			sentase Irigasi dal Kondisi Baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketaatan terhadap RTRW		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				DINAS KETAHANAN PANGAN	
				DINAS PERTANAHAN	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		
				DINAS PERTANAHAN	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Rasio Penduduk ber KTP		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Rasio pasangan berakte nikah		

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
			Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu		



### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	
			Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Di Tetapkan		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				INSPEKTORAT DAERAH	
				KECAMATAN BAJO BARAT	
				KECAMATAN BELOPA UTARA	
				KECAMATAN BUPON	
				KECAMATAN LATIMOJONG	

## Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN WALENRANG BARAT	
				KECAMATAN BUA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Cakupan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		
				KECAMATAN WALENRANG BARAT	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	
				KECAMATAN BUPON	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan		
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				KECAMATAN WALENRANG BARAT	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Tabel 3.2**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>61</b>	<b>1. PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI</b>					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	288.347.065.121	284.152.588.607
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	33.016.200	19.671.199
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS KESEHATAN	1.299.673.332	1.299.673.332
			Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi perangkat daeah yang disusun			
				DINAS KESEHATAN	89.830.085	117.948.885
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.037.981.000	3.286.752.547
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.049.203.290	4.294.116.938
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.743.627.278	3.669.088.796
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.228.993.733	2.351.351.486
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000
			Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki Satlinmas			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	615.347.000	584.747.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Ketersediaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			
				DINAS SOSIAL	3.051.971.231	2.813.503.956
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS SOSIAL	93.047.040	96.686.685
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			
				DINAS SOSIAL	9.060.080	16.686.480

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				DINAS SOSIAL	462.110.730	617.804.792
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Persentase Ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			
				DINAS SOSIAL	114.060.100	147.060.100
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
			Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani			
				DINAS SOSIAL	10.596.300	0
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
			Persentase penyandang disabilitas telarlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			
				DINAS SOSIAL	83.464.000	93.660.830
			Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya korban HIV/AIDS dan Napza			
				DINAS SOSIAL	10.546.550	9.296.550
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
			Persentase penyandang PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			
				DINAS SOSIAL	536.973.340	532.289.590

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
			Cakupan penyelenggaraan pelayanan korban bencana alam dan sosial			
				DINAS SOSIAL	46.336.750	43.422.700
			Pcrsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
				DINAS SOSIAL	170.596.210	215.194.160
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap daerah bencana daerah kabupaten			
				DINAS SOSIAL	46.336.750	43.422.700
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
			Cakupan penyelenggaraan pengelolaan TMP Nasional Kabupaten			
				DINAS SOSIAL	18.848.245	24.348.680
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5.176.862.383	5.317.319.524
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	633.914.950	658.979.950
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Pemberdayaan Gender			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	118.002.880	117.966.680
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
			Rasio KDRT			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38.932.650	38.932.650
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
			Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	81.062.020	74.762.020
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
			Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41.742.200	50.908.200
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
			Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51.881.000	51.881.000



### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
			Cakupan penyelenggaraan perlindungan khusus anak			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29.851.900	26.951.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS KETAHANAN PANGAN	3.194.385.834	3.313.465.256
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Skor Penanganan Rawan Pangan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN	33.600.400	33.593.160
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji			
				DINAS KETAHANAN PANGAN	18.024.870	13.324.870
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERTANAHAN	2.067.178.410	2.218.279.608
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi			
				DINAS PERTANAHAN	37.590.800	78.439.100
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
			Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap di distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee			
				DINAS PERTANAHAN	16.122.300	46.119.150
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
			Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
				DINAS PERTANAHAN	210.175.200	558.969.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	551.364.025	603.334.790
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.761.484.545	3.795.647.472
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Rasio Penduduk ber KTP			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	758.380.900	845.402.248
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio pasangan berakte nikah			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	132.604.500	167.012.250
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	62.419.500	127.155.750
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
			Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.303.900	7.303.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	237.574.260	309.695.900
			Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	253.891.200	253.891.200
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	55.679.331	151.280.074
			Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.184.348.078	3.115.912.030

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.169.600	25.409.600
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
			jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.040.890	15.040.890
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Persentasi Peningkatan status desa mandiri			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.146.105.764	4.043.703.414
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
			Cakupan pemberdayaan lembaga desa dan lembaga adat desa			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	929.048.800	1.279.046.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	162.297.825	159.558.350
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.247.830.186	2.072.677.995
			Cakupan penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	244.770.000	219.770.000
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERHUBUNGAN	4.020.460.681	4.149.259.712
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Jumlah arus penumpang angkutan umum			
				DINAS PERHUBUNGAN	1.995.033.432	1.842.971.319
			Persentase layanan angkutan darat			
				DINAS PERHUBUNGAN	1.532.542.000	1.855.068.750
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
			Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola			
				DINAS PERHUBUNGAN	48.740.000	53.999.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.224.622.106	3.212.372.734
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.472.170.880	1.662.114.320

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
			Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	554.528.180	546.350.820
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.386.464.760	3.123.106.485
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.365.047.633	3.615.134.060
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
			Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	37.299.450	67.264.050
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
			Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)			
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	44.690.250	74.723.250
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.834.673.288	3.534.496.022

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
			Persentase Koleksi Nasional dan naskah kuno yang dilestarikan			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.442.500	7.442.500
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.131.675	45.005.675
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah			
				DINAS PERIKANAN	70.076.196	75.782.600
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERIKANAN	778.408.444	1.017.502.277
			cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PARIWISATA	24.061.200	22.335.100
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
				DINAS PARIWISATA	3.411.496.289	3.139.634.400
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERTANIAN	30.000.000	47.556.000

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			
				DINAS PERTANIAN	293.756.600	322.894.500
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah			
				DINAS PERTANIAN	99.360.286	99.360.286
			Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PERTANIAN	3.807.900	7.367.900
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				DINAS PERTANIAN	15.466.275.786	14.784.851.737
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Peningkatan Populasi Ternak			
				DINAS PERTANIAN	23.396.470	28.396.470
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
				DINAS PERTANIAN	23.396.470	28.396.470
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			---			
				DINAS PERDAGANGAN	4.750.125.571	4.609.386.708
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				



### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
			---				
				DINAS PERDAGANGAN	2.468.248.120	2.973.146.341	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			---				
				DINAS PERDAGANGAN	100.623.820	127.234.615	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			---				
				DINAS PERDAGANGAN	19.658.000	18.872.000	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			---				
				DINAS PERDAGANGAN	39.505.090	39.505.090	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah				
				SEKRETARIAT DAERAH	23.499.278.275	26.893.791.177	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Cakupan Pelaksanaan Bina Mental Spritual dan Evaluasi Kesejahteraan Rakyat				
				SEKRETARIAT DAERAH	3.191.496.750	3.751.935.500	

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Kerjasama Daerah yang difasilitasi			
				SEKRETARIAT DAERAH	64.743.880	458.252.180
			Nilai LPPD			
				SEKRETARIAT DAERAH	432.870.000	432.870.000
			Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama			
				SEKRETARIAT DAERAH	721.462.270	868.776.320
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan			
				SEKRETARIAT DAERAH	435.517.260	576.097.833
			Persentase kebijakan pemanfaatan Sumber daya Alam yang telah dilaksanakan secara maksimal			
				SEKRETARIAT DAERAH	47.786.850	47.786.850
			Persentase ketersediaan sistem SPSE beroperasi			
				SEKRETARIAT DAERAH	379.237.730	379.204.570
			Persentase Penyelesaian tender paket pekerjaan tepat waktu			
				SEKRETARIAT DAERAH	155.018.500	155.018.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				SEKRETARIAT DPRD	21.837.877.919	21.626.534.245
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				SEKRETARIAT DPRD	10.629.887.500	10.629.887.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	5.186.942.065	5.364.944.869
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	576.518.300	750.992.780
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	182.818.250	186.766.250
			Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	348.146.470	369.647.470
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.828.129.142	8.279.615.433
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.381.790.556	10.285.080.488
			Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu			
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	33.804.000	33.679.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Persentase Penyerapan APBD			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	248.318.257.069	249.870.525.488
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	607.930.550	907.370.100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
			persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap target yang ditetapkan			
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	131.878.520	131.878.020
			Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan			
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.604.589.039	3.816.101.529
			Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Di Tetapkan			
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.316.201.079	3.522.839.449

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.429.996.271	19.155.696.563
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.058.466.200	583.168.100
			persentase kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	483.353.560	438.473.400
			persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai Formasi			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.058.466.200	583.168.100
			Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.835.196.110	1.546.553.350
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	895.478.000	1.016.790.100
			persentase PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	895.478.000	1.016.790.100
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Jumlah Rekomendasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	727.861.490	719.764.390
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				INSPEKTORAT DAERAH	1.280.168.328	1.509.747.227
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Persentase tindak lanjut temuan BPK			
				INSPEKTORAT DAERAH	2.354.245.550	3.073.803.400
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi			
				INSPEKTORAT DAERAH	628.152.140	506.605.140
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN BAJO	187.207.600	207.200.193
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				KECAMATAN BAJO	12.600.000	12.600.000
			Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN BAJO BARAT	52.800.000	50.400.000
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN BAJO BARAT	1.076.470.491	983.496.129
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	1.945.356.232	1.902.099.307
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	84.944.620	84.944.620
			Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	1.208.119.381	1.183.596.335
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN BELOPA	3.560.099.815	3.195.688.714
			Persentase penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah secara tepat waktu			
				KECAMATAN BELOPA	6.195.000	6.234.000
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN BELOPA UTARA	2.092.000	2.092.000
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	2.548.267.490	2.183.965.598
				Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	56.871.566	62.919.566
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN BUPON	279.973.939	279.369.938
				Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan		
				KECAMATAN BUPON	6.140.400	6.140.400
				---		
				KECAMATAN KAMANRE	1.520.950.111	1.639.596.127
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN LAMASI	2.102.590.728	2.043.558.202
				---		
				KECAMATAN LAMASI TIMUR	1.164.120.235	1.041.846.859
				Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN LAROMPONG	143.719.200	130.119.200



### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN LAROMPONG	1.934.146.074	1.891.885.858
			cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah Daerah			
				KECAMATAN LAROMPONG	10.038.150	10.038.150
			---			
				KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	1.891.215.683	1.578.332.384
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN LATIMOJONG	340.372.586	349.772.586
				KECAMATAN PONRANG	197.566.996	222.064.996
				KECAMATAN SULI BARAT	1.408.796.830	1.427.075.312
				KECAMATAN WALENRANG	2.737.152.870	2.870.999.369
				KECAMATAN WALENRANG BARAT	186.980.000	434.639.771
				KECAMATAN WALENRANG TIMUR	1.631.627.390	1.697.685.306
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.222.059.829	2.203.740.958
			---			
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	124.107.985	141.446.905
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN BUA	3.561.609.559	3.668.075.285
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			
				KECAMATAN BAJO	10.152.100	10.152.100
				KECAMATAN BAJO BARAT	5.000.000	22.840.000
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	18.752.100	18.752.100
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	6.000.000	6.000.000
			Cakupan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			
				KECAMATAN BELOPA UTARA	4.152.100	4.152.100
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan			
				KECAMATAN BUPON	6.117.000	6.117.000
				KECAMATAN LATIMOJONG	22.952.100	13.352.100
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			
				KECAMATAN PONRANG	2.000.000	2.000.000
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN SULI BARAT	6.000.000	6.000.000
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			
				KECAMATAN WALENRANG BARAT	4.000.000	4.000.000
			Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan			
				KECAMATAN WALENRANG TIMUR	4.800.000	4.800.000
			---			
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.400.000	8.000.000
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			
				KECAMATAN BUA	4.000.000	4.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
				KECAMATAN BAJO	419.463.690	419.463.690
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	8.590.000	8.590.000
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	8.760.000	8.760.000
			---			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN BELOPA	1.419.791.741	1.434.552.341
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	458.799.988	458.799.900
				---		
				KECAMATAN BELOPA UTARA	434.199.993	434.199.993
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN BUPON	492.200.000	492.800.000
				---		
				KECAMATAN KAMANRE	440.188.586	430.896.586
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN LAMASI	505.000.000	505.000.000
				---		
				KECAMATAN LAROMPONG	474.800.000	474.800.000
				KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	415.947.143	415.947.143
				cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam ragka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN PONRANG	450.999.472	450.999.472
				cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN PONRANG	510.100.000	510.100.000
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
				KECAMATAN SULI BARAT	369.600.000	377.800.000
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	4.400.000	8.625.000
			---			
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	383.813.376	605.813.263
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
				KECAMATAN BUA	421.810.134	421.810.134
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
				KECAMATAN BUPON	1.550.000	1.550.000
				KECAMATAN LAMASI	10.800.000	7.200.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	2.750.000	2.750.000
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	600.000	600.000

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan			
				KECAMATAN LAMASI	6.600.000	15.000.000
			---			
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	4.500.000	6.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	675.000	675.000
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	3.600.000	3.600.000
				KECAMATAN BUPON	2.400.000	2.400.000
				KECAMATAN WALENRANG	9.520.000	9.520.000
				KECAMATAN WALENRANG BARAT	3.360.000	11.360.000
				KECAMATAN WALENRANG TIMUR	6.400.000	9.600.000
				KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.120.000	6.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.791.965.660	2.903.131.045

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
			Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.199.962.727	1.199.962.727
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.474.700	17.474.700
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
			Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.437.500	76.437.500
			Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.437.500	76.437.500
<b>62</b>	<b>2. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN</b>					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase irigasi dalam kondisi baik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.349.979.607	2.826.337.560
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.651.100.000	6.696.100.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.647.115.052	5.563.120.140
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Rasio kepatuhan IMB kabupaten			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.381.645.625	11.977.546.844
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.000.000	826.750.817
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	108.937.010.831	196.933.303.264
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
			Persentase rumah layak huni			



### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	53.000.000	4.450.903.086
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kabupaten yang tertata			
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.150.701.000	4.185.701.000
			Persentase rumah layak huni			
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	50.000.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
			Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata			
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	545.000.000	917.500.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.503.366.497	13.685.447.496
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.300.000	8.900.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Jumlah arus penumpang angkutan umum			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PERHUBUNGAN	100.985.000	159.483.650
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan Secara Terpadu			
				DINAS PARIWISATA	308.520.907	308.520.907
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
			Luas cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yang disediakan			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	35.364.800	33.872.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			---			
				KECAMATAN LAMASI TIMUR	7.496.800	7.496.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	2.400.000	2.400.000
			---			
				KECAMATAN PONRANG SELATAN	149.690.048	149.690.048
<b>63</b>	<b>3. PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL</b>					
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.000.000	100.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	34.434.100	37.545.100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	442.157.653	357.411.057
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	6.576.500	6.576.500
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	40.673.490	40.673.490
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	339.298.525	372.238.950

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	930.000	930.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
			Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	60.928.300	60.928.100
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	56.317.000	51.306.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Lama Proses Perizinan penanaman modal			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	91.205.300	91.205.300
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	379.150.000	379.150.000

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			
				DINAS PERIKANAN	3.194.960.000	3.459.460.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			
				DINAS PERIKANAN	3.550.600	0
			Total Produksi Perikanan Budidaya			
				DINAS PERIKANAN	3.335.892.000	3.613.342.000
			---			
				DINAS PERIKANAN	65.000.000	65.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan Secara Terpadu			
				DINAS PARIWISATA	299.999.107	399.999.107
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten			
				DINAS PARIWISATA	158.000.000	307.999.999
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
				DINAS PERTANIAN	50.000.000	50.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian			
				DINAS PERTANIAN	156.200.000	156.200.000
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian			
				DINAS PERTANIAN	156.200.000	156.200.000
			Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan			
				DINAS PERTANIAN	156.200.000	156.200.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			---			
				KECAMATAN LAMASI TIMUR	4.800.000	4.800.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.246.250	24.246.250
<b>64</b>	<b>4. PERCEPATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER DAN BERBUDAYA</b>					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN	548.292.869	548.292.869
				Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan		
				DINAS KESEHATAN	1.530.045.907	1.799.626.265
				Capaian SPM dan Kinerja		
				DINAS KESEHATAN	1.157.667.394	1.219.647.330
				indek kepuasan masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	805.000.000	772.474.100
				Indeks Kepuasan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	2.211.902.985	2.560.552.501
				Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan		
				DINAS KESEHATAN	65.073.166.579	116.308.675.987
				Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	149.999.981	149.999.981
				Rasio Pembiayaan Operasional rumah sakit (Cast Recovery Ratio/CRR)		
				DINAS KESEHATAN	50.125.134.440	100.104.725.874
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
				Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN	397.630.700	324.274.800
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	86.669.794	83.692.864
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.017.750.000	1.017.750.000
			Presentase Penggunaan MKJP			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.174.519.384	4.176.526.709
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
			Presentase peran BKB,BKL,BKR yang Aktif			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.584.494.500	2.584.494.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan			
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	321.139.400	625.384.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Jumlah cabang olahraga yang di gemari masyarakat Kab Luwu			



### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.130.371.833	6.118.561.833
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100.000.000	100.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Tingkat Kegemaran membaca			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.314.612.875	10.314.612.875
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			---			
				KECAMATAN LAMASI TIMUR	38.774.000	46.036.000
			Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				KECAMATAN SULI	12.140.400	12.140.400
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai ketentuan			
				KECAMATAN SULI	6.140.400	6.140.400
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				KECAMATAN SULI BARAT	23.488.000	38.404.500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			---			
				KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	149.297.943	149.297.943
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
				KECAMATAN SULI BARAT	211.000.000	211.000.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
			Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.814.450	22.814.450
<b>65</b>	<b>5. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase irigasi dalam kondisi baik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.692.656.393	8.281.337.187
			Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.199.870	1.460.400
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.199.870	1.335.600
			sentase Irigasi dal Kondisi Baik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.199.870	1.797.950

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			0 Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	648.000.000	648.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Ketaatan terhadap RTRW			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	629.545.800	566.630.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN	5.101.771.199	5.271.608.067
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
			Angka Ketersediaan Energi			
				DINAS KETAHANAN PANGAN	3.008.300.000	3.005.125.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Tingkat Komsumsi Protein			
				DINAS KETAHANAN PANGAN	579.073.400	582.248.400
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Cakupan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	150.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Indeks kualitas air			
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.000.000	24.325.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
			Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan			
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.514.700	9.514.700
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
			Persentase Izin Lingkungan dan PPLH yang di bina dan di awasi sesuai ketentuan peraturan perundangan			
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.637.500	16.637.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase sampah Perkantoran yang telah dilakukan Pengelolaan			
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.491.450	18.491.450
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi			
				DINAS PERIKANAN	27.000.000	27.000.000

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
				DINAS PERIKANAN	27.000.000	27.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Peningkatan populasi ternak			
				DINAS PERTANIAN	200.000.000	300.000.000
			peningkatan produksi komoditi hortikultuira			
				DINAS PERTANIAN	181.059.750	253.559.750
			Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan			
				DINAS PERTANIAN	181.059.750	253.559.750
			Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			
				DINAS PERTANIAN	3.317.500.000	2.941.500.000
			Persentase peningkatan produksi bibit ternak			
				DINAS PERTANIAN	3.317.500.000	2.941.500.000
			Persentase peningkatan produksi peternakan			
				DINAS PERTANIAN	3.517.500.000	3.241.500.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PERTANIAN	102.108.340	151.103.340
			Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
				DINAS PERTANIAN	7.056.372.000	8.070.717.534
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura			
				DINAS PERTANIAN	7.158.480.340	8.221.820.874
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan			
				DINAS PERTANIAN	7.158.480.340	8.221.820.874
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
				DINAS PERTANIAN	7.158.480.340	8.221.820.874
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian			
				DINAS PERTANIAN	2.989.927.200	2.843.717.200
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian			
				DINAS PERTANIAN	2.989.927.200	2.843.717.200
			Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan			
				DINAS PERTANIAN	2.989.927.200	2.843.717.200
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	30.594.700	44.986.700
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
				KECAMATAN WALENRANG	4.800.000	4.800.000
			---			
				KECAMATAN WALENRANG	400.000.000	399.999.991

**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Pemantapan Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan</b>							
		Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah						
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola				
					DINAS PERHUBUNGAN	48.740.000	53.999.500	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	140.961.100	267.721.600	
					DINAS SOSIAL	58.047.040	79.686.685	
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	297.424.750	405.757.224	
					DINAS KETAHANAN PANGAN	3.194.385.834	3.313.465.256	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.246.240.186	2.071.087.995	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.187.600	13.644.600		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.386.464.760	3.123.106.485		
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.365.047.633	3.606.134.060		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	213.333.750	270.906.800		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	974.173.192	1.158.791.360		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
			Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah						
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	576.518.300	750.992.780		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
			Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	89.147.900	90.651.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.828.129.142	8.279.615.433		
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.381.790.556	10.285.080.488		
					INSPEKTORAT DAERAH	12.000.000	12.000.000		
					KECAMATAN BAJO	181.949.700	201.942.293		
					KECAMATAN BELOPA	3.561.662.015	3.197.250.914		
					KECAMATAN BELOPA UTARA	71.630.931	75.805.031		
					KECAMATAN LAMASI	2.102.590.728	2.043.558.202		
					KECAMATAN LAROMPONG	1.932.696.074	1.891.035.858		
					KECAMATAN PONRANG	191.496.196	215.994.196		
					KECAMATAN WALENRANG BARAT	186.980.000	434.639.771		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.222.059.829	2.203.740.958		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan						
					KECAMATAN BAJO	4.152.100	4.152.100		
					KECAMATAN PONRANG	2.000.000	2.000.000		
					KECAMATAN WALENRANG BARAT	4.000.000	4.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	4.400.000	8.625.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
			Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum						
					KECAMATAN LAMASI	10.800.000	7.200.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
			Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan						
					KECAMATAN LAMASI	6.600.000	15.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.120.000	6.000.000		
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah							
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat					
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	607.930.550	907.370.100		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
				Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan					
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.604.589.039	3.816.101.529		
		Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana							
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
				Pcrsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten					
					DINAS SOSIAL	170.596.210	215.194.160		
		Menurunkan angka kriminalitas							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.474.700	17.474.700		
			Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan						
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
				Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani					
					DINAS SOSIAL	10.596.300	0		
			---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				0Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.556.000	0		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	289.606.762.326	285.282.249.187		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	33.016.200	19.671.199		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				APM SD/MI/Paket A					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.171.995.736	13.866.006.378		
				APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.772.093.187	15.819.162.230		
				APM SMP/MTs/Paket B					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.705.038.962	30.734.843.265		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
				Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diterapkan					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74.357.430	52.428.630		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
				Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.519.969	53.723.759		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS KESEHATAN	1.299.673.332	1.299.673.332		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi perangkat daeah yang disusun					
					DINAS KESEHATAN	89.830.085	117.948.885		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.037.981.000	3.286.752.547		
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.049.203.290	4.294.116.938		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.602.666.178	3.401.367.196		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.228.993.733	2.351.351.486		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Persentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan					
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000		
				Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki Satlinmas					
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000		
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.154.743.500	2.290.076.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	615.347.000	584.747.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Ketersediaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS SOSIAL	3.051.971.231	2.813.503.956	
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
					DINAS SOSIAL	35.000.000	17.000.000	
				Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS SOSIAL	9.933.480	17.734.080	
				Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS SOSIAL	462.110.730	617.804.792	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
				Persentase Ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial					
					DINAS SOSIAL	114.060.100	147.060.100		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase penyandang disabilitas telarlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti					
					DINAS SOSIAL	46.215.500	65.087.330		
				Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya korban HIV/AIDS dan Napza					
					DINAS SOSIAL	10.546.550	9.296.550		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Persentase penyandang PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial					
					DINAS SOSIAL	536.973.340	532.289.590		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
				Cakupan penyelenggaraan pelayanan korban bencana alam dan sosial					
					DINAS SOSIAL	46.336.750	43.422.700		
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap daerurat bencana daerah kabupaten					
					DINAS SOSIAL	46.336.750	43.422.700		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
				Cakupan penyelenggaraan pengelolaan TMP Nasional Kabupaten					
					DINAS SOSIAL	18.848.245	24.348.680		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	4.879.437.633	4.911.562.300		
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	633.914.950	658.979.950		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Indeks Pemberdayaan Gender					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	118.002.880	117.966.680		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
				Rasio KDRT					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38.932.650	38.932.650		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
				Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	81.062.020	74.762.020		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
				Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41.742.200	50.908.200		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
				Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51.881.000	51.881.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
				Cakupan penyelenggaraan perlindungan khusus anak					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29.851.900	26.951.900		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Skor Penanganan Rawan Pangan					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	33.600.400	33.593.160		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
				Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	18.024.870	13.324.870		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PERTANAHAN	2.067.178.410	2.218.279.608		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
				Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi					
					DINAS PERTANAHAN	37.590.800	78.439.100		
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						
				Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap di distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee					
					DINAS PERTANAHAN	16.122.300	46.119.150		
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
					DINAS PERTANAHAN	210.175.200	558.969.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	551.364.025	603.334.790	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.763.409.345	3.809.572.272	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Rasio Penduduk ber KTP					
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	758.380.900	845.402.248	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Rasio pasangan berakte nikah					
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	132.604.500	167.012.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	62.419.500	127.155.750		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
			Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan						
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.303.900	7.303.900		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	237.574.260	309.695.900		
			Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	253.891.200	253.891.200		
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	55.679.331	151.280.074		
			Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.184.348.078	3.115.912.030		
			persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.169.600	25.409.600		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						
			jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.040.890	15.040.890		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
			Persentasi Peningkatan status desa mandiri						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.146.105.764	4.043.703.414		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
			Cakupan pemberdayaan lembaga desa dan lembaga adat desa						
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	929.048.800	1.279.046.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	162.297.825	159.558.350		
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.590.000	1.590.000	
				Cakupan penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	244.770.000	219.770.000	
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
					DINAS PERHUBUNGAN	4.020.460.681	4.149.259.712	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)				
					DINAS PERHUBUNGAN	901.535.900	1.085.790.650	
				Jumlah arus penumpang angkutan umum				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.995.033.432	1.842.971.319	
				Persentase layanan angkutan darat				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.532.542.000	1.855.068.750	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.222.434.506	3.198.728.134		
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
			Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa						
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.472.170.880	1.662.114.320		
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
			Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu						
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	554.528.180	546.350.820		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
			Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi						
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	37.299.450	67.264.050		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
			Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	44.690.250	74.723.250	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Prosentase tingkat pengembangan Kebudayaan di daerah					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	101.090.600	77.640.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase kesenian tradisional yang telah dikembangkan					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	87.517.200	49.471.200	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40.775.600	0	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Prosentase cagar budaya yang telah dilestarikan dan dikelola					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	151.080.000	0	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.627.501.388	3.269.751.072		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
				Persentase Koleksi Nasional dan naskah kuno yang dilestarikan					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.442.500	7.442.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
				tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.131.675	45.005.675		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah					
					DINAS PERIKANAN	67.076.196	71.233.200		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PERIKANAN	778.408.444	1.017.502.277		
				cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PARIWISATA	24.061.200	22.335.100		
				Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PARIWISATA	3.411.496.289	3.139.634.400		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PERTANIAN	30.000.000	47.556.000		
				Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah					
					DINAS PERTANIAN	293.756.600	322.894.500		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah					
					DINAS PERTANIAN	99.360.286	99.360.286		
				Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PERTANIAN	3.807.900	7.367.900		
				Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					DINAS PERTANIAN	15.466.275.786	14.784.851.737		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Peningkatan Populasi Ternak					
					DINAS PERTANIAN	23.396.470	28.396.470		
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					
					DINAS PERTANIAN	23.396.470	28.396.470		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PERDAGANGAN	4.750.125.571	4.609.386.708		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
				---					
					DINAS PERDAGANGAN	2.468.248.120	2.973.146.341		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
				---					
					DINAS PERDAGANGAN	100.623.820	127.234.615		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
				---					
					DINAS PERDAGANGAN	19.658.000	18.872.000		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
				---					
					DINAS PERDAGANGAN	85.165.940	89.014.640		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah					
					SEKRETARIAT DAERAH	23.499.278.275	26.893.791.177		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
				Cakupan Pelaksanaan Bina Mental Spritual dan Evaluasi Kesejahteraan Rakyat					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SEKRETARIAT DAERAH	3.191.496.750	3.751.935.500	
				Kerjasama Daerah yang difasilitasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	64.743.880	458.252.180	
				Nilai LPPD				
					SEKRETARIAT DAERAH	432.870.000	432.870.000	
				Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama				
					SEKRETARIAT DAERAH	721.462.270	868.776.320	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan				
					SEKRETARIAT DAERAH	435.517.260	576.097.833	
				Persentase kebijakan pemanfaatan Sumber daya Alam yang telah dilaksanakan secara maksimal				
					SEKRETARIAT DAERAH	47.786.850	47.786.850	
				Persentase ketersediaan sistem SPSE beroperasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	379.237.730	379.204.570	
				Persentase Penyelesaian tender paket pekerjaan tepat waktu				
					SEKRETARIAT DAERAH	155.018.500	155.018.500	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					SEKRETARIAT DPRD	21.837.877.919	21.626.534.245		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					SEKRETARIAT DPRD	10.629.887.500	10.629.887.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	4.204.326.623	4.200.096.259		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
			Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu						
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	182.818.250	186.766.250		
			Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	258.998.570	278.996.070		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	33.804.000	33.679.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
			Persentase Penyerapan APBD						
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	248.318.257.069	249.870.525.488		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
			persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap target yang ditetapkan						
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	131.878.520	131.878.020		
			Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Di Tetapkan						
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.316.201.079	3.522.839.449		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.429.996.271	19.155.696.563		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
			Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN						



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.058.466.200	583.168.100		
				persentase kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	483.353.560	438.473.400		
				persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai Formasi					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.058.466.200	583.168.100		
				Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.835.196.110	1.546.553.350		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	895.478.000	1.016.790.100		
				persentase PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	895.478.000	1.016.790.100			
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
				Jumlah Rekomendasi Hasil-Hasil Kelitbang						
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	727.861.490	719.764.390			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					INSPEKTORAT DAERAH	1.268.168.328	1.497.747.227			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
				Persentase tindak lanjut temuan BPK						
					INSPEKTORAT DAERAH	2.354.245.550	3.073.803.400			
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
				Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi						
					INSPEKTORAT DAERAH	628.152.140	506.605.140			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					KECAMATAN BAJO	12.600.000	12.600.000		
				Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah					
					KECAMATAN BAJO BARAT	1.200.000	1.200.000		
				Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN BAJO BARAT	52.800.000	50.400.000		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN BAJO BARAT	1.076.470.491	983.496.129		
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	1.992.516.232	1.949.259.307		
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	84.944.620	84.944.620		
				Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	1.208.119.381	1.183.596.335		
				Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	2.092.000	2.092.000		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	2.517.456.959	2.148.980.967		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	50.271.566	56.319.566		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN BUPON	279.973.939	279.369.938		
				Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan					
					KECAMATAN BUPON	6.140.400	6.140.400		
				---					
					KECAMATAN KAMANRE	1.524.805.111	1.641.831.127		
					KECAMATAN LAMASI TIMUR	14.566.800	14.566.800		
				Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN LAROMPONG	143.719.200	130.119.200		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN LAROMPONG	1.450.000	850.000		
				cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah Daerah					
					KECAMATAN LAROMPONG	10.038.150	10.038.150		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				---					
					KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	1.898.644.803	1.582.760.916		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN LATIMOJONG	1.361.814.011	1.366.377.201		
					KECAMATAN PONRANG	6.070.800	6.070.800		
					KECAMATAN SULI BARAT	1.456.092.830	1.474.067.312		
					KECAMATAN WALENRANG	2.737.152.870	2.870.999.369		
					KECAMATAN WALENRANG TIMUR	1.631.627.390	1.697.685.306		
				---					
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	124.107.985	141.446.905		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN BUA	3.561.609.559	3.668.075.285		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan						
					KECAMATAN BAJO BARAT	10.000.000	27.840.000		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	18.752.100	18.752.100		
				cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	6.000.000	6.000.000		
				Cakupan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	4.152.100	4.152.100		
				cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan					
					KECAMATAN BUPON	6.117.000	6.117.000		
					KECAMATAN LATIMOJONG	13.352.100	13.352.100		
					KECAMATAN SULI BARAT	6.000.000	6.000.000		
				Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan					
					KECAMATAN WALENRANG TIMUR	4.800.000	4.800.000		
				---					
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.400.000	8.000.000		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan					
					KECAMATAN BUA	4.000.000	4.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
					KECAMATAN BAJO	419.463.690	419.463.690		
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	11.160.000	11.160.000		
				---					
					KECAMATAN BELOPA	1.419.791.741	1.434.552.341		
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	458.799.988	458.799.900		
				---					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	434.199.993	434.199.993		
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
					KECAMATAN BUPON	492.200.000	492.800.000		
				---					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN KAMANRE	440.188.586	430.896.586	
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					KECAMATAN LAMASI	505.000.000	505.000.000	
				---				
					KECAMATAN LAROMPONG	474.800.000	474.800.000	
					KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	415.947.143	415.947.143	
				cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam ragka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					KECAMATAN PONRANG	450.999.472	450.999.472	
				cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					KECAMATAN PONRANG	510.100.000	510.100.000	
				---				
					KECAMATAN PONRANG SELATAN	149.690.048	149.690.048	
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					KECAMATAN SULI BARAT	369.600.000	377.800.000	
					KECAMATAN WALENRANG BARAT	5.660.000	0	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				---					
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	383.813.376	605.813.263		
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
					KECAMATAN BUA	421.810.134	421.810.134		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum					
					KECAMATAN BUPON	1.550.000	1.550.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	2.750.000	2.750.000		
				cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	600.000	600.000		
				---					
					KECAMATAN WALENRANG UTARA	4.500.000	6.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	675.000	675.000		
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	3.600.000	3.600.000		
					KECAMATAN BUPON	2.400.000	2.400.000		
					KECAMATAN WALENRANG	9.520.000	9.520.000		
					KECAMATAN WALENRANG BARAT	3.360.000	11.360.000		
					KECAMATAN WALENRANG TIMUR	6.400.000	9.600.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.791.965.660	2.903.131.045		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
				Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.199.962.727	1.199.962.727		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
				Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.437.500	76.437.500		
				Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.437.500	76.437.500		
<b>2</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing</b>								
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	2.501.781.532	2.537.137.473		
					KECAMATAN BAJO	5.257.900	5.257.900		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan					
					KECAMATAN BAJO	6.000.000	6.000.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN PONRANG SELATAN	9.600.000	9.600.000	
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan					
					DINAS KESEHATAN	66.735.167.579	117.991.931.337	
			Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan masyarakat					
					DINAS KESEHATAN	149.999.981	149.999.981	
			Rasio Pembiayaan Operasional rumah sakir (Cast Recovery Ratio/CRR)					
					DINAS KESEHATAN	50.125.134.440	100.104.725.874	
		Menurunkan angka kriminalitas						
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.814.450	22.814.450	
		Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan						
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.017.750.000	1.017.750.000		
		---							
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					DINAS KESEHATAN	548.292.869	548.292.869		
				Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan					
					DINAS KESEHATAN	1.530.045.907	1.799.626.265		
				Capaian SPM dan Kinerja					
					DINAS KESEHATAN	1.157.667.394	1.219.647.330		
				indek kepuasan masyarakat					
					DINAS KESEHATAN	805.000.000	772.474.100		
				Indeks Kepuasan Masyarakat					
					DINAS KESEHATAN	3.032.352.985	3.403.805.501		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
				Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					
					DINAS KESEHATAN	397.630.700	324.274.800		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	86.669.794	83.692.864	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Presentase Penggunaan MKJP					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.174.519.384	4.176.526.709	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Presentase peran BKB,BKL,BKR yang Aktif					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.584.494.500	2.584.494.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan					
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	321.139.400	625.384.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah cabang olahraga yang di gemari masyarakat Kab Luwu					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.130.371.833	6.118.561.833		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
			Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100.000.000	100.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
			Tingkat Kegemaran membaca						
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.314.612.875	10.314.612.875		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah secara tepat waktu						
					KECAMATAN BELOPA	6.195.000	6.234.000		
			---						
					KECAMATAN LAMASI TIMUR	1.200.624.235	1.085.612.859		
			Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					KECAMATAN SULI	108.140.400	92.353.000		
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai ketentuan						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN SULI	6.140.400	6.140.400	
				Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					KECAMATAN SULI	6.050.000	3.080.000	
				Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu				
					KECAMATAN SULI	1.422.964.818	1.251.773.269	
				Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah				
					KECAMATAN SULI	37.354.200	50.111.600	
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
					KECAMATAN SULI BARAT	23.488.000	38.404.500	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik di kecamatan				
					KECAMATAN SULI	6.075.000	6.075.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum				
					KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	8.590.000	8.590.000	
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					KECAMATAN SULI	534.399.310	534.399.310	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
					KECAMATAN SULI BARAT	211.000.000	211.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
				Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
					KECAMATAN BAJO BARAT	1.000.000	1.000.000		
<b>3</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Lingkungan Permukiman</b>								
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman							
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
				Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.000.000	826.750.817		
		---							
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.651.100.000	6.696.100.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.647.115.052	5.563.120.140		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
				Rasio kepatuhan IMB kabupaten					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.381.645.625	11.977.546.844		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	108.937.010.831	196.933.303.264		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.000.000	5.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
				Persentase rumah layak huni					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	53.000.000	4.450.903.086		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
			Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kabupaten yang tertata						
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.150.701.000	4.185.701.000		
			Persentase rumah layak huni						
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	50.000.000		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
			Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata						
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	545.000.000	917.500.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.503.366.497	13.685.447.496		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
			Jumlah arus penumpang angkutan umum						
					DINAS PERHUBUNGAN	100.985.000	159.483.650		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
				Luas cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yang disediakan					
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	35.364.800	33.872.200		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah					
					KECAMATAN BELOPA UTARA	6.600.000	6.600.000		
<b>4</b>	<b>Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi</b>								
		Meningkatkan pendapatan masyarakat							
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
				Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	442.157.653	357.411.057		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	40.673.490	40.673.490		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	339.298.525	372.238.950		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				Total Produksi Perikanan Budidaya					
					DINAS PERIKANAN	3.335.892.000	3.613.342.000		
		---							
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
				Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.000.000	100.000.000		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
				Persentase penyandang disabilitas telarlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS SOSIAL	37.248.500	28.573.500		
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	34.434.100	37.545.100		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan						
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	6.576.500	6.576.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap						
					DINAS PERIKANAN	3.194.960.000	3.459.460.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya						
					DINAS PERIKANAN	3.550.600	0		
			---						
					DINAS PERIKANAN	65.000.000	65.000.000		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
				Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan Secara Terpadu					
					DINAS PARIWISATA	608.520.014	708.520.014		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
				Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten					
					DINAS PARIWISATA	158.000.000	307.999.999		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
				Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat					
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.246.250	24.246.250		
<b>5</b>	<b>Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis</b>								
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	121.590.000	122.700.000		
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan							
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Tingkat penerapan rencana pembangunan industri					
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	200.000.000	590.042.900		
		Meningkatkan pendapatan masyarakat							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
				Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	50.000.000	50.000.000		
		Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah							
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
				Tingkat Komsumsi Protein					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	579.073.400	582.248.400		
		---							
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
				Persentase irigasi dalam kondisi baik					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.449.969.412	2.926.327.365		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Angka Ketersediaan Energi					
					DINAS KETAHANAN PANGAN	3.008.300.000	3.005.125.000		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
				Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten					
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	50.000.000	50.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
				Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif					
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	50.000.000	50.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
				Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	60.928.300	60.928.100		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
				Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	56.317.000	51.306.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Lama Proses Perizinan penanaman modal					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.025.650	4.852.650	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks Kepuasan Masyarakat					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	379.150.000	379.150.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi					
					DINAS PERIKANAN	27.000.000	27.000.000	
			Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
					DINAS PERIKANAN	27.000.000	27.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan populasi ternak					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PERTANIAN	200.000.000	300.000.000		
				peningkatan produksi komoditi hortikultuira					
					DINAS PERTANIAN	181.059.750	253.559.750		
				Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan					
					DINAS PERTANIAN	181.059.750	253.559.750		
				Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan					
					DINAS PERTANIAN	3.317.500.000	2.941.500.000		
				Persentase peningkatan produksi bibit ternak					
					DINAS PERTANIAN	3.317.500.000	2.941.500.000		
				Persentase peningkatan produksi peternakan					
					DINAS PERTANIAN	3.517.500.000	3.241.500.000		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan					
					DINAS PERTANIAN	102.108.340	151.103.340		
				Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					
					DINAS PERTANIAN	7.056.372.000	8.070.717.534		
				Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura					
					DINAS PERTANIAN	7.158.480.340	8.221.820.874		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan					
					DINAS PERTANIAN	7.158.480.340	8.221.820.874		
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
					DINAS PERTANIAN	7.158.480.340	8.221.820.874		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					
					DINAS PERTANIAN	50.000.000	50.000.000		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian					
					DINAS PERTANIAN	3.146.127.200	2.999.917.200		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian					
					DINAS PERTANIAN	3.146.127.200	2.999.917.200		
				Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan					
					DINAS PERTANIAN	3.146.127.200	2.999.917.200		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					
					KECAMATAN WALENRANG	4.800.000	4.800.000		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				---					
					KECAMATAN WALENRANG	400.000.000	399.999.991		
<b>6</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana</b>								
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	5.103.476.199	5.273.313.067		
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman							
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.199.870	1.335.600		
		Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana							
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Indeks kualitas air					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.893.501.000	3.866.529.959	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.514.700	9.514.700	
		---						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase irigasi dalam kondisi baik					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.592.666.588	8.181.347.382	
			Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.199.870	1.460.400	
			sentase Irigasi dal Kondisi Baik					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.199.870	1.797.950	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				0 Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan					
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	648.000.000	648.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
			Ketaatan terhadap RTRW						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	629.545.800	566.630.800		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
			Cakupan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup						
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	150.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
			Persentase Izin Lingkungan dan PPLH yang di bina dan di awasi sesuai ketentuan peraturan perundangan						
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.637.500	16.637.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
			Persentase sampah Perkantoran yang telah dilakukan Pengelolaan						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.972.843.450	2.110.843.450		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu					
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	30.594.700	44.986.700		



**Tabel 3.4**  
**Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja**

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 dokumen 8 dokumen	2 dokumen 8 dokumen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 laporan	3 laporan	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Luwu		
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 orang	2683 orang	Kab. Luwu	
								1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan yang diverifikasi	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	4 laporan	4 laporan	Kab. Luwu		
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan BMD	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 dokumen	7 dokumen	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan atributnya yang diadakan	67 stell/pasang	67 stell/pasang	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai perangkat daerah yang dilakukan pendataan dan pengolahan administrasi	100 orang	100 orang	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	10 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	379 orang	379 orang	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	1516 orang	1516 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	14 unit	14 unit	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	22 jenis	22 jenis	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	20 jenis	20 jenis	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	216 OK	216 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	85 %	85 %	Kab. Luwu		
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	220 Unit	220 Unit	1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	160 buah	160 buah	Kab. Luwu		
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum kantor	12 OB	12 OB	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	41 Unit	41 Unit	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	25 Unit	25 Unit	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1800 m2	1800 m2	Kab. Luwu		
								1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM SD/MI/Paket A	100 Persen	100 Persen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik	21 Persen	21 Persen	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu	
								1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	44 Ruang	44 Ruang	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	33 Ruang	33 Ruang	Semua Kab/Kota		
								1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	25 Ruang	25 Ruang	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah SD yang dibangun	20 Unit	20 Unit	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	41 sekolah	41 sekolah	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	3 Unit	3 Unit	Semua Kab/Kota		
								1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	66 ruang	66 ruang	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya ruang guru/kepala sekolah yang representatif	90 Persen				
								1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan yang berkualitas dan nyaman	90 Persen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet (Jamban) sekolah yang dilakukan rehabilitasi	100 Persen		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima bantuan pengadaan mebel sekolah	100 Persen		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Meringankan beban orang tua siswa sekolah dasar	95 Persen				
								1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar	100 Persen				
								1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah peralatan komputer yang disediakan	36 Unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Meningkatnya kualitas pendidikan siswa siswi sekolah dasar	97 Persen				
								1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tersedianya laporan evaluasi tindak lanjut satuan pendidikan	1 Laporan				
								1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Adanya siswa berprestasi yang dapat mewakili ke tingkat Nasional	90 Persen				
								1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing	90 Persen				
								1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar	95 Persen				
								1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah dokumen laporan yang dikelola dan disusun	3 dokumen		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang dibangun	17 Sekolah				
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	37 Persen	37 Persen	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	1 Paket	1 Paket	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang ditambah	3 Ruang	3 Ruang	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah yang dibangun	6 Ruang	6 Ruang	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	25 unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	5 unit 5 unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang dibangun	4 unit 4 unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dibangun	6 unit 6 unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun sarana prasarana utilitasnya	12 sekolah 12 sekolah		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi	23 ruang 23 ruang		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi	5 unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	2 sekolah 2 sekolah		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium sekolah yang direhabilitasi	3 sekolah 3 sekolah		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi	25 unit 25 unit		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah sekolah yang menerima mebel	45 sekolah 45 sekolah		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa	5641 orang 5641 orang		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Disediakan Biaya Personil	19012 orang 19012 orang		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	15 paket		Kab. Luwu		
								1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6207 orang 6207 orang		Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Terlibat dalam Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 Orang	100 Orang	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang difasilitasi Dalam Pengembangan Karir	1050 Orang	1050 Orang	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kelembagaan dan Manajemen yang baik	44 sekolah	44 sekolah	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan BOS yang dikelola	3 laporan	3 laporan	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang tatasaha sekolah yang direhab.		3 unit	Kab. Luwu			
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak Usia Dini Yang Mengikuti PAUD	62 Persen	62 Persen	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah RKB yang dibangun	3 unit	3 unit	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun sarana prasarana utilitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung ruang kelas/ruang guru PAUD yang direhab	5 unit	5 unit	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima mebel	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan siswa	430 Orang	430 Orang	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil	7533 Orang	7533 Orang	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima alat praktik praga siswa	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud yang disediakan	16 orang	16 orang	Kab. Luwu			
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	jumlah paud yang dibina	224 lembaga	224 lembaga	Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah laporan BOP	3 laporan	3 laporan	Kab. Luwu		
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	85 Persen	85 Persen	1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	3 lembaga	3 lembaga	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang menerima pengadaan meubeleir	8 lembaga	8 lembaga	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga (PKB, PKBM) yang disediakan biaya personil peserta didik	8 lembaga	8 lembaga	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang disediakan		2 Paket	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah buta aksara yang mengikuti proses belajar non formal	8 lembaga	8 lembaga	Kab. Luwu		
								1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah peserta lomba tutor kf dan warga belajar	50 orang	50 orang	Kab. Luwu		
	<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diterapkan	2 Kurikulum	2 Kurikulum	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar Yang Telah ditetapkan	2 Kurikulum	2 Kurikulum	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah peserta pelatihan	100 orang	100 orang	Kab. Luwu	
	<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	90 Persen	90 Persen	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar	90 Persen	90 Persen	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu	
								1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan kerja Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah PAUD dan pendidikan Nonformal yang dibina	224 lembaga	224 lembaga	Kab. Luwu	
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
	<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja Yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (LAKIP)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu	
					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	320 OB	320 OB	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	13 jenis	13 jenis	Kab. Luwu	
						Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	8 jenis	8 jenis		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	830 orang	830 orang		
						Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	285 OB	285 OB	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggap pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokomen	3 Dokomen	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu		
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi milik daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen	1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	36 OB	36 OB	Kab. Luwu		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas & Fungsi	100 Pesen	100 Pesen	1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	90 Persen	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	17 unit	17 unit	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	8 unit	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis cetakan/penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makanan dan minuman yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120 OK	120 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	20 Persen	20 Persen	1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang disediakan	3 unit	3 unit	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit	5 unit	Kab. Luwu		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 persen	100 persen	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa sutar menyurat yang disediakan	400 Surat	400 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1646 OB	1646 OB	Kab. Luwu		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin / berkala	13 unit	13 unit	Kab. Luwu		
								1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan	458 m2	458 m2	Kab. Luwu		
	<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu / Poskesdes yang dibangun	4 unit	4 unit	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	jumlah rumah dinas yang dibangun	2 unit	2 unit			
								1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara	3 Paket	3 Paket	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan	1 Puskesmas	4 Puskesmas	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	3 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah unit rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	4 Puskesmas	4 Puskesmas	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang direhab	9 unit	9 unit			
								1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah unit rumah dinas tenaga kesehatan yang direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	4 unit	4 unit	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket/unit alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 paket	3 paket	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Junlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22 puskesmas	22 puskesmas	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	1 paket	1 paket	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	300 unit	300 unit	Kab. Luwu		

No	Program	Program		1.02.02.2.02	Kegiatan		1.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan		Kab	Ket.			
		Indikator Kinerja		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indikator Kinerja		Luwu				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7508 orang	7508 orang			
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
					JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	1 puskesmas	1 puskesmas							
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
					jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 puskesmas	1 puskesmas							
					jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 PUSKESMAS	1 PUSKESMAS							
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	22 Puskesmas	22 Puskesmas							
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
					Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
					Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan yang tersedia	80 persen	80 persen							
					Jumlah layanan kesehatan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit							
					jumlah layanan kesehatan untuk UKM DAN UKP	80 persen	80 persen							
					jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100 Persen	100 Persen							
					Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100 Persen	100 Persen							
					Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	80 persen	80 persen							

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah
					Rujukan yang tersedia Jumlah Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia jumlah puskesmas yang disediakan biaya operasional Jumlah Puskesmas Yang menyediakan biaya operasional JUMLAH PUSKESMAS YANG MENYEDIAKAN BIAYA OPERASIONAL Jumlah Puskesmas Yang Menyediakan Biaya Oprasional	80 persen 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 PUSKESMAS 1 Puskesmas	80 persen 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 PUSKESMAS 1 Puskesmas							
								1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7116 orang 7116 orang		Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	7543 orang 7543 orang		Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang diberi pelayanan sesuai standar	29841 orang 29841 orang		Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19724 anak 19724 anak		Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	27281 orang 27281 orang		Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7090 orang 7090 orang		Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Orientasi Pelaksanaan Gizi Masyarakat	22 Kelompok	22 Kelompok	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Laporan pelaksanaan kesehatan kerja dan olah raga	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan lingkungan	22 Kelompok	22 Kelompok	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	4 kelompok	4 kelompok	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah kelompok masyarakat yang diberikan surveillance kesehatan	22 Kelompok	22 Kelompok	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	22 Kelompok	22 Kelompok	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan khusus	420 orang	420 orang	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular dan tidak menular	22 kelompok	22 kelompok	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jumlah iuran jaminan kesehatan nasional bagi peserta Jaminan kesehatan Nasional	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 22 Puskesmas 1 Puskesmas 1 puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 60250 Jiwa	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 22 Puskesmas 1 Puskesmas 1 puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 60250 Jiwa	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah unsur kelayakan kabupaten sehat yang ditingkatkan	7 tatanan	7 tatanan	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah bulan operasional pelayanan kesehatan RS	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dan jenis operasional pelayanan puskesmas Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas Jumlah puskesmas yang disediakan biaya operasional puskesmas	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Pukesmas 22 puskesmas	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Pukesmas 22 puskesmas	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan akreditasi Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan akreditasi	9 Faskes 9 faskes	9 Faskes 9 faskes	Kab. Luwu			
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	5 Sistem	5 Sistem	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang digunakan dalam rangka informasi kesehatan	1 Sistem	1 Sistem	Kab. Luwu			
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang ditingkatkan mutunya	22 Puskesmas	22 Puskesmas	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu			
	<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	77.27 Persen	77.27 Persen	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	100 Persen	100 Persen	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar yang disediakan	40 orang	40 orang	Kab. Luwu		
								1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang disertifikasi	360 Orang	360 Orang	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang disertifikasi	360 Orang	360 Orang	Kab. Luwu			
	<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 Persen	100 Persen	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Industri Rumah Tangga Yang bersertifikasi	35	35	35	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, OMUT	65 Dokumen	65 Dokumen	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat Produksi Pangan yang di terbitkan	50 Sertifikat	50 Sertifikat	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi	50 izin	50 izin	Kab. Luwu		
	<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 Persen	100 Persen	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan/kemitraan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22 Puskesmas	22 Puskesmas	Kab. Luwu	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan sehat dalam rangka promosi kesehatan	22 Puskesmas	22 Puskesmas	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Bersih	22 Puskesmas	22 Puskesmas	Kab. Luwu		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang terlibat dalam bimbingan teknis dan supervisi	22 Puskesmas	22 Puskesmas	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah puskesmas yang terlibat dalam bimbingan teknis dan supervisi	22 Puskesmas	22 Puskesmas	Kab. Luwu		
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>														
	<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	100,00 Persen	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LKJIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Jenis	5 Jenis	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	125 Orang	125 Orang	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	180 Orang/Bulan	180 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Kab. Luwu		
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD)	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	3 Jenis	3 Jenis	1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	3 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	14 ORANG	14 ORANG	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	9 Jenis	9 Jenis	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Unit	8 Unit	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 BULAN	12 BULAN	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum Yang disediakan Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	3 Jenis 92 Orang/Kali 105 Orang/Kali	3 Jenis 92 Orang/Kali 105 Orang/Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kab. Luwu		
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1200 Orang/Bulan	1200 Orang/Bulan	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	87 Unit/Set 87 Unit/Set	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	47 Unit 47 Unit	Kab. Luwu					
							1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan	24 Unit 24 Unit	Kab. Luwu					
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	20 UNIT/SET 20 UNIT/SET	Kab. Luwu					
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	4500 m2 4500 m2	Kab. Luwu					
	<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase irigasi dalam kondisi baik	38,17 Persen 38,17 Persen	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA	5 Titik/Lokasi 5 Titik/Lokasi	1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Luwu					
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	40.11 Persen 40.11 Persen				1.03.02.2.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Lokasi yang dilakukan pengelolaan Sumber Daya Air	4 TITIK/LOKASI 4 TITIK/LOKASI	Kab. Luwu					
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai yang dilaksanakan	4206.24 METER 4206.24 METER	Kab. Luwu					
							1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	4 TITIK/WILAYAH 4 TITIK/WILAYAH	Kab. Luwu					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA 5 Titik/Lokasi 5 Titik/Lokasi			1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
					Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik 39.12 Persen									
					Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik 69 D.I	69 D.I								
					Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik 69 D.I	69 D.I								
					Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik 39.12 Persen	39.12 Persen		1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	26.94 METER	26.94 METER	Kab. Luwu		
								1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1669.92 M2	1669.92 M2	Kab. Luwu		
								1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	5354.57 METER	5354.57 METER	Kab. Luwu		
								1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhab	3 DAERAH IRIGASI (D.I)	3 DAERAH IRIGASI (D.I)	Kab. Luwu		
								1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	1 UPTD	1 UPTD	Kab. Luwu		
									Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	69 DAERAH (D.I)	69 DAERAH (D.I)			
									Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik	22 D.I				
								1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	1 BUAH	1 BUAH	Kab. Luwu		
	<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	72.00 Persen	72.00 Persen	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	72.45 Persen	72.45 Persen	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaiki SPAM						
								1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan pipa yang dibangun	240 SR	240 SR	Kab. Luwu		
								1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	1270 SR	1270 SR	Kab. Luwu		
								1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	134 SR	134 SR	Kab. Luwu		
								1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						
	<b>1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	0 Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	73,00 Persen	73,00 Persen	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	2 Unit	2 Unit	1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 KECAMATAAN	1 KECAMATAAN	Kab. Luwu	
								1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	1 UNIT	1 UNIT	Kab. Luwu		
	<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota						
								1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota						
								1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota						
								1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman						
	<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,20 persen	0,20 persen	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	10 Persen	10 Persen	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
								1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran drainase yang Dibangun	5896,3 M2	5896,3 M2	Kab. Luwu		
								1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan						
								1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan						
								1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						
	<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	25,8 Angka	25,8 Angka	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	20 Angka	20 Angka	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu	
								1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota						
								1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang direhabilitasi, renovasi dan Ubahtsuai	4 Unit	4 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0.10 Persen	0.10 Persen	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	0.1 Persen	0.1 Persen	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
									1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Volume penataan bangunan yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu	
	<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	34.16 PERSEN	34.16 PERSEN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	34.04 PERSEN	34.04 PERSEN	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen		Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Tanaman yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	4.2 Ha			
									1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	18567.37 METER	18567.37 METER	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan dari kerikil ke aspal atau beton	5322.8 METER	5322.8 METER	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	12436.69 METER	12436.69 METER	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	197.06 METER	197.06 METER	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara berkala	6327.43 METER	6327.43 METER	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Titik Jalan Yang di Pelihara (ASPAL) Jumlah Titik Jalan Yang di Pelihara (KERIKIL)	6 TITIK 16 TITIK	6 TITIK 17 TITIK	Kab. Luwu	
									1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	19 UNIT	19 UNIT	Kab. Luwu	
	<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10 Persen	10 Persen	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih	58 Orang	58 Orang	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	25 ORANG	25 ORANG	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pegawai/masyarakat yang difasilitasi	33 ORANG	33 ORANG	Kab. Luwu		
	<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Ketaatan terhadap RTRW	23,21 Persen	23,21 Persen	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten	11.61 Persen	11.61 Persen	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	Kab. Luwu	
								1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota						
								1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang						
					1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	2 LAPORAN	2 LAPORAN	Kab. Luwu	
								1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten	5 LAPORAN	5 LAPORAN	Kab. Luwu		
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang disediakan	10 BUAH	10 BUAH	Kab. Luwu		
					1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>														

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	10 dokumen	10 dokumen	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	448 OB	448 OB	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	1.04.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan administrasi kepegawaian daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Kab. Luwu		
								1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	70 orang	70 orang	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5 orang	5 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	9 kegiatan	9 kegiatan	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Bangunan yang di Sediakan Jumlah jenis ATK yang di Sediakan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah	355 kali	355 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 aplikasi	1 aplikasi	Kab. Luwu		
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	47 unit	47 unit	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 m2	1 m2	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 m2	1 m2	Kab. Luwu		
								1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	11000 kwh	11000 kwh	Kab. Luwu		
	<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase rumah layak huni	100 %	100 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	1 laporan	1 laporan	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu	
								1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Laporan hasil Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang didata dan diverifikasi	6 desa	6 desa	Kab. Luwu		
								1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Laporan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	Kab. Luwu		
								1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	Kab. Luwu		
								1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah anggota Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	3 orang	3 orang	Kab. Luwu		
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	10 unit	10 unit	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	10 kegiatan	10 kegiatan	Kab. Luwu		
								1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
								1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	10 unit	10 unit	Kab. Luwu		
								1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun	15 Unit		Kab. Luwu		
	<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase rumah layak huni	20.84 %	20.84 %	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang difasilitasi	100 %	100 %	1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh yang disusun dan/atau Review serta Legalisasi	Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh yang disusun dan/atau Review serta Legalisasi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu		
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan Penataan dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Laporan hasil Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota		
								1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	"Dokumen Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh"	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	"Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina"	1 kelompok	1 kelompok			
								1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	"Jumlah peserta pertemuan untuk Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh"	120 orang	120 orang	Semua Kab/Kota		
								1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu		
								1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	15 Lokasi	15 Lokasi			
								1.04.03.2.02.07 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	15 dokumen	15 dokumen	Kab. Luwu		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	"Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh"	10 laporan	10 laporan	1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah rumah tidak layak huni dan PSU yang dilakukan perbaikan	100 unit	100 unit	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	"Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh"	10 laporan	10 laporan	Kab. Luwu		
	<b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	21,63 Persen	21,63 Persen	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	22 unit	22 unit	Kab. Luwu	
	<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100 Persen	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian	150 unit	150 unit	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu	
								1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang disediakan	18 paket	18 paket	Semua Kab/Kota		
								1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan	20 laporan	20 laporan	Kab. Luwu		
								1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	jumlah PSU permukiman yang disediakan/dikelola	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Cakupan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	80 %	80 %	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah permohonan bagi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang difasilitasi dalam penerbitan sertifikasi	20	20	1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laoran hasil koordinasi dan sinkronisasi 1 laporan 1 laporan Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Kab. Luwu		
	<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>													
	<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	6 kegiatan	6 kegiatan	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	100,00 Persen		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen		Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		
		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		
									1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
										Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan disusun	5 Dokumen 4 dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 4 dokumen 3 Dokumen	Kab. Luwu		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu Persentase Penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	4 kegiatan 100 persen 1 tahun	4 kegiatan 100 persen 1 tahun	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	12 Bulan 540 OB 2683 OB	12 Bulan 540 OB 2683 OB	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang di verifikasi Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 (Satu) Tahun Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	108 OB 108 OB 144 OB 144 OB 6 OB 6 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	Kab. Luwu			
								1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan 14 Laporan 2 laporan 2 laporan 14 laporan 14 laporan	Kab. Luwu			
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD	100 persen 100 persen 12 0 12 0 2 kegiatan 2 kegiatan		1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsialisasi BMD yang disusun	2 laporan 2 laporan	Kab. Luwu			
								1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 12 bulan 12 bulan	Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	1 tahun 100 persen	1 tahun 100 persen	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapan Lainnya yang disediakan Jumlah Pakaian Dinas (PDH,PKL,KORPRI,KHUSUS Hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	215 stel/pasang 175 stel/pasang 200 stel/pasang 200 stel/pasang		Kab. Luwu		
								1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional ahli dan fungsional terampil	3 orang 4 orang	3 orang 4 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisai peraturan Perundang-undangan	3 orang	3 orang	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	1 orang 215 stel/pasang	1 orang 215 stel/pasang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	1 tahun 5 kegiatan 100 Persen	1 tahun 5 kegiatan 100 Persen	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis 10 jenis	5 Jenis 10 jenis	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis 1 unit	3 jenis 1 unit	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam 1 (Satu) Tahun tersedianya logistik kantor tersedianya logistik kantor	10 Jenis 12 Bulan 5 jenis 5 Jenis	10 Jenis 12 Bulan 5 jenis 5 Jenis	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan dalam 1 (satu) Tahun Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Jenis cetak dan penggandaan yang disediakan tersedianya bahan cetak dan penggandaan tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan 8 Jenis 3 jenis 10 Jenis 10 Jenis	12 Bulan 8 Jenis 3 jenis 10 Jenis 10 Jenis	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan dalam 1 (satu) Tahun Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan 12 OB 3 jenis	12 Bulan 12 OB 3 jenis	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material Kebutuhan Perkantoran 1 (satu) Tahun Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun Jumlah Jenis ATK yang disediakan tersedianya atk kantor tersedianya atk kantor	12 OB 2 OB 25 jenis 15 jenis 15 Jenis	12 OB 2 OB 25 jenis 15 jenis 15 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3 Jenis 3 jenis 12 Kali	3 Jenis 3 jenis 12 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	129 Ok 129 Ok 42 ok 42 ok 42 Ok 42 Ok 70 OK 70 OK		Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis 3 jenis		Kab. Luwu		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 kegiatan 3 kegiatan 4 jenis 4 jenis 100 Persen 100 Persen		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan jumlah Surat masuk dan keluar yang diregistar Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	36 OB 36 OB 600 Surat 600 Surat 400 Surat 400 Surat		Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon,air dan listrik	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		Kab. Luwu		
								1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik Jumlah jasa operasional perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan 12 Bulan 13 Unit 13 Unit		Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Operasional Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah jasa Operasional Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1989 orang/jam 2376 ob 96 OB 216 OB	1989 orang/jam 2376 ob 96 OB 216 OB	Kab. Luwu		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 tahun 100 persen 3 kegiatan 7 jenis	1 tahun 100 persen 3 kegiatan 7 jenis	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	23 unit	23 unit	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala tersedianya atk kantor	20 unit 30 Unit 10 Jenis 3 unit	20 unit 30 Unit 10 Jenis 3 unit	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharhan	2 jenis 3 unit/set	2 jenis 3 unit/set	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitas dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala	25 jenis 25 jenis	25 jenis 25 jenis	Kab. Luwu		
								1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	35 unit/set	35 unit/set	Kab. Luwu		
	<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki Satlinmas Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	42,00 persen 50,91 persen 100,00 persen 100,00 persen	42,00 persen 50,91 persen 100,00 persen 100,00 persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 persen 95 persen	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Aktivitas	5 Aktivitas	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4 Kasus	4 Kasus	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Sat Linmas yang diberdayakan	117 orang	117 orang	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM SATPOL PP	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.01.09 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disusun	10 SOP	10 SOP	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.01.10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah tempat Pelayanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada yang disediakan	1 tempat	1 tempat	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80 Persen	80 Persen	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan Pengawasan atas Kepatuhan	13 lokasi	13 lokasi	Kab. Luwu		
								1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Aktivitas yang dilakukan dalam rangka penanganan	4 kasus	4 kasus	Kab. Luwu		
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitas dan karirnya	3 OK	3 OK	Kab. Luwu		
	<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya Sosialisasi Kebencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)	240 orang	240 orang	Kab. Luwu	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penanganan Penanggulangan Bencana	10 kegiatan	10 kegiatan	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPB yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	62 orang	62 orang	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan yang disediakan	17 unit	17 unit	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan penguatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	20 desa/ kelurahan	20 desa/ kelurahan	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	1 kejadian	1 kejadian	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen rencana kontijensi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Personil yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	150 orang	150 orang	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang ditetapkan dgn peraturan bupati	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Darurat	2 kegiatan	2 kegiatan	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian bencana yang dilakukan respon cepat darurat bencana	96 kali	96 kali	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani	48 kali	48 kali	Kab. Luwu		
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi terkait	2 kegiatan	2 kegiatan	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	Kab. Luwu		
								1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dalam rangka kerjasama antar lembaga	1 kali	1 kali	Kab. Luwu		
	<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Luwu		
								1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian kebakaran yang dilakukan pemadaman dan pengendalian	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Luwu		
								1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang diadakan	20 Jenis	20 Jenis	Kab. Luwu		
								1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peminaan Aparatur pemadam kebakaran yang disediakan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Luwu		
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	tersedianya Dokumen Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah pembentukan dan pembinaan relawan pemadam	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Luwu				
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	jumlah Operasi Pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan mengancam keselamatan manusia	1 tahun	1 tahun					
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>															
	<b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan Perubahan Renja yang dibuat	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu			
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	8 Jenis	8 Jenis	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	396 OB	396 OB	Kab. Luwu			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							1.06.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu			
			1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu			
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (PDH)	32 stel	32 stel	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	8 Jenis	8 Jenis	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	9 Jenis	9 Jenis	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu			
							1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	3 Kali	3 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	180 Kali	180 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu		
								1.06.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Parkir Kendaraan Bermotor Roda 4 yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Luwu		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan perangkat daerah yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1400 surat	1400 surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan listrik, luran Internet dan luran TV Kabel	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	147 OB	147 OB	Kab. Luwu		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	19 Unit	19 Unit	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil Dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	Kab. Luwu		
								1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	12 Unit	12 Unit	Kab. Luwu		
								1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu		
	<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2 Lembaga	2 Lembaga	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	2 PSKS	2 PSKS	1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK laki-laki yang mendapatkan jasa upah kerja	17 orang	17 orang	Kab. Luwu	
									Jumlah TKSK perempuan yang mendapatkan jasa upah kerja	5 orang	5 orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan LK3	10 Keluarga	10 Keluarga		Kab. Luwu		
								Jumlah Sosialisasi LK3 yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali				
	<b>1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	100 Persen	100 Persen	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah pelayanan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kel asal	5 Orang	5 Orang	1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Yang Dipulangkan ke Daerah Asalnya K	10 Orang	10 Orang	Kab. Luwu	
	<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	80 %	80 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	5 Layanan	5 Layanan	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak telantar yang mendapatkan permakanan	50 Orang	50 Orang	Kab. Luwu	
								1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas telantar dan lansia telantntar yang menerima bantuan alat bantu	3 Orang	3 Orang	Kab. Luwu		
								1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang direunifikasi dengan keluarganya	10 Orang	10 Orang	Kab. Luwu		
								1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS perempuan yang mengikuti bimtek	2 Orang	2 Orang	Kab. Luwu		
									umlah PMKS laki-laki yang mengikuti bimtek	3 orang	3 orang			
								1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	198 Orang	198 Orang	Kab. Luwu		
								1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar dan lansia telantar yang dirujuk	5 Orang	5 Orang			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang PMKS lainnya korban HIV/AIDS dan Napza	1 Layanan	1 Layanan	1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Sosialisasi NAPZA Yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	Kab. Luwu		
	<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar						
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten	2 Layanan	2 Layanan	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan penerima program PBI JK, PKH, KKS, BSP dan Perlindungan sosial lainnya	22 Kecamatan	22 Kecamatan	Kab. Luwu		
								1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial Pangan (Sembako) APBN	21638 KK	21638 KK	Kab. Luwu		
									Jumlah Mahasiswa kurang mampu yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	244 Mahasiswa	244 Mahasiswa			
									Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan program PKH	17111 RT	17111 RT			
								1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
	<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Cakupan penyelenggaraan pelayanan korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan sosial bencana alam dan sosial kab	1 Layanan	1 Layanan	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan Sosial Yang Menerima Bantuan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Menerima Bantuan Makanan	80 Orang	80 Orang	Kab. Luwu	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	100 %										
								1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang						
								1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						
								1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	1 Layanan	1 Layanan	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan jasa upah kerja	30 Orang	30 Orang	Kab. Luwu		
	<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan TMP Nasional Kabupaten	85 %	85 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP Nasional Kabupaten yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Nasional Yang Terlaksana Luas TMP yang dipelihara	2 Hari Nasional 8880 M2	2 Hari Nasional 8880 M2	Kab. Luwu	
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>														
	<b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun forum perangkat daerah	2 dokumen 1 Kegiatan	2 dokumen 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LKjIP)	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Jenis	2 Jenis	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	612 orang/bulan	612 orang/bulan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keuaran Kegiatan	Target Capaian			Keuaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %	2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Kab. Luwu		
								2.07.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Kab. Luwu		
								2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang	2 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	100 %	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan jamuan makan dan minum	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	68 kali	68 kali 12 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pegawai yang disediakan jasa surat menyurat	60 orang/bulan	60 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	312 orang/bulan	312 orang/bulan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	15 unit	15 unit	Kab. Luwu		
									Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 unit	15 unit			
								2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 unit/set	1 unit/set	Kab. Luwu		
								2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	150 M2	150 M2	Kab. Luwu		
	<b>2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 Persen	80 Persen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu	
									2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun dokumen RTK Mikro	3 perusahaan	3 perusahaan		
	<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	60,02 %	60,02 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	50 %	50 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	16 orang	16 orang	Kab. Luwu	
									2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja Kab/Kota yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu	
										Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang diadakan	1 Paket	1 Paket		
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	4 Lembaga	4 Lembaga	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	Kab. Luwu		
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang telah dilakukan pengukuran produktifitas tingkat daerah	15 %	15 %	2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laporan produktivitas tenaga kerja	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
	<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	10 %	10 %	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	2200 orang	2200 orang	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan bersertifikat ISO 9001-2015 disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Luwu		
								2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilayani	2000 orang	2000 orang	Kab. Luwu			
								2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan	50 orang	50 orang	Kab. Luwu			
								2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan	20 orang	20 orang	Kab. Luwu			
					2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
					2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja migran yang diberikan perlindungan	2 orang	2 orang	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat	2 orang	2 orang	Kab. Luwu		
	<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	98 %	98 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	100 perusahaan	100 perusahaan	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	100 %	100 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	4 kali	4 kali	Kab. Luwu		
						Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	4 kali	4 kali	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan rekapitulasi	4 perusahaan	4 perusahaan	Kab. Luwu		
								2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	8654 orang	8654 orang	Kab. Luwu		
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
	<b>2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP dan SAKIP)	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Luwu	
					2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangannya	300 OB	300 OB	Kab. Luwu	
									2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang diberikan Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan	72 OB	72 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							2.08.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Luwu			
			2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi BMD pada SKPD	100 persen	100 persen	2.08.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu			
			2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat Kinerja baik	100 persen	100 persen	2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	5 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
			2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Luwu			
							2.08.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan	19 Jenis	19 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.08.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang disediakan jamuan makannya	10 OB	10 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	40 Kali	50 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	2.08.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	0 unit	Kab. Luwu		
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Aspri dan caraka yang disediakan	36 OB	36 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan Listrik, Internet dan Tv	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	288 OB	240 OB	Kab. Luwu		
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	3 unit	Kab. Luwu		
								2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu		
	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Indeks Pemberdayaan Gender	71,43 Persen	71,43 Persen	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah	80 persen	80 persen	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen yang disediakan	50 dokumen	50 dokumen	Kab. Luwu	
								2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG yang disediakan	60 Dokumen	60 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan Advokasi pelaksanaan PUG	57 OPD	57 OPD	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Kab. Luwu		
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 persen	100 persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam sosialisasi PUG bidang politik, sosial dan ekonomi	50 Orang	50 Orang	Kab. Luwu		
								2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam advokasi PUG bidang politik, hukum dan ekonomi	20 Orang	20 Orang	Kab. Luwu		
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 persen	100 persen	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku dan Korban KDRT yang diadvokasi	20 Orang	20 Orang	Kab. Luwu		
								2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	Kab. Luwu		
								2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu		
	<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio KDRT	40,00 Persen	40,00 Persen	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100 persen	100 persen	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat pertemuan dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Kali	2 Kali	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	50 persen	50 persen	2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan	30 Orang	30 Orang	Kab. Luwu	
	<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	100 Persen	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100 persen	100 persen	2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam pembinaan dan ketahanan kualitas keluarga	30 Orang	30 Orang	Kab. Luwu	
									2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	2 kegiatan	2 kegiatan		
					2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100 persen	100 persen	2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan	15 Keluarga	15 Keluarga	Kab. Luwu	
	<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	100 Persen	100 Persen	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Sistem data Gender dan anak	100 persen	100 persen	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
	<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak	100 Persen	100 Persen	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 persen	100 persen	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang terlibat dalam pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	10 Orang	10 Orang	Kab. Luwu	
	<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Cakupan penyelenggaraan perlindungan khusus anak	100 Persen	100 Persen	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	80 persen	80 persen	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi	3 kali	3 kali	Kab. Luwu	
					2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	25 persen	25 persen	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	Kab. Luwu	
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>														
	<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Luwu		
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	29 orang	29 orang	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	12 OB	96 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	15 Laporan	15 Laporan	Kab. Luwu		
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	2.09.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Luwu		
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	58 stel	58 stel	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	4 orang	4 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	60 Kali	60 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	160 OK	183 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.09.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Kab. Luwu		
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	348 OB	302 OB	Kab. Luwu		
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	45 unit	45 unit	2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	19 Unit	19 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	26 unit	26 unit	Kab. Luwu			
	<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Angka Ketersediaan Energi	3.450 kkal/kapita/hari	3.450 kkal/kapita/hari	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Disediakan dalam 1 Tahun	15 Unit	15 Unit	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang disediakan	3 Kelompok	3 Kelompok	Kab. Luwu		
								2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur							
								2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah RMU yang Disediakan Jumlah Rumah RMU yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Kab. Luwu	
								2.09.02.2.01.05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
	<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Tingkat Komsumsi Protein	66 Gr/ Kapita/ Hari	66 Gr/ Kapita/ Hari	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50 Persen	50 Persen	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Frekuensi Pelaksanaan Pasar Murah Pangan	6 kali	6 kali	6 kali	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Frekuensi pelaksanaan pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Center yang Ditumbuhkembangkan	1 unit	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	26.43 Persen	26.43 Persen	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Disediakan	5200 KG	5200 KG	Kab. Luwu		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan penyelenggaraan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	45.44 Persen	45.44 Persen	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pola konsumsi pangan masyarakat yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari	8 kelompok	8 kelompok	Kab. Luwu		
								2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan penduduk	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
	<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Skor Penanganan Rawan Pangan	8 Skor	8 Skor	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Rawan Pangan yang Ditangani	4 Jenis	4 Jenis	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	4 kali	4 kali	Kab. Luwu	
								2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kerawanan pangan yang ditangani	4 Kejadian	4 Kejadian	Kab. Luwu		
	<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji	60 Persen	60 Persen	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	30 Sampel	30 Sampel	2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Terdaftar	30 Komoditi	30 Komoditi	Kab. Luwu	
								2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan PSAT yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	Kab. Luwu	
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>														
	<b>2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	2.10.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								2.10.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.10.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
					2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	3 Jenis	3 Jenis	2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	216 OB	216 OB	Kab. Luwu	
								2.10.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (Satu) Tahun	144 OB	144 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.10.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
					2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	2.10.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	19 Unit	19 Unit	Kab. Luwu	
								2.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	19 Jenis	19 Jenis	Kab. Luwu		
								2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu		
								2.10.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.10.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.10.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	58 OK	58 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Unit	1 Unit	2.10.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2.10.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.10.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	470 OB	470 OB	Kab. Luwu		
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	2.10.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	13 Unit	13 Unit	Kab. Luwu		
	<b>2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi	100 Persen	100 Persen	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yg Diselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Luwu	
								2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konflik Pertanahan yang dimediasi	5 Kasus	5 Kasus	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
	<b>2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>			2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Tanah null		1 Persil 1 null	Kab. Luwu			
	<b>2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap di distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee	100 Persen 100 Persen	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset Tanah Pemda	5 dokumen 5 dokumen	2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi	10 dokumen 10 dokumen		Kab. Luwu			
	<b>2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 Persen 100 Persen	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	75 Bidang / Persil 75 Bidang / Persil	2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Persil tanah yang dilakukan kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka konsolidasi tanah kabupaten	75 Bidang 200 Bidang		Kab. Luwu			
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>														
	<b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra Renja, RKA dan DPA yang disusun	2 dokumen 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen 1 dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	Kab. Luwu			
								2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun	5 Dokumen	Kab. Luwu			
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23 Dokumen		2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	23 Orang 23 Orang	Kab. Luwu			
								2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang di verifikasi	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	Kab. Luwu			
								2.11.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kab. Luwu			
								2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	Kab. Luwu			
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan		2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kab. Luwu			
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10 orang 10 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis		2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Jenis	Kab. Luwu			
								2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 Jenis	Kab. Luwu			
								2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu				Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 Orang/Kegiatan		Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Luwu		
								2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				Kab. Luwu		
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan		2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200 Surat		Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan biaya tagihan telepon air dan listrik	12 Bulan		Kab. Luwu		
								2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 OB		Kab. Luwu		
								2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	19 OB		Kab. Luwu		
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 Unit		2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	40 kendaraan 40 Unit		Kab. Luwu		
								2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kab. Luwu		
								2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kab. Luwu		
	<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen 1 dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	1 Dokumen	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 Dokumen				
	<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks kualitas air	26.65 Angka	26.65 Angka	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	20 % 20 %	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	1 Laporan				
								2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 dokumen 1 dokumen				
								2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian analisis laboratorium	1 lab 1 lab				
	<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3			2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	1 laporan 1 laporan				
					2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 m3	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						
	<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Izin Lingkungan dan PPLH yang di bina dan di awasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	20 %		2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	2 orang 2 orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen			
	<b>2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>			2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 laporan	1 laporan			
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 MHA	1 MHA			
	<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	1 dokumen	1 dokumen			
								2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 laporan	1 laporan			
	<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase sampah Perkantoran yang telah dilakukan Pengelolaan	90,19 % 90,19 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Dokumen Pelaporan Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Terlaksananya Pengelolaan Sampah	2 laporan 2 laporan	4 Kecamatan	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaporan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu		
								2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah lokasi Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sampah perkotaan	8 LOKUS	8 LOKUS			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan sampah	4 KECAMATAN	4 KECAMATAN	Kab. Luwu		
								2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya saran dan prasarana pengolahan sampah	2 jenis	2 jenis			
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>														
	<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
									2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu		
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	2.12.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Luwu		
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana disiplin yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2.12.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana disiplin yang diadakan	2 jenis	2 jenis	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim II/III	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang	2 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	9 Jenis	9 Jenis	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	6 unit	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	13 jenis	13 jenis	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	27 Jenis	27 Jenis	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	9 Jenis	9 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit/set Mebeleur yang diadakan	1 Set	1 Set	Kab. Luwu		
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500 Surat	500 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	19 OB	19 OB	Kab. Luwu		
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	31 unit/set	31 unit/set	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	27 unit	27 unit	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3 unit/set	3 unit/set	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	14 unit/set	14 unit/set	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	2000 m2	2000 m2	Kab. Luwu		
								2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	25 unit	25 unit	Kab. Luwu		
	<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Rasio Penduduk ber KTP	100 Persen	100 Persen	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk	4 Jenis	4 Jenis	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas pelayanan pendaftaran penduduk	6 OB	6 OB	Kab. Luwu	
								2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	29 unit	29 unit	Kab. Luwu		
								2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	87598 Dokumen	87598 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah petugas pengumpulan dan analisis data pendaftaran penduduk	34 OB	34 OB	Kab. Luwu		
					2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi dalam rangka penerbitan Pelayanan Administrasi Kependudukan	40 Kali	40 Kali	2.12.02.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang di laksanakan	45 kali	45 kali	Kab. Luwu	
								2.12.02.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen			
					2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaporan pendaftaran penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen	2.12.02.2.04.01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan dokumen pendaftaran penduduk	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Luwu	
								2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal pendaftaran penduduk	22 Kecamatan	22 Kecamatan			
	<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Rasio pasangan berakte nikah	0,35 Persen	0,35 Persen	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	7 Jenis	7 Jenis	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil	8 OB	8 OB	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.12.03.2.01.03 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	jumlah dokumen pencatatan sipil 7 dokumen 7 dokumen			Kab. Luwu		
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil 7 Jenis 7 Jenis			2.12.03.2.02.03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang di laksanakan 38 Kali 38 Kali			Semua Kab/Kota		
								2.12.03.2.02.11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil						
	<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	100 Persen 100 Persen	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama antar lembaga pengguna data kependudukan 4 Lembaga 4 Lembaga			2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan data kependudukan 5 Laporan 5 Laporan					
								2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama antar lembaga pengguna data kependudukan 4 Lembaga 4 Lembaga					
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 5 Laporan 5 Laporan			2.12.04.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang di laksanakan 20 kali 20 kali			Semua Kab/Kota		
								2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 5 Laporan 5 Laporan					
								2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan 542 orang 542 orang			Kab. Luwu		
	<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	100 Persen 100 Persen	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen profil kependudukan yang disusun 3 Dokumen 3 Dokumen			2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen			Kab. Luwu		
								2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen profil kependudukan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Luwu		
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>														

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	90 persen	90 persen	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja serta perunahan renstra dan renja yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu	
									2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu	
					2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	100 persen	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	480 0b	480 0b	Kab. Luwu	
									2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
					2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada skpd	100 persen	100 persen	2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Kab. Luwu	
									2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu	
									2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu	
									2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu	
									2.13.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam satu tahun	25 0b	25 0b	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang diselenggarakan/diikuti	122 Ok	122 Ok	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.13.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								2.13.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12 ob	12 ob	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	348 ob	348 ob	Kab. Luwu		
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan	20 unit	20 unit	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	20 Unit	20 Unit	Kab. Luwu		
	<b>2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA</b>			2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa				2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa	50 desa	50 desa	Kab. Luwu		
								2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	dokumen penataan kewenangan desa	80 dokumen	80 dokumen	Kab. Luwu		
	<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	34.480 persen	34.480 persen	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah desa yang di fasilitasi	20 kerjasama	20 kerjasama	2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah desa yang difasilitasi	20 kerjasama	20 kerjasama	Kab. Luwu	
	<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Peningkatan status desa mandiri	0.01 Persen	0.01 Persen	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Satus Desa Mandiri	0.01 persen	0.01 persen	2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 desa	100 desa	Kab. Luwu	
								2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RKPDesa	100 desa	100 desa	Kab. Luwu		
								2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDesa	207 desa	207 desa	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	828 orang	828 orang	Kab. Luwu		
								2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa yang dibina	80 BUMDesa	80 BUMDesa	Kab. Luwu		
								2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi	1 desa	1 desa	Kab. Luwu		
								2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah desa yang difasilitasi	150 desa	150 desa	Kab. Luwu		
	<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Cakupan pemberdayaan lembaga desa dan lembaga adat desa	99.00 persen	99.00 persen	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yang di bina	20 lembaga	20 lembaga	2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yang dibina	20 lembaga	20 lembaga	Kab. Luwu	
								2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Teknologi Tepat Guna Yang Difasilitasi	20 desa	20 desa	Kab. Luwu		
								2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	22 kecamatan	22 kecamatan	Kab. Luwu		
								2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah kegiatan TP PKK yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	Kab. Luwu		
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
	<b>2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang di susun (LKJIP)	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	240 OB	240 OB	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi	15 dokumen	15 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	15 Laporan	15 Laporan	Kab. Luwu		
				2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.14.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan BMD	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	5 Jenis	2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	4 unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang di sediakan	8 jenis	8 jenis	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	4 jenis	4 jenis	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	4 jenis	4 jenis	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang di sediakan	42 jenis	42 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan Makan dan Minum yang di sediakan	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di SKPD	36 OK 36 OK 12 kali	36 OK 36 OK 12 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1000 Surat	1000 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1596 OB	1596 OB	Kab. Luwu		
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis	2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah biaya pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	53 unit	53 unit	Kab. Luwu		
								2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	29 unit	29 unit	Kab. Luwu		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
	<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	80 %	80 %	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Program KKBPK	1 laporan	1 laporan	2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	
									2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Data dan informasi keluarga yang di sediakan	1 Data (RT/KK)	1 Data (RT/KK)		
									2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pencatatan dan pelaporan program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	
	<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Presentase Penggunaan MKJP	80 %	80 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah jenis sarana yang di terima masyarakat	3 jenis	3 jenis	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Poktan Bangga Kencana yang menerima sarana KIE	102 Kelompok	102 Kelompok	Kab. Luwu	
									2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan Bangga Kencana yang dikelola	21 balai	21 balai	Kab. Luwu	
					2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kader IMP	1527 Orang	1527 Orang	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang digerakkan	1527 orang	1527 orang	Kab. Luwu	
					2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang bermitra dengan OPD	25 Faskes	25 Faskes	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi	25 faskes	25 faskes	Kab. Luwu	
									2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor baru dan ulangan pengguna MKJP	960 orang	960 orang	Kab. Luwu	
									2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang diadakan	16 paket/unit	16 paket/unit	Kab. Luwu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta promosi dan konseling kesehatan reproduksi	145 Orang	145 Orang	Semua Kab/Kota			
							2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Peserta KB Pria yang dibina	150 orang	150 orang	Kab. Luwu			
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan kesertaan ber-KB	6 Organisasi	6 Organisasi	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	14 kali	14 kali	Kab. Luwu			
	<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Presentase peran BKB,BKL,BKR yang Aktif	70 % 70 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah jeinis Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	6 Kelompok	6 Kelompok	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Tersedianya Sarana dan Prasarana KB dan SIGA	16 paket	16 paket	Kab. Luwu		
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengikuti Orientasi/Pelatihan	240 orang	240 orang	Kab. Luwu			
							2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menerima biaya operasional	22 kelompok	22 kelompok	Semua Kab/Kota			
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	360 Orang	360 Orang	Semua Kab/Kota			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah jenis Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	6 Kelompok	6 Kelompok	2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi	180 Orang	180 Orang	Semua Kab/Kota		
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>														
	<b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun"	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	50 ob	50 ob	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
								2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	6 laporan	6 laporan	Kab. Luwu		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Luwu		
								2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	20 Unit	Kab. Luwu		
								2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	Kab. Luwu		
								2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	Kab. Luwu		
								2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	16 jenis	16 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	25 OK	25 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	5 Unit/Set	5 Unit/Set	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu		
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	4 Jenis	4 Jenis	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	2000 Surat	2000 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik"	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	20 OB	20 OB	Kab. Luwu			
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	21 unit	21 unit	Kab. Luwu			
							2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala"	9 Unit/set	9 Unit/set	Kab. Luwu			
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan"	19500 m2	19500 m2	Kab. Luwu			
	<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	300 Titik	300 Titik	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Rambu - Rambu Lalu Lintas yang Diadakan, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	300 unit	300 unit	Kab. Luwu	
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	2.15.02.2.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	1 unit	Kab. Luwu			
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1973 Unit	1973 Unit	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	2 unit	2 unit	Kab. Luwu			
							2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	"Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"	2 orang	2 orang	Kab. Luwu			
							2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	1973 unit	1973 unit	Kab. Luwu			
							2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1973 lembar	1973 lembar	Kab. Luwu			
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara	2 unit	2 unit	Kab. Luwu			
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	82 persen	82 persen	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	1 jenis	1 jenis	Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22 titik	22 titik	Kab. Luwu		
	<b>2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan lintas	1 jaringan lintas	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diawasi	10 Pelabuhan	10 Pelabuhan	2.15.03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan	10 pelabuhan	Kab. Luwu	
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														
	<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Luwu		
					2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	35 OB	35 OB	Kab. Luwu	
								2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	11 OB	11 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang/aset yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	83 Stell/Pasang	83 Stell/Pasang	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	2 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	16 Unit/set	16 Unit/set	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makanan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	42 OK	42 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dalam keadaan Baik	100 Persen	100 Persen	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	12 Unit	12 Unit	Kab. Luwu		
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12 OB	12 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	9 OB	9 OB	Kab. Luwu		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 Unit/set	5 Unit/set	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	5 Unit	5 Unit	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	11 m2	11 m2	Kab. Luwu		
								2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Luwu		
	<b>2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	35 Persen	35 Persen	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil layanan komunikasi dan informatika	100 Persen	100 Persen	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Luwu	
								2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Laporan Pelaksanaan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang Dikelola	100 konten	100 konten	Kab. Luwu		
								2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis Informasi Publik yang diberikan pelayanan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu		
								2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang dilayani	40 Media	40 Media	Kab. Luwu		





No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Luwu		
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	30 OB	30 OB	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu		
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 persen	100 persen	2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Stell	30 Stell	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	4 Unit	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	19 Jenis	19 Jenis	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material kebutuhan kantor yang disediakan	61 Jenis	61 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	36 Ok 85 OK	36 Ok 85 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	5 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 Persen	100 Persen	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300 Surat	300 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	312 OB	312 OB	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	8 Unit	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10 Unit	10 Unit	Kab. Luwu		
								2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	50 m2	50 m2	Kab. Luwu		
	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
	<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
								2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	100 persen	100 persen	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	100 persen	100 persen	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti Pelatihan	40 Orang	40 Orang	Kab. Luwu	
	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang telah dilakukan Pemberdayaan dan Perlindungan	100 persen	100 persen	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	100 persen	100 persen	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya K - UMKM EXPO 2022 dalam rangka Peringatan HARKOPNAS ke - 75 dan HARNAS UMKM se Sulawesi Selatan	1 kegiatan		Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	30,75 persen 2,50 %	30,75 persen 2,50 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan untuk Pelaku UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					
								2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro						
								2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						
								2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	30 orang	Kab. Luwu		
	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10 Unit	10 Unit			
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>														
	<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	396 ob	396 ob	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112 ob	112 ob	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	Kab. Luwu		
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	Kab. Luwu		
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Unit	11 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	44 Jenis	44 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	153 orang/kegiatan 100 orang/hari	153 orang/kegiatan 100 orang/hari	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	10 unit	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10 mebel	10 mebel	Kab. Luwu		
								2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	27 Unit	27 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	85 persen	85 persen	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	
									2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen		
					2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100 persen	100 persen	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
	<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100 persen	100 persen	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten	100 %	100 %	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
									2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 kali	1 kali		
	<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Lama Proses Perizinan penanaman modal	1-15 Investor	1-15 Investor	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	1 sistem	1 sistem	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan	2 layanan	2 layanan	Kab. Luwu	
									2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu	
									2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	1 sistem	1 sistem	Kab. Luwu	
									2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 persen	75 persen	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Luwu	
									2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Luwu	
									2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Luwu	
	<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal	100 persen	100 persen	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	100 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>														
	<b>2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Luwu		
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	324 OB	324 OB	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	null	0	null	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	4 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 unit/buah/set	8 unit/buah/set	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	6 Unit	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	11 Unit/Set	11 Unit/Set	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	3 bulan	3 bulan	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan/diikuti	90 Kali	90 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.19.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	null	4 unit	0 null	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	32 Unit	32 Unit	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null	0 null		Kab. Luwu		
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	27 OB	27 OB	Kab. Luwu		
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10 Unit/Set	10 Unit/Set	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	10 Unit	10 Unit	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
							2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit/Set	12 Unit/Set	Kab. Luwu				
							2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	500 m2	500 m2	Kab. Luwu				
	<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	90 Persen	90 Persen	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	71 Orang	71 Orang	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	20 Orang	20 Orang	Kab. Luwu		
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Siswa yang di seleksi dan di latih sebagai Pasukan Pengibar Bendera	71 Orang	71 Orang	Kab. Luwu				
	<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Jumlah cabang olahraga yang di gemari masyarakat Kab Luwu	3 cabang olahraga	3 cabang olahraga	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Disediakan	11 Paket	22 Paket	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	"Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan "	11 Paket	11 Paket	Kab. Luwu		
					2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota yang diselenggarakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Luwu			
					2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	1 Organisasi	1 Organisasi	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi pengembangannya	1 Organisasi	1 Organisasi	Kab. Luwu		
					2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	"Jumlah Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan "	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan, dikembangkan, dan dipelihara	9 Paket	9 Paket	Semua Kab/Kota		
	<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 Persen	100 Persen	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	Kab. Luwu	
								2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas	150 Orang	150 Orang	Kab. Luwu		
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														
	<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	45.00 Persen	45.00 Persen	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik	45 Persen	45 Persen	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Luwu	
								2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	Kab. Luwu		
								2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Metadata Statistik Sektoral yang dibangun	1 Metadata	1 Metadata	Kab. Luwu		
								2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Laporan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah jenis infrastruktur yang dikembangkan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
								2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>														
	<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	1 level	1 level	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten yang ditetapkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Luwu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu				
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu				
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Luwu				
			2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Luwu				
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>															
	<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Prosentase tingkat pengembangan Kebudayaan di daerah	95 Persen	95 Persen	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang dikelola masyarakat dalam daerah Kab/Kota	3 Budaya	3 Budaya	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 objek	2 objek	Kab. Luwu		
								2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	25 orang	25 orang	Kab. Luwu			
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	95 Persen	95 Persen	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 objek	2 objek	Kab. Luwu		
	<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase kesenian tradisional yang telah dikembangkan	85 Persen	85 Persen	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dikelola oleh masyarakat dalam daerah Kab/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang dikelola oleh masyarakat dalam daerah Kab/Kota	3 Jenis	3 Jenis	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	<b>2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan 1 lembaga 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya wadah pembinaan sejarah	1 lembaga	1 lembaga	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang ditingkatkan keberdayaannya	1 lembaga	1 lembaga	Kab. Luwu		
	<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan 1 sejarah 1 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang telah didayagunakan	3 cagar budaya	3 cagar budaya	Kab. Luwu		
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>															
	<b>2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
								2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP) Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
					2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	34 Orang	34 Orang	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	Kab. Luwu		
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	Kab. Luwu		
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 %	100 %	2.23.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34 Orang	34 Orang	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 Orang	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.23.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan minum yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diselenggarakan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diselenggarakan	126 kali	126 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				Kab. Luwu		
								2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kab. Luwu		
								2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Luwu		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	8000 surat	8000 surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	430 OB	430 OB	Kab. Luwu		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	8 unit	8 unit	Kab. Luwu		
								2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	10 Unit	10 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
	<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Tingkat Kegemaran membaca	100 %	100 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten	100 %	100 %	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah aplikasi yang disediakan	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
								2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat Kab/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Kab. Luwu		
								2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Mengikuti Lomba Perpustakaan Tingkat SD, SMP dan Desa/Kelurahan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	Kab. Luwu		
								2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina / perpustakaan yg di bina	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan			
								2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Lomba Pengelola Perpustakaan Berprestasi	50 Orang	50 Orang			
								2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan	100 Layanan	100 Layanan	Kab. Luwu		
								2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	250 judul	250 judul			
								2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikembangkan	150 bahan pustaka	150 bahan pustaka	Kab. Luwu		
								2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten yang disusun	30 KID	30 KID			
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pembudayaan gemar membaca	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah siswa Satuan Pendidikan dan Serta Masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi	100 orang	100 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan	8 orang	8 orang				
								Jumlah peserta yang mengikuti lomba	100 orang	100 orang				
								Jumlah peserta yang mengikuti lomba	150 orang	150 orang				
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah event/media pengembangan literasi	2 kali	2 kali	Kab. Luwu			
							2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
	<b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase Koleksi Nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100 %	100 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kelestarian Naskah Kuno	100 %	100 %	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang melakukan Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 orang	5 orang	Kab. Luwu	
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>														
	<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	100 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	100 Orang	Kab. Luwu	
								2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah rapat koordinasi/pengawasan yang dilakukan	2 kali	2 kali	Kab. Luwu		
									Jumlah Unit Pengolah arsip yang di monitoring	57 OPD	57 OPD			
					2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten	100 %	100 %	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	57 Berkas	57 Berkas	Kab. Luwu	
					2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Media informasi dan akses layanan informasi arsip	1 Layanan	1 Layanan			
								2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit/Lembaga	1 Unit/Lembaga			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	<b>2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>			2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian dan penetapan arsip	35 Berkas	35 Berkas				
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DOKumen pendataan penyusunan daftar dan penilaian dan penyerahan atau pemusnahan arsip	1 Dokumen	1 Dokumen				
								2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen pendataan penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip	1 Dokumen	1 Dokumen				
								2.24.03.2.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Pendampingan penyelemtan arsip bagi pemekaran daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan				
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>															
	<b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu
								3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dekumen RKA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	46 Orang	46 Orang	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	1087 OB	1087 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 persen	100 persen	3.25.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 OK	2 OK	3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	12 Jenis	12 Jenis	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	10 Unit	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.25.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.25.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	300 OK	300 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan atau diikuti	400 OK	400 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air, dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	156 OB	156 OB	Kab. Luwu		
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	41 unit	41 unit	3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan (unit)	17 Unit	17 Unit	Kab. Luwu		
								3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	22 unit/set	22 unit/set	Kab. Luwu		
	<b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18.180,25 Ton	18.180,25 Ton	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Fasilitas umum/fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Perikanan tangkap.	12 Unit	12 Unit	Kab. Luwu		
								3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap	68 Unit	68 Unit	Kab. Luwu		
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana Prasarana dan pengelolaan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.	100 persen	100 persen	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk Pengembangan Nelayan	6 Lokasi	6 Lokasi	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Tersedianya Fasilitas Penerbitan Sertifikat Tanah Nelayan	100 Persil	100 Persil	Kab. Luwu		
								3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	2 Kelompok	2 Kelompok	Kab. Luwu		
				3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	60 OB	60 OB	3.25.03.2.03.01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya Fungsi TPI bagi Nelayan Tangkap	2 TPI	2 TPI	Kab. Luwu		
								3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	4 TPI	4 TPI	Kab. Luwu		
				3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perahu yang terfasilitasi pelayanan tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT	100 Kapal	100 Kapal	3.25.03.2.04.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Teregistrasinya kapal perikanan dalam wilayah Kabupaten Luwu	50 Unit/Kapal	50 Unit/Kapal	Kab. Luwu		
								3.25.03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal sampai 10 GT	50 Unit	50 Unit	Kab. Luwu		
				3.25.03.2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perahu yang terfasilitasi pelayanan tanda daftar kapal perikanan berukuran s.d 10 GT Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	30 Perahu	30 Perahu	3.25.03.2.05.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal sampai dengan ukuran 10 GT	4 Lokasi	4 Lokasi	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
							3.25.03.2.05.02 Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal sampai dengan ukuran 10 GT	150 Dokumen	150 Dokumen	Kab. Luwu				
			3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	20 kapal	20 kapal	3.25.03.2.06.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal sampai dengan ukuran 10 GT	4 Lokasi	4 Lokasi	Kab. Luwu				
							3.25.03.2.06.02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Pelayanan Penerbitan pendaftaran Kapal sampai dengan ukuran 10 GT	150 Dokumen	150 Dokumen	Kab. Luwu				
	<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	661.589,79 ton	661.589,79 ton	3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 rekomendasi	11 rekomendasi	3.25.04.2.01.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil Madya yang ditingkatkan menjadi Utama	100 persen	100 persen	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang terbina	10 Kecamatan	10 Kecamatan	Kab. Luwu				
				Persentase pembudidaya ikan kecil pemula yang ditingkatkan menjadi Madya	100 persen	100 persen	3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	10 Kelompok	10 Kelompok	Kab. Luwu				



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang terbit	100 dokumen	100 dokumen	3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SOP penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar	20 Pokdakan	20 Pokdakan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia bagi kelompok pembudidaya ikan	6 Paket	6 Paket	Kab. Luwu		
								3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI Yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan Jumlah benih yang dihasilkan dalam pembenihan pembudidayaan ikan air tawa Jumlah Pokdakan/BBI yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan	4 BBI 700000 Ekor/Benih 59 Pokdakan	4 BBI 700000 Ekor/Benih 59 Pokdakan	Kab. Luwu		
	<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	154 Ton	154 Ton	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dokumen data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang disediakan Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan	1 dokumen 5 paket	1 dokumen 5 paket	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu	
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan Gemarikan yang dilaksanakan	4 lokasi	4 lokasi	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu		
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>														
	<b>3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
						3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu				
						3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu				
						3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu				
						3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu				
						3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Luwu				
			3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis 8 Jenis	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 OB	2683 OB	Kab. Luwu				
						3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu				
						3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu				
						3.26.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Luwu				
						3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	Kab. Luwu				
			3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis 1 Jenis	3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	53 stell/pasang	53 stell/pasang	Kab. Luwu				
						3.26.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	53 orang	53 orang	Kab. Luwu				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	7 unit	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	336 OK 67 OK	336 OK 67 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit/Set	2 Unit/Set	3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	3 unit	3 unit	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	6 jenis	6 jenis	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	25 OB	25 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	75 OB	75 OB	Kab. Luwu		
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	0 Unit/Set	0 Unit/Set	3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19 unit	19 unit	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	24 unit/set	24 unit/set	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	200 m2	200 m2	Kab. Luwu		
	<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan Secara Terpadu	1 Destinasi	1 Destinasi	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikelola	1 Destinasi	1 Destinasi	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	1 Destinasi	1 Destinasi	Kab. Luwu	
								3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata kabupaten yang dikembangkan	2 destinasi	2 destinasi	Kab. Luwu		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	4 Destinasi	4 Destinasi	3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Luwu		
								3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dilakukan pengadaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan destinasi pariwisata kabupaten yang diadakan	4 destinasi	4 destinasi	Kab. Luwu		
								3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	10 laporan	10 laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	3 kelompok	3 kelompok	Kab. Luwu		
	<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten	13,216 Orang	13,216 Orang	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pameran/Promosi Kepariwisataaan	2 kali	2 kali	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang dilakukan	3 kali	3 kali	Kab. Luwu	
								3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dalam rangka pemasaran destinasi wisata yang diikuti	1 kali	1 kali	Kab. Luwu		
								3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media yang digunakan dalam pengelolaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	1 media	1 media	Kab. Luwu		
								3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah MoU Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	1 MoU	1 MoU	Kab. Luwu		
	<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>				3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah lokasi pengembangan prasarana kota kreatif	1 lokasi	1 lokasi	Kab. Luwu		
	<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	200 orang	200 orang	Kab. Luwu		
								3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah peserta Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	100 orang	100 orang	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	50 orang	50 orang	Kab. Luwu		
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>														
	<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Jenis	4 Jenis	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204 OB	204 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu	100 persen	100 persen	3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 unit	14 unit	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	1 jenis	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	15 jenis	15 jenis	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	7 jenis	7 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	270 kali	270 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 persen	100 persen	Kab. Luwu		
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1700 surat	1700 surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	420 OB	420 OB	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	65 persen	65 persen	3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	109 unit	109 unit	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	100 m2	100 m2	Kab. Luwu		
								3.27.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	21 unit	21 unit	Kab. Luwu		
	<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 persen	3 persen	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	91 persen	91 persen	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya	68 unit	68 unit	Kab. Luwu	
		Persentase peningkatan produksi bibit ternak	10 persen	10 persen										
		Persentase peningkatan produksi peternakan	10 persen	10 persen										
								3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten	24 ha	24 ha	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman						
					Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten	19 ha	19 ha							
								3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	15 ha	15 ha	Kab. Luwu		
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah jenis bibit ternak yang disediakan	2 jenis	2 jenis	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	5010 ekor	5010 ekor	Kab. Luwu		
	<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 persen	3 persen	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pengembangan prasarana pertanian	2 jenis	2 jenis	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Sarana Pendukung pertanian lainnya yang di koordinasikan	2 keg	2 keg	Kab. Luwu	
		Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	3 persen	3 persen										
		Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	3 persen	3 persen										
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3 persen	3 persen										
								3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen Actionplan Kawasan Pertanian yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	31 unit	31 unit	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	16 unit	16 unit	Kab. Luwu		
								3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	3 unit	3 unit	Kab. Luwu		
								3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	13 unit	13 unit	Kab. Luwu		
								3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						
								3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		
								3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	1 unit	1 unit	Kab. Luwu		
								3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan sarana pendukungnya yang di rehab	3 unit	3 unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten Luas Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten Luas pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak	5 hektar	5 hektar	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						
	<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Peningkatan Populasi Ternak Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	3 Persen 10 persen	3 Persen 10 persen	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12 Laporan	12 Laporan	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	12 laporan	12 laporan	Kab. Luwu	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	2 Jenis	2 Jenis	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani	50 pemohon	50 pemohon	Kab. Luwu		
	<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian	227 desa/kel	227 desa/kel	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	22 BPP	22 BPP	Kab. Luwu	
								3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125 klp tani	125 klp tani	Kab. Luwu		
								3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	22 BPP	22 BPP	Kab. Luwu		
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>														

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra & Renja serta perubahan Renstra & Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA_SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA_SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (LAKIP)	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Luwu		
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Disediakan Gaji Dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	396 OB	396 OB	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelolah dan Disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu		
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.30.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 persen	100 persen	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	9 Unit	9 Unit	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 Unit	20 Unit	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/ bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	44 Jenis	44 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Jamuan makan dan minum yang disediakan	44 Jenis	44 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2500 Surat	2500 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.30.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan kantor	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Luwu		
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	0 Unit	0 Unit	Kab. Luwu		
								3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	27 Unit	27 Unit	Kab. Luwu		
	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	5 Pasar	5 Pasar	Kab. Luwu		
								3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	107 Pedagang	107 Pedagang	Kab. Luwu		
								3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan (pedagang) yang diberdayakan	50 Pedagang	50 Pedagang	Kab. Luwu		
	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	12 Kali	12 Kali	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 Bln	12 Bln	Kab. Luwu				
						3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 Bln	12 Bln	Kab. Luwu				
			3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 Kali	12 Kali	Kab. Luwu				
						3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	10 Kali	10 Kali	Kab. Luwu				
						3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Lokasi pasar murah	1 OK	1 OK	Kab. Luwu				
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaksanaan pengawasan	1 OK	1 OK	Kab. Luwu				
						3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan	3 Kali	3 Kali	Kab. Luwu				
						3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan	3 Kali	3 Kali	Kab. Luwu				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
	<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	pameran produk dan potensi daerah di luar prov. Sul. Sel	3 kali	3 kali	Kab. Luwu			
							3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	pameran produk dan potensi daerah dalam provinsi	2 kali	2 kali	Kab. Luwu			
	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Tera/Tera Ulang	12 Kali	12 Kali	Kab. Luwu			
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan	12 Kali	12 Kali	Kab. Luwu			
							3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52 Kali	52 Kali	Kab. Luwu			
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>														
	<b>3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu	
									3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu	
									3.31.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	38 Jenis	38 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	3 OP 20 OK	3 OP 20 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75 Persen	75 Persen	3.31.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								3.31.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 persen	100 persen	3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	132 OB	132 OB	Kab. Luwu		
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.31.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas/jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	215 M2	215 M2	Kab. Luwu		
	<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Tingkat penerapan rencana pembangunan industri	100 Angka	100 Angka	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pameran yang dilakukan Melibatkan Pelaku Industri	2 Pameran	3 Pameran	Semua Kab/Kota	
								3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta Pelatihan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	30 Orang	30 Orang			
								3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						
	<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota						



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
									3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					
<b>3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>														
	<b>3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Luas cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yang disediakan	10000 Ha	10000 Ha	3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Cakupan penyelenggaraan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	1 Kawasan	3.32.02.2.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah laporan verifikasi lahan transmigrasi	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	
	<b>3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman					
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>														
	<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun (LAKIP)	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada ASN	100 %	100 %	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 laporan	3 laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah yang disusun	100 %	100 %	4.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	90 orang/stel	90 orang/stel	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	4 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	100 orang	100 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 unit	12 unit	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	24 jenis	24 jenis	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 OK	42 OK	Semua Kab. Luwu		
								4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75 %	75 %	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 %	100 %	4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeleurn yang diadakan	5 Set	5 Set	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	21 Buah/Set	21 Buah/Set	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surt Masuk dan Keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 OB	21 OB	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	24 OB	24 OB	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5 unit	5 unit	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	486 unit	486 unit	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas Bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3000 Meter	3000 Meter	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100 %	100 %	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	57 Set	57 Set	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedia Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan	1 tahun	1 tahun	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Penunjang Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	100 %	100 %	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik dan tata laksana	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Evaluasi Pengendalian kualitas pelayanan Publik dan tata laksana yang dimonitoring	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	24 kegiatan	24 kegiatan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dialog/audiensi/koordinasi pimpinan yang difasilitasi	12 kali	12 kali	Kab. Luwu		
								4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan yang ddokumentasikan	36 kali	36 kali	Kab. Luwu		
	<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD	2885 Nilai	2885 Nilai	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi tata Pemerintahan	100 % 100 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
					4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 % 100 %	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan dalam rangka fasilitasi pengelolaan bina mental spritual	11 Kegiatan	11 Kegiatan	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
					4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	100 % 100 %	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi	315 Produk hukum	315 Produk hukum	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum	20 Kali	20 Kali	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	sistem informasi hukum yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	Kab. Luwu		
					4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 % 100 %	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah kerja sama dalam negeri yang difasilitasi	2 MoU	2 MoU	Kab. Luwu		
								4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kerja sama	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Luwu		
	<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	80 Jumlah	80 Jumlah	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 % 100 %	4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pelaksanaan pengendalian dan distribusi perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.03.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	100 %	100 %	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Penyelenggaraan Pengadaan barang dan Jasa	100 %	100 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan penyelenggaraan pemantauan kebijakan terkait Sumber daya Alam	100 %	100 %	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Luwu		
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>														
	<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Luwu		
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	4.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	43 Stell/Pasang	43 Stell/Pasang	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen data dan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Luwu		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	25 Orang	25 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pemenuhan administrasi perkatoran perangkat daerah	8 Laporan	8 Laporan	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	47 Jenis	47 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah jumlah perjalanan dinas luar daerah	32 Kali 6 Kali	32 Kali 6 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen pengadaan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Luwu			
							4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu			
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	8000 Surat	8000 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	528 Orang/Bulan	528 Orang/Bulan	Kab. Luwu		
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipenuhi jasa pemeliharannya	5 Jenis	5 Jenis	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	32 Unit	32 Unit	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	177 Unit/Set	177 Unit/Set	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15000 M2	15000 M2	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	7 Unit/Set	7 Unit/Set	Kab. Luwu		
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terpenuhi layanan keuangan dan kesejahteraannya	35 Orang	35 Orang	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dokumen Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	182 Stell/Pasang	182 Stell/Pasang	Kab. Luwu		
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Dokumen layanan administrasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi	10 Fraksi	10 Fraksi	Kab. Luwu		
								4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan/kali pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	36 Bulan	36 Bulan	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
	<b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan daerah dan peraturan DPRD yang di sahkan	4 Peraturan	4 Peraturan	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah yang disusun dan dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan Peraturan daerah yang dibahas	4 Ranperda	4 Ranperda	Kab. Luwu			
								4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Luwu			
								4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	4 Naskah	4 Naskah	Kab. Luwu			
					4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS	8 Kali	8 Kali	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	8 Kali	8 Kali	Kab. Luwu			
								4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD	8 Kali	8 Kali	Kab. Luwu			
								4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan	8 Kali	8 Kali				
								4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6 Kali	6 Kali	Kab. Luwu			
					4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Penggunaan Anggaran	90 Kali	90 Kali	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat dalam rangka Laporan Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6 Kali	6 Kali	Kab. Luwu			
					4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pendalaman materi peraturan perundang-undangan yang diikuti dalam rangka peningkatan kasitas Anggota DPRD	8 Peraturan	8 Peraturan	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD/kali mengikuti bimbingan teknis	141 Orang/Kali	141 Orang/Kali	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan dan didokumentasikan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pakar dan tim ahli yang disediakan	4 Orang	4 Orang	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang/bulan penyediaan tenaga ahli fraksi	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pertemuan dengan masyarakat	4 Kali	4 Kali			
								4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Kali	12 Kali	Kab. Luwu		
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah rekomendasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja	420 Orang/Kali	420 Orang/Kali	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan Reses	105 Orang/Kali	105 Orang/Kali	Kab. Luwu		
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi	35 Kegiatan	35 Kegiatan	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	Kab. Luwu		
								4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
<b>5.01 PERENCANAAN</b>														
	<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	876 OB	876 OB	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	4 laporan	4 laporan	Kab. Luwu		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket		Kab. Luwu		
								5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 Orang	2 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	17 unit	17 unit	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar daerah	167 OK	167 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 aplikasi	1 aplikasi	Kab. Luwu		
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	20 Unit	20 Unit	5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		Kab. Luwu		
								5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 unit	7 unit	Kab. Luwu		
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12 OB	12 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	324 OB	324 OB	Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 Unit/Set 10 Unit/Set	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10 unit 10 unit		Kab. Luwu			
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	35 unit/set 35 unit/set		Kab. Luwu			
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	348.62 m2 348.62 m2		Kab. Luwu			
							5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit 25 unit		Kab. Luwu			
	<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen 100 Persen	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah	7 tahapan 7 tahapan	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 kegiatan 2 kegiatan		Kab. Luwu			
							5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditelaah dan diintegrasikan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokemen 4 dokemen					
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	1 kegiatan 1 kegiatan		Kab. Luwu			
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	35 skpd 35 skpd		Kab. Luwu			
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan 1 kegiatan		Kab. Luwu			
							5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan musrenbang	22 Kecamatan 22 Kecamatan					
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan	2 dokumen 2 dokumen		Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah	3 dokumen	3 dokumen	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kali	2 kali	Kab. Luwu		
								5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	57 skpd	57 skpd	Kab. Luwu		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah	1 dokumen	1 dokumen	5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	kerjasama daerah yang dilaksanakan	1 kerjasama		Kab. Luwu		
								5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Luwu		
	<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen	80 Persen	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	Kab. Luwu	
								5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14 perangkat daerah	14 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang diasistinsi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14 perangkat daerah	14 perangkat daerah			
								5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	Kab. Luwu		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah			
								5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang diasistinsi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan sinergitas dan hasmoniasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dilaksanakan	6 laporan	6 laporan	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah Bidang SDA yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah Bidang SDA yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	Kab. Luwu		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota		
								5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah Bidang Infrastruktur yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah			
								5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah Bidang Kewilayahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	Kab. Luwu		
								5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
<b>5.02 KEUANGAN</b>														
	<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	95 Persen	95 Persen						
								5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
									Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	52 Dokumen 1 Dokumen	52 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	Kab. Luwu		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	8 Jenis 100 Persen	8 Jenis 100 Persen	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 OB 53 ASN	2683 OB 53 ASN	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang ditatausahakan dan diverifikasi Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	2500 Dokumen 12 Bulan	2500 Dokumen 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan pelaksanaan akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	14 Laporan 1 Laporan	14 Laporan 1 Laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Luwu		
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Kab. Luwu		
					Persentase Penatausahaan BMD SKPD yang Tertib	90 Persen	90 Persen	5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dilakukan pengamanan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan pelaksanaan koordinasi dan penilaian BMD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD ang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan pemanfaatan barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	5.02.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan/jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 kali/jenis	1 kali/jenis	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang dilakukan pendataan dan pendaftaran	1 Objek Retribusi	1 Objek Retribusi	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dokumen pengelolaan data retribusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen Wajib Retribusi Daerah Yang Ditetapkan	13 Objek	13 Objek	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun 7 Jenis 7 Jenis Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik 91 Persen 91 Persen			5.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin yang di adakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDL, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	312 Stell 49 Buah	312 Stell	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai perangkat daerah yang dilakukan pendataan dan pengolahan administrasi	156 Pegawai	156 Pegawai	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi pemulangannya ke tempat asal	1 Pegawai	1 Pegawai	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang gugur dalam melaksanakan tugas yang difasilitasi pemulangannya	1 Pegawai	1 Pegawai	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.08 Pindahan Tugas ASN	Dokumen pindahan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang 2 ASN	1 Orang 2 ASN	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	5 Orang	5 Orang		Kab. Luwu			
						5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10 ASN 100 Orang	10 ASN 100 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Umum	10 Jenis 100 Persen	10 Jenis 100 Persen	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	15 Jenis 8 Jenis	15 Jenis 8 Jenis	Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit		Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis		Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan 12 Jenis	12 Bulan 12 Jenis		Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis 3 Jenis	2 Jenis 3 Jenis		Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan 45 Jenis	12 Bulan 45 Jenis		Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 OB 33 Jenis	12 OB 33 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			
						5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi Jumlah tamu yang difasilitasi	30 Kali 30 Orang	30 Kali 30 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Luwu			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	162 OK 162 OK 60 Kali 60 Kali		Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100 % 100 %		Kab. Luwu		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Unit 1 Unit 92 Persen 92 Persen		5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 Unit 1 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	15 Unit 15 Unit 1 Unit 1 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang daiadakan	2 Unit 2 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah maubeleur yang diadakan	5 Unit 5 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan meisn lainnya yang disediakan Jumlah perlengkapan kantor yang di adakan	17 Jenis 17 Jenis 10 Unit 10 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang daiadakan	1 Unit 1 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang daiadakan	5 Jenis 5 Jenis		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung atau Bangunan lainya yang di adakan	3 Unit 3 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang Diadakan	15 Unit 15 Unit		Kab. Luwu		
								5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagungan lainya yang di adakan	5 Unit 5 Unit		Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Jenis 100 Persen	4 Jenis 100 Persen	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan Jumlah surat-surat yang terdistribusi	12 OB 1250 surat	12 OB 1250 surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran Jumlah jenis jasa yang disediakan	12 bulan 3 Jenis	12 bulan 3 Jenis	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 OB	21 OB	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah luas gedung yang dibersihkan	324 OB 450 M2	324 OB 450 M2	Kab. Luwu		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	10 Unit/Set 92 Persen	10 Unit/Set 92 Persen	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan Yang Dilakukan Pemeliharaan rutin/ Berkala	29 Unit	29 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan pemeliharaan/rehab dan terbayar pajaknya	20 Unit 25 Unit	20 Unit 25 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah angkutan darat tak bermotor yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 unit/set	1 unit/set	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	35 Unit 0 unit/set	35 Unit 0 unit/set	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	0 Jenis	0 Jenis	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	450 M2	450 M2 702 M2	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kab. Luwu		
	<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Penyerapan APBD	97 Persen	97 Persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase SKPD yang Menyusun RKA Sesuai Ketentuan dan Kebutuhan	99 Persen	99 Persen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu	
								5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahn KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyusunan RKA	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyusunan RKA Perubahan	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan DPA	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan Perubahan DPA	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen ASB yang disusun	50 ASN	50 ASN	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	14 PD	14 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran belanja	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.01.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	114 Peserta		Kab. Luwu		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	95 Persen	95 Persen	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi pengelolaan kas	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	1150 Dokumen	1150 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah bidang yang melaksanakan koordinasi dana perimbangan dan dana transfer	15 Bidang	15 Bidang	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran laporan aliran kas yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	98 %	98 %	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Perbup tentang pertanggungjawaban APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Tertuntut yang melaksanakan koordinasi penyelesaian perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	50 Tertuntut	50 Tertuntut	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang disusun Jumlah Dokumen Sistem Akuntansi Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 50% perempuan dan 50% laki-laki	114 Peserta	114 Peserta	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengelolaan keuangan BLUD yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Dana Alokasi Desa	207 Desa	207 Desa	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah peristiwa darurat bencana yang tertangani	10 Peristiwa	10 Peristiwa	Kab. Luwu		
								5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terselenggaranya bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa	207 Desa	207 Desa	Kab. Luwu		
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang mengimplementasikan Sistem Informasi secara tertib	96 Persen	96 Persen	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi keuangan daerah	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
	<b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	98 Persen	98 Persen	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	94 Persen	94 Persen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu	
								5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan penatausahaan barang milik daerah	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan inventarisasi barang milik daerah	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	60 Unit	60 Unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	60 Unit	60 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan	360 Unit	360 Unit	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi BMD dan Update SIMDA Barang	57 PD	57 PD	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
								5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi pengelolaan BMD	114 Peserta	114 Peserta	Kab. Luwu		
	<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap target yang ditetapkan	86,9 persen	86,9 persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu	
		Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	86.98 Persen	86.98 Persen		terwujudnya Realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %		Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang di tetapkan	100 %	100 %		
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Di Tetapkan	100 %	100 %		Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %		Persentase Realisasi Penerimaan dana Perimbangan Terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %		
										Persentase Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %		
								5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu		
										Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang di tetapkan	100 %	100 %		
										Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Terhadap Target yang ditetapkan	100 %	100 %		
								5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Ketecapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu		
										Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang di tetapkan	100 %	100 %		
										Persentase Realisasi penerimaan dana perimbangan terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %		
										Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %		
								5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	175.18 Wajib Pajak	175.18 Wajib Pajak	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah				
							5.02.04.2.01.05 Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	7 Jenis Pajak	7 Jenis Pajak		Kab. Luwu				
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah yang dipelihara dan dimutakhirkan	2 Basis Data	2 Basis Data		Kab. Luwu				
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Telaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	175.18 Wajib Pajak	175.18 Wajib Pajak		Kab. Luwu				
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan terhadap target yang ditetapkan Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Luwu			
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	175180 Wajib Pajak	175180 Wajib Pajak		Kab. Luwu				
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan terhadap target yang ditetapkan Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %	100 %	100 %	Kab. Luwu			
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang ditetapkan Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pajak Daerah Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu		
								5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu		
								5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu		
<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>														
	<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen renstra ,renja,RKA, dan DPA serta renja perubahan,RKA,dan DPA yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu	85 %	85 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah PNS dan PPPK yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	258 orang	258 orang	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan penatausahaan keuangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang di susun	6 dokumen	6 dokumen	Kab. Luwu		
				5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah bulan penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	6 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	85 %	85 %	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik	10 jenis	10 jenis	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor yang diadakan	6 unit	6 unit	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan material yang disediakan	25 jenis	25 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah jenis fasilitas kunjungan tamu	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan biasa dan dalam kota	200 kali	200 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah	2 unit	2 unit	5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah lemari arsip yang diadakan	1 stell	1 stell	Kab. Luwu		
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85 %	85 %	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang di pelihara	60 unit	60 unit	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	25 unit	25 unit	Kab. Luwu		
								5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	30 unit	30 unit	Kab. Luwu		
	<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	100 Persen	100 Persen	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	100 %	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	jumlah dokumen penyusunan kebutuhan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Luwu	
		persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai Formasi	100 %	100 %				5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	jumlah CPNS dan PPPK yang diterima	150 orang	150 orang	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah ASN yang di selesaikan pemberhentiannya	80 orang	80 orang	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah ASN yang difasilitasi	50 orang	50 orang	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah sistem informasi yang di kelola	1 sistem informasi	1 sistem informasi	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data ASN yang di kelola	6113 data	6113 data	Kab. Luwu		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	persentase mutasi ASN	100 persen	100 persen	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah mutasi dalam satu tahun	100 Dokumen	100 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah dokumen kenaikan pangkat	120 Dokumen	120 Dokumen	Kab. Luwu		
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	85 %	85 %	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah dokumen penilaian kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	jumlah ASN yang mengikuti assesment	22 Orang	22 Orang	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	jumlah PNS yang mengikuti diklat dan sertifikasi	11 orang	11 orang	Semua Kab/Kota		
								5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah dokumen kebutuhan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	jumlah koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan	3 kali	3 kali	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN						
								5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen pembinaan karir	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	85 %	85 %	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
								5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	jumlah PNS yang diberikan penghargaan	20 orang	20 orang	Kab. Luwu		
								5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	jumlah PNS yang di berikan tanda jasa	60 orang	60 orang	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	jumlah ASN yang fasilitasi	20 orang	20 orang	Kab. Luwu		
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>														
	<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis				5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	120 orang	50 orang	Kab. Luwu		
								5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah asn mengikuti diskusi	120 orang	120 orang	Kab. Luwu		
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %	100 %	5.04.02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah asn yang mengikuti sertifikasi	120 orang	120 orang	Kab. Luwu		
								5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	225 orang	225 orang	Kab. Luwu		
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>														
	<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Jumlah Rekomendasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Penelitian	3 Penelitian	5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi	1 Penelitian	1 Penelitian		
								5.05.02.2.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	1 Penelitian	1 Penelitian			
								5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	12 bulan	12 bulan			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.05.02.2.01.13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi			
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Litbang di Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Penelitian	5 Penelitian	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Inovasi	9 Inovasi	9 Inovasi			
								5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Inovasi yang diuji coba atau diterapkan	9 Inovasi	9 Inovasi			
								5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan Yang Didesiminasi	3 Inovasi	3 Inovasi			
								5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil- Hasil Kelitbangan yang di Sosialisasikan	3 Penelitian	3 Penelitian			
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>														
	<b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP) dan evaluasi RENJA Triwulan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Luwu		
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	44 Orang	44 Orang	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Luwu		
				6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Luwu		
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	43 Orang	43 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 jenis	9 jenis	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 unit	41 unit	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	9 j	9 j	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	500 exemplar	500 exemplar	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	35 jenis	35 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan/diikuti	43 ok	43 ok	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Persen	100 Persen	Kab. Luwu		
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	75 unit/buah/set	75 unit/buah/set	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	31 OB	31 OB	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	47 Unit	47 Unit	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	53 unit/buah/set	53 unit/buah/set	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Luwu		
								6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	300 M2	300 M2	Kab. Luwu		
	<b>6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase tindak lanjut temuan BPK	85 Persen	85 Persen	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase tindak lanjut temuan BPK	85 Persen	85 Persen	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	36 Laporan	36 Laporan	Kab. Luwu	
								6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 Laporan	25 Laporan	Kab. Luwu		
								6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	8 Laporan	8 Laporan	Kab. Luwu		
								6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Luwu		
								6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan desa	54 Laporan	54 Laporan	Kab. Luwu		
								6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Luwu		
								6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	20 Temuan	20 Temuan	Kab. Luwu		
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase tindak lanjut temuan BPK	85 Persen	85 Persen	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian daerah	20 Orang	20 Orang	Kab. Luwu		
								6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan	30 Laporan	Kab. Luwu		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Luwu	
					6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Luwu	
									6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	
									6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	35 PD	35 PD	Kab. Luwu	
									6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asisten dan verifikasi penegakan integritas	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	
	<b>7.01 KECAMATAN</b>													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Perubahan Renstra	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan Secara Tepat Waktu	11 Dokumen	11 Dokumen		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Dokumen Renstra dan Renja yang di Susun	4 Dokumen	4 Dokumen		
		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 persen	100.00 persen		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen		jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja	2 dokumen	2 dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen		Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	10 dokumen		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	28 Dokumen	28 Dokumen		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %		Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen		jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yg di susun	2 Dokumen	2 Dokumen		
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen		null		100 persen		
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %		
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen		
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen		Presentase pemenuhan administrasi perkant ran	20 Jenis	20 Jenis		







No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				
									Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				
									Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				
									Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
									Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				
									Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
									Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
									Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen				
									Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				
									Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
									Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen				
									Jumlah Dokumen Perubahan DPA-RKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				
									Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen				
									Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	10 Dokumen	10 Dokumen		Kab. Luwu
									7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		Kab. Luwu
										Jumlah Belanja Makan dan Minum Rapat	1 Tahun	1 Tahun		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	5 dokumen		
										jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang di susun	10 eksamplar	10 eksamplar		
										Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		
										Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen		





No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen							
					Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persenn	100 persenn							
					Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %							
									7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	156 OB	156 OB	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	48 bulan	48 bulan			
									jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	84 OB	84 OB			
									jumlah ASN yang yang di sedikan tunjangan verivikasi	48 Bulan	48 Bulan			
									Jumlah Bulan Penyediaan Honor Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan			
									jumlah dokumen yang diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen			
									jumlah dokumen yang diverifikasi	4 dokumen	4 dokumen			
									jumlah dokumen yang diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen			
									jumlah dokumen yang diverifikasi	12 bulan	12 bulan			
									jumlah dokumen yang diverifikasi	24 laporan	24 laporan			
									Jumlah dokumen yang diverifikasi	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Dokumen yang diverifikasi	24 Dokumen	24 Dokumen			
									Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen			
									Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Orang Bulan	48 Orang Bulan			
									Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	60 Ob	60 Ob			
									Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun			



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen		Kab. Luwu
									7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Luwu
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	4 Laporan	4 Laporan		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	5 Jenis	5 Jenis		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	8 Laporan	8 Laporan		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	24 Laporan	24 Laporan		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	8 Laporan	8 Laporan		
										jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester yang disusun	30 eksamplar	30 eksamplar		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		Kab. Luwu	
									Jumlah ASN yang di berikan Honorarium	12 Bulan	12 Bulan			
									Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah ASN yang disediakan Honorariumnya	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah	12 OB	12 OB			
									Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %			
									Jumlah bulan dalam penatusahaan Barng Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah bulan dalam penatusahaan Barng Milik Daerah pada SKPD	12 orang / bulan	12 orang / bulan			
									Jumlah bulan penyedia honorarium penatusahaan barang milik daerah	1 tahun	1 tahun			
									jumlah laporan barang/aset yang disusun	1 Laporan	1 Laporan			
									Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			
									Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
									laporan hasil pelaksanaan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			
									laporan hasil pelaksanaan Penatusahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan			
									laporan hasil pelaksanaan Penatusahaan Barang Milik Daerah	12 OB	12 OB			
									Laporan hasil pelaksanaan Penatusahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan			
									Laporan Hasil Pelaksanaan Penatusahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
									Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 OB	12 OB			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah ASN yang di Fasilitas dalam peningkatan kapasitas	16 unit	16 unit	Kab. Luwu		
					Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Jenis	2 Jenis		Meninkatya di siplin Pegawai	1 set	1 set			
					Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis		Presentase ASN dengan tingkat kehadiran tepat waktu	100 persen	100 persen			
					Jumlah jenis penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	2 Jenis	2 Jenis		Presentase ASN dengan tingkat kehadiran tepat waktu	100 Persen	100 Persen			
					Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diSediakan	25 pasang/Stel	25 pasang/Stel							
					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	23 )rang	23 )rang							
					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	37 Stel	37 Stel							
					persentase pelaksanaan bimtek	1 kali	1 kali							
					Persentase Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	100 Persen	100 Persen							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas batik yang diadakan	27 stell/pasang	17 buah		Kab. Luwu	
									Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	37 Steel	37 Steel			
									Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	15 Ok	15 Ok			
									Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	22 stell/pasang	22 stell/pasang			
									Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	25 Pasang/Stell	25 Pasang/Stell			
									jumlah pakaian dinas dan atributnya yang di adakann	23 Pasang	23 Pasang			
									jumlah pakaian Dinas dan perlengkapannya yang disediakan	16 stel	16 stel			
									Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	28 orang	28 orang			
									Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	19 stell/orang	19 stell/orang			
									Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	27 stell/pasang	27 stell/pasang			



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang				
								Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	1 Tahun				
								7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Tekhnis	1 Orang	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	1 orang	1 orang				
								Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 OK	2 OK				
								Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	2 orang				
								Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Luwu	
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum perangkat daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	4 jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	6 jenis	6 jenis			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 Buah	3 Buah		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	85 persen	85 persen			Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	56 Jenis	56 Jenis		
					Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	6 jenis		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kab. Luwu		
									Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	5 Unit	5 Unit			
									jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	3 unit			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	2 unit			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	3 unit			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	6 Unit			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	10 Unit			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	15 Unit			
									Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			
									Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			
									Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	3 Unit	3 Unit			
									Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Luwu		
									Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis			
									Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis			
									Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	10 unit			
									Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis			
									Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
								7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor Yang di adakan	7 jenis	7 jenis	Kab. Luwu		
									Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang diadakan	7 jenis	7 jenis			
									Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang digunakan	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis			
									Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis			
									Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis			
									Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis			
									Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	100 persen	100 persen			
									Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis			
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	25 Jenis			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Kab. Luwu	
									Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	1 Tahun	1 Tahun				
									Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	2 Jenis	2 Jenis				
									Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis				
									Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis				
									Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis				
									Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis				
									Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan		5 Jenis				
									Jumlah jenis barang cetak penggandaan yang di adakan	3 Jenis	3 Jenis				
									Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang di adakan	12 eksamplar	12 eksamplar	Kab. Luwu		
									Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan			
									Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan			
									Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 eksamplar	12 eksamplar			
									jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis			
									Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis			
									Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis			
									Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis			
									Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis			
									Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 jenis	5 jenis			
									Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis			
									Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perundangan yang diadakan	1 jenis	1 jenis			
									jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis			
									Jumlah Jenis Barang Cetak Dan Penggandaan Yang disediakan		1 Jenis			





No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan makanan dan minum yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum	1 Jenis	1 Jenis			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 jenis	2 jenis			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	100 kotak	100 kotak			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	120 Kotak	120 Kotak			
									Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang di sediakan	1 jenis	1 jenis			
									Jumlah Jenis makan dan Minum yang diadakan	3 jenis	3 jenis			
									Jumlah Jenis Makan dan Minum Yang Disediakan	3 kegiatan	3 kegiatan			
									Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	120 Kotak	120 Kotak			
									jumlah tamu yang difasilitasi makan Minum Tamu	12 bulan	12 bulan			
										200 kotak	200 kotak			
									7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam	36 OK	36 OK	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			Kab	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Luwu	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			Lokasi Sub Kegiatan	
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								daerah						
								Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70 OK	70 OK				
								jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan dan jumla j perjalanan luar daerah	11 Kali	11 Kali				
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 OH	12 OH				
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 oh	60 oh				
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah	70 oh	70 oh				
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 OH	12 OH				
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah	62 kali	62 kali				
								Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	120 Kali	120 Kali				
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	1 tahun				
								Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun				
								Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	46 OH	46 OH				
								Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Perjalanan Dinas Luar		2 Jenis				
								Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah	20 OK	20 OK				
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 Kali	4 Kali				
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	22 OK	22 OK				
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 kegiatan	30 kegiatan				
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 OK	30 OK				
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	120 OK	120 OK				
								Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 OK	5 OK				
								Jumlah perjalanan dinas luar dan	1 Tahun	1 Tahun				



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit		Kab. Luwu		
								Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 unit	1 unit				
								Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di adakan	7 Jenis	7 Jenis				
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 unit	3 unit		Kab. Luwu		
								Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	2 Unit	2 Unit				
								null		0 null				
							7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		Kab. Luwu		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau bangunan lainnya	8 jenis	8 jenis				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 persen	100 persen	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
					Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa	100 persen	100 persen		Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	24 OB	24 OB			
					cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %		Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	36 OB	36 OB			
					Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa	100 %	100 %		Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	100 Persen	100 Persen			
					Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	800 surat	800 surat			
					Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis		jumlah surat keluar dan surat masuk yang diregistrasi	250 surat	250 surat			
					Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	4 Surat	4 Surat			
					Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	12 Bulan	12 Bulan			
					Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	7 jenis	7 jenis		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200 surat	200 surat			
					Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300 surat	300 surat			
					Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	3 Jenis	3 Jenis		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300 Surat	300 Surat			
					Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	9 Jenis	9 Jenis		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 surat	400 surat			
					Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	100 Persen	100 Persen		Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat			
					Persentase pemenuhan kebutuhan	100 persen	100 persen		Jumlah Surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500 Surat	500 Surat			
									Jumlah Surat Masuk dan Keluar di Registrasi	2 OB	2 OB			
									Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang diregistrasi		250 surat			
									Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	750 Surat	750 Surat			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulanan penyediaan biaya tagihan telpon ,air dan listrik	12 bulan	12 bulan		Kab. Luwu		
								Jumlah Bulan Pembiayaan Biaya Tagihan Listrik dan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan				
								Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Air Dan Listrik		12 Bulan				
								Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan				
								Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				
								Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan				
								Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon,air dan listrik	12 bulan	12 bulan				
								Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				
								Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				
								Jumlah bulan penyediaan tagihan telepon,listrik dan air	12 bulan	12 bulan				
								Jumlah Bulan Penyediaan Tagihan Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan				
								Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan				
								Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	36 Bulan	36 Bulan				
								Penyediaan Biaya Tagihan Telepon/Internet, Air dan Air	12 Bulan	12 Bulan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan		Kab. Luwu		
								Jumlah peralatan kantor yang disediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan	2 unit	2 unit				
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		Kab. Luwu		
								Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Kantor Yang Disediakan		12 Bulan				
								Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	108 bulan	108 bulan				
								Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	15 OB	15 OB				
								jumlah jasa pelayanan umum kantor	14 ob	14 ob				
								jumlah jasa pelayanan umum kantor	846 OB	846 OB				
								Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 OB	12 OB				
								Jumlah jasa pelayanan umum kantor	14 OB	14 OB				
								Jumlah jasa pelayanan umum kantor	18 OB	18 OB				
								Jumlah jasa pelayanan umum kantor	84 OB	84 OB				
								Jumlah jasa pelayanan umum kantor	120 OB	120 OB				
								Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	11 OB	11 OB				
								Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 OB	10 OB				
								Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 OB	48 OB				
								Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	168 OB	168 OB				
								Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan				
								Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 OB	10 OB				
								Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan				
								Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	84 bulan	84 bulan				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	204 OB	204 OB		
										Jumlah Peralatan kerja yang disediakan jasa pemeliharaan/perbaikan	10 unit/Paket	10 unit/Paket		
										Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12 OB	12 OB		
										Penyediaan Jasa Upah Kerja	174 OB	174 OB		



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 unit	2 unit	Kab. Luwu		
					cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 unit	4 unit			
					Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6 Unit	6 Unit			
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	1 Unit			
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 unit	3 unit							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 unit	4 unit							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	7 unit	7 unit							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	9 Jenis	9 Jenis							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 Unit/Set	10 Unit/Set							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 Unit	12 Unit							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %							
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Pesen	100 Pesen							
					Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	4 jenis	4 jenis							
					Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	3 Kegiatan	3 Kegiatan							
					Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan	9 Jenis	9 Jenis							
					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	100 persen	100 persen							
					Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen							
								7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasioanl yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6 unit	6 unit	Kab. Luwu		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa	3 Kegiatan	3 Kegiatan			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah
								<p>pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan</p> <p>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan 4 unit 4 unit</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Disediakan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan 3 Unit 3 Unit</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala 2 Unit 2 Unit</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 1 Tahun 1 Tahun</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 4 Jenis 4 Jenis</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 4 unit 4 unit</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 5 unit 5 unit</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 8 unit 8 unit</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 2 unit 2 unit</p> <p>jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 8 unit 8 unit</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Sediakan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan 4 Unit</p> <p>Jumlah kenderaan pajak perizinan kenderaan dinas yang di pelihara 5 unit 5 unit</p> <p>Jumlah pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas 1 Tahun 1 Tahun</p> <p>Jumlah Penyediaan dana Jasa Sopir yang disediakan 12 OB 12 OB</p> <p>Jumlah Penyediaan dana Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 Bulan 12 Bulan</p>						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dilakukan pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Luwu	
										Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 Jenis		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	6 Unit	6 Unit		
										Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit	2 Unit		
										Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	3 unit		
										Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	4 unit	4 unit		
										Jumlah Peralatan mesinya Lainnya Yang di pelihara	2 Unit	2 Unit		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	1 unit		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	7 Jenis		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis	11 jenis		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit	15 unit		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana gedung kantor yang di pelihara Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan Luas bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket  184 m2 1 unit 1806 M2 4500 meter persegi 216 m2 81 M2 2500 m2	1 Paket  184 m2 1 unit 1806 M2 4500 meter persegi 216 m2 81 M2 2500 m2	Kab. Luwu		
								7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dana pemeliharaan/rehab gedung kantor dan penataan halaman kantor jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	4 kegiatan 2 unit	4 kegiatan 2 unit	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di lakukan Pemeliharaan Jumlah perlengkapan dan perlenkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Gedung Lainnya Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit 1 jenis 1 Unit 5 unit 2 Unit	1 Unit 1 jenis 1 Unit 5 unit 2 Unit	Kab. Luwu		
	<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	akupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Cakupan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 % 100.00 Persen	100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 % 100.00 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi dengan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah Kegiatan Dan Koordinasi Pemerintahan di tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan ditingkat Kecamatan Jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen 100 % 100 % 100 persen 100 Persen 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Unit Kerja	100 persen 100 % 100 % 100 persen 100 Persen 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Unit Kerja	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan yang dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Kordinasi/Sinergi Perencanaan jumlah pelaksana kooedinasi/sinergi perencanaan Pelaksanaan Koordinasi/sinergi perencanaan umlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 kegiatan 1 kali 1 Kali 1 kegiatan 2 Kegiatan 12 Desa 1 Kegiatan 1 Kali 1 kali 1 kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kali	1 kegiatan 1 kali 1 Kali 1 kegiatan 2 Kegiatan 12 Desa 1 Kegiatan 1 Kali 1 kali 1 kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kali	Kab. Luwu	





No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Desa diwilayah kecamatan yang dilakukan kegiatan peningkatan epektifitas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan			Kab. Luwu	
										Jumlah Jenis Pelaksanaan Pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif 1 Jenis 1 Jenis				
										Jumlah pelayanan yang telah terlaksana dengan efektif 1 Kegiatan 1 Kegiatan				
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi	1 kali	1 kali	Kab. Luwu	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Luwu	





No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			Kab	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
								7.01.03.2.01.03.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
								Jumlah Desa Di Wilayah Kecamatan yang Di Lakukan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun				
								Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan				
								Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	9 Desa	9 Desa				
								Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	6 desa	6 desa				
								Jumlah desa yang dilakukan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8 Desa	8 Desa				
								Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan				
								jumlah Peningkatan Efektifitas kegiatan PPK kecamatan	13 Kel/Desa	13 Kel/Desa				
								Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 Kali	6 Kali				
								Jumlah pertemuan dalam rangka	18 kali	18 kali				

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah
								peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah pertemuan Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan				
								Jumlah Pertemuan dalam rangka peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	16 kali	16 kali				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
					jumlah kelurahan yang di fasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 tahun	1 tahun		Jumlah kegiatan yang terlaksana	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan		jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam forum musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan			
					Jumlah Kelurahan Yang difasilitasi dalam pelaksanaan Forum musyawarah di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan		Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
					Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan	1 kelurahan	1 kelurahan		Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
					Persentase Kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan	1 Kelurahan	1 Kelurahan		Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
					Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %		Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum Musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan			
					Sarana dan prasarana kelurahan	100 persen	100 persen		Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
									Jumlah Kelurahan yang Di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah Di Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah Kelurahan Yang Difasilitasi Dalam Pelaksanaan ForumMusyawarah Di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
									Jumlah kelurahan yang dipasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan			
									Presentase kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	6 paket	6 paket	Kab. Luwu		
									jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	4 unit	4 unit			
									jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun	5 unit	5 unit			
									Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	32 paket	32 paket			
									Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yangdibangun	3 unit/jenis	3 unit/jenis			
									Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	3 Paket	3 Paket			
									Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	5 uni	5 uni			
									Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	7 unit/jenis	7 unit/jenis			
									Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang dibangun	3 unit	3 unit			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Unit/Jenis	1 Unit/Jenis			
									Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	9 Unit	9 Unit			
									JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN YANG DI BANGUN	6 Unit	6 Unit			
									jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibanun	1 unit/jenis	1 unit/jenis			
									Jumlah Sarana dan Prasarana yang Di adakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
									Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	2 Unit	2 Unit			
									terlaksananya sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	100 persen	100 persen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<p>Jumlah kegiatan yang dilakukan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat 180 OB 180 OB</p> <p>Jumlah Kegiatan yang dilakukan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 1 Tahun 1 Tahun</p> <p>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan 1 Kelurahan 1 Kelurahan</p> <p>Jumlah kelurahan yang di fasilitasi untuk meningkatkan pemberdayaan di kelurahan 264 OB 264 OB</p> <p>Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat 3 Kegiatan 3 Kegiatan</p> <p>persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan 100 persen 100 persen</p>	Semua Kab/Kota Kab. Luwu				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Luwu	
		Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen		Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	1 Tahun						
		Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen		Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8 orang	8 orang						
						Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat yang diberi Insentif	100 Orang	100 Orang						
						Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	972 Orang	972 Orang						
						Jumlah Tokoh agama dan Tokoh masyarakat yang diberikan insentif	216 orang	216 orang						
						Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang diberikan Insentif	1656 OB	1656 OB						
						Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen						
						Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1296 OB	1296 OB						
						persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1296 OB	1296 OB						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Belanja Jasa Imam dan Bilal	1296 OB	1296 OB		Kab. Luwu	
									Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2592 OB	2592 OB			
									jumlah bulan penyediaan jasa tokoh agama dan tokoh masyarakat	156 orang/bulan	156 orang/bulan			
									Jumlah pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh Masyarakat	133 OB	133 OB			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	108 OB	108 OB			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	123 ob	123 ob			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	972 OB	972 OB			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1296 ob	1296 ob			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1680 OB	1680 OB			
									Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang diberikan Insentif	1656 OB	1656 OB			
									Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	96 OB	96 OB			
									jumlah tokoh agam dan tokoh masyarakat yaang diberikan insentif	90 orang	90 orang			



No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada 1 kali 1 kali Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada 100 % 100 %			7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri 1 Laporan 1 Laporan Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri 36 OB 36 OB			Kab. Luwu		
				7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 100 Persen Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 100 persen 100 persen Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 1 kali 1 kali			7.01.04.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka sinergitas dengan kepolisian 1 kali 1 kali					
								7.01.04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif 252 OB 252 OB Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif 1608 Orang 1608 Orang Bulan Bulan			Kab. Luwu		
	<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan 100 Persen 100 Persen cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan 100 Persen 100 Persen Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan 100 Persen 100 Persen Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan 100.00 Persen 100.00 Persen		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Kegiatan 2 Kegiatan Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Kali 1 Kali Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Daerah yang diselenggarakan 1 Kali 1 Kali Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah 100 % 100 % Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen			7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	"Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI" 1 kegiatan 1 kegiatan Jumlah Kegiatan dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1045, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI 1 kegiatan 1 kegiatan			Kab. Luwu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Kab. Luwu		
							Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali			
							Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
							Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali			
							Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali			
							Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
							Jumlah Pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen 100.00 Persen	100 Persen 100.00 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Desa yang di Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 Desa 9 Desa 9 Desa/Kel 8 desa 6 desa 14 Desa 1 Tahun 7 Desa 100 Persen	10 Desa 9 Desa 9 Desa/Kel 8 desa 6 desa 14 Desa 1 Tahun 7 Desa 100 Persen	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 desa 5 desa 7 Desa 11 Desa	12 desa 5 desa 7 Desa 11 Desa	Kab. Luwu	
									7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 desa 6 desa	6 desa 6 desa	Kab. Luwu	
									7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa Jumlah Desa/Kel yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kel dan Pendayagunaan Aset Desa/Kel Jumlah Desa yang di fasilitasi Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 Desa/Keurahan 9 DesaKel 9 Desa 8 Desa	15 Desa/Keurahan 9 DesaKel 9 Desa 8 Desa	Kab. Luwu	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah desa yang difasilitasi dalam pendayagunaan aset desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
										Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 desa	6 desa		
										Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Desa	8 Desa		
										Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa		9 Desa		
										Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	8 Desa	8 Desa		
										Persentase Desa yang dilakukan Pendayagunaan Aset Desa	1 Tahun	1 Tahun		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<p>Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam 9 DesaKel 9 DesaKel Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Kel dan Perangkat Desa/Kel</p> <p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 desa 6 desa</p> <p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Desa 10 Desa</p> <p>Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Prangkat Desa 8 Desa 8 Desa</p> <p>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Desa 8 Desa</p> <p>jumlah kegiatan yang yang dilakukan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa 1 tahun 1 tahun</p>	Kab. Luwu				
								7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
								7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						
								7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
								7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
								7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						
								7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
								7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 180 laporan 180 laporan	Kab. Luwu				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah	Sebelum
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>														
	<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu	
								8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu		
					8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	23 OB	23 OB	Kab. Luwu	
								8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	14 OB	14 OB	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	5 laporan	5 laporan	Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 jenis	1 jenis	8.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu		
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 jenis	1 jenis	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	55 pasang	55 pasang	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendataan dan Pengolahan Administrasi	25 orang	25 orang	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	2 orang	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	4 unit	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	57 unit/set	57 unit/set	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	1 jenis	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	48 kali	48 kali	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		
								8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	189 OK	189 OK	Semua Kab/Kota Kab. Luwu		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang disediakan	1 unit		Kab. Luwu		
								8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit		Kab. Luwu		
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 OB	26 OB	Kab. Luwu		
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 unit	12 unit	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	3 unit	3 unit	Kab. Luwu		
								8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	9 unit	9 unit	Kab. Luwu		
	<b>8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 laporan	2 laporan	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Luwu	
								8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1 kali	1 kali	Kab. Luwu		
								8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
	<b>8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	100 %	100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan kegiatan bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik	3 laporan	3 laporan	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Hibah Bantuan Keuangan Parpol yang terealisasi Jumlah Partai Politik yang diverifikasi	100 % 12 parpol	100 % 12 parpol	Kab. Luwu	
								8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Koordinasi pemantauan situasi politik	1 kali	1 kali	Kab. Luwu		
								8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Monitoring Perkembangan Politik Daerah	2 kali	2 kali	Kab. Luwu		
	<b>8.01.04 PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100 %	100 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Validasi Data Ormas	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas	1 kali	1 kali	Kab. Luwu			
							8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Monitoring keberadaan dan aktivitas ormas di kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Luwu			
	<b>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	85 % 85 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	2 laporan 2 laporan	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	1 kali	1 kali	Kab. Luwu			
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1 kali	1 kali	Semua Kab/Kota			
							8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan monitoring Bidang Ketahanan Ekonomi	2 laporan	2 laporan	Kab. Luwu			
	<b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	100 Persen 100 Persen	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	7 laporan 7 laporan	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Kab. Luwu	1 kali	1 kali	Kab. Luwu			
		Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu	100 % 100 %					Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini	1 kali	1 kali				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1 kali	1 kali			
								8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring keberadaan orang asing di daerah	1 laporan	1 laporan	Kab. Luwu		
								8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kab. Luwu	4 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Luwu		

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **4.1. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Plafon anggaran sementara perubahan merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Belanja daerah pada anggaran perubahan tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 1.548.201.055.11,- Alokasi tersebut akan diarahkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Keempat item belanja tersebut pada dasarnya terbagi masing-masing kedalam setiap urusan kewenangan pemerintah yakni urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, Urusan unsur pendukung pemerintahan, Urusan unsur penunjang urusan pemerintahan, Urusan unsur pengawasan dan Urusan unsur kewilayaan.

Alokasi rencana belanja pada APBD perubahan tahun anggaran 2022 secara umum dapat dilihat sebagai berikut: (1) Belanja Operasi pada perubahan anggaran dianggarkan sebesar Rp. 988.140.129.927,- cenderung meningkat 6,39% atau sebesar Rp. 59.357.600.902,- kenaikan belanja operasi disebabkan meningkatnya Belanja barang dan jasa sebesar 47,56% dibandingkan pada penetapan anggaran pokok tahun 2022 sebelumnya; (2) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 313.036.955.798,- cenderung meningkat 52,14% atau sebesar Rp. 107.282.407.166,- hal ini disebabkan adanya peningkatan tiga item belanja modal yakni belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya; (3) Belanja tidak terduga pada perubahan anggaran tahun 2022 dianggarkan Rp. 4.468.800.250,- meningkat 11,72% dibandingkan anggaran pokok tahun 2022; (4) Belanja Transfer dianggarkan sebesar

Rp.242.555.169.138,- meningkat 0,28% dibandingkan anggaran pokok tahun 2022; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 2.181.000.000,- berkurang 27,30% dibanding anggaran pokok tahun 2022. Untuk lebih jelasnya mengenai plafon anggaran sementara masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>385.532.182.057</b>	<b>381.882.682.265</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>385.532.182.057</b>	<b>381.882.682.265</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>385.532.182.057</b>	<b>381.882.682.265</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>290.163.606.826</b>	<b>285.308.941.786</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.288.500</b>	<b>26.692.599</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.272.300	7.021.400	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.565.600	6.565.600	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.450.600	13.105.599	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>288.046.868.421</b>	<b>283.925.737.707</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	287.826.171.121	283.643.832.707	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	204.840.000	276.140.000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.765.000	5.765.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.300</b>	<b>139.775.500</b>	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.700	40.000.900	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.999.600	99.774.600	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>435.439.005</b>	<b>362.766.980</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.782.375	20.185.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.097.750	4.219.500	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.927.400	5.927.400	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.964.430	4.964.430	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000	36.000.000	
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	46.220.650	46.220.650	
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	41.415.000	58.400.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.196.000	186.850.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>722.200.000</b>	<b>661.800.000</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.600.000	112.200.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.600.000	549.600.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.254.600</b>	<b>192.169.000</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.158.600	30.073.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.096.000	158.096.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>95.214.697.832</b>	<b>96.467.588.090</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>55.564.323.978</b>	<b>56.776.911.260</b>	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	410.605.040	416.866.300	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.652.871.971	1.748.101.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.466.651.833	1.411.570.600	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.372.375.554	2.468.099.478	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.018.702.833	2.945.506.100	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	334.405.232	323.804.099	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	250.788.505	243.422.900	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	169.962.669	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	4.519.274.500	1.195.090.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	909.300.000	894.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	36.357.750.000	36.357.750.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	4.632.440.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.241.200	20.063.400	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	30.474.410	16.919.440	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	55.631.300	20.685.400	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.292.700	201.258.800	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	25.552.500	17.152.500	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.406.400	14.037.750	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	3.679.580.824	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>30.705.038.962</b>	<b>30.734.843.265</b>	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	257.258.534	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	2.865.690.948	1.548.628.643	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.206.310.395	751.607.629	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.377.407.680	3.257.369.055	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	41.623.883	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	537.423.168	524.297.175	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.108.041.661	782.732.775	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	0	614.250.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	927.500.000	820.400.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20.463.480.000	20.463.480.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	1.304.879.980	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.125.460	25.289.450	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	27.082.400	22.082.400	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.885.800	20.746.580	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26.030.850	14.813.890	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	0	285.383.271	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>6.826.758.295</b>	<b>6.863.328.665</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	303.408.000	326.491.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.009.614.495	1.073.366.495	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.956.000.000	4.956.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	475.000.000	344.385.670	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	50.855.000	150.005.100	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	31.880.800	13.080.400	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2.118.576.597</b>	<b>2.092.504.900</b>	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	445.925.697	432.257.500	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.000.000	33.121.500	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.472.600.000	1.472.600.000	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	0	120.175.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	20.295.600	20.295.600	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	59.755.300	14.055.300	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>74.357.430</b>	<b>52.428.630</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>74.357.430</b>	<b>52.428.630</b>	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	74.357.430	52.428.630	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>79.519.969</b>	<b>53.723.759</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>79.519.969</b>	<b>53.723.759</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.415.390	26.619.180	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27.104.579	27.104.579	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>224.311.207.391</b>	<b>277.456.984.272</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>RSUD BATARA GURU</b>	<b>20.829.245.299</b>	<b>22.399.950.338</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>RSUD BATARA GURU</b>	<b>20.829.245.299</b>	<b>22.399.950.338</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.829.245.299</b>	<b>22.399.950.338</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.829.245.299</b>	<b>22.399.950.338</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.829.245.299	22.399.950.338	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>203.481.962.092</b>	<b>255.057.033.934</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>RSUD BATARA GURU</b>	<b>51.574.807.753</b>	<b>101.554.399.187</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.299.673.332</b>	<b>1.299.673.332</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.299.673.332</b>	<b>1.299.673.332</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.299.673.332	1.299.673.332	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>50.275.134.421</b>	<b>100.254.725.855</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>149.999.981</b>	<b>149.999.981</b>	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	149.999.981	149.999.981	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.125.134.440</b>	<b>100.104.725.874</b>	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	50.000.000.000	99.919.591.574	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	125.134.440	185.134.300	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>113.303.840.481</b>	<b>113.063.545.486</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>59.763.972.959</b>	<b>61.376.989.115</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>241.136.065</b>	<b>269.254.865</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.830.085	117.948.885	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.887.480	13.887.480	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.727.700	6.727.700	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.709.600	10.709.600	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.665.100	6.665.100	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.316.100	113.316.100	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>58.182.140.129</b>	<b>59.337.471.122</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.736.173.929	58.825.099.922	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	399.720.000	427.320.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.846.600	5.846.600	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	2.000.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38.399.600	77.204.600	
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.200.000	19.200.000	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>28.489.900</b>	<b>28.489.900</b>	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.489.900	28.489.900	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>360.756.250</b>	<b>667.805.750</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.918.000	1.918.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.800.000	127.818.300	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000	6.429.900	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.772.250	17.772.250	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	12.495.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.566.000	481.372.300	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	32.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>585.000.615</b>	<b>575.580.000</b>	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.800.000	16.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.200.615	171.180.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.000.000	387.600.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>335.250.000</b>	<b>447.187.478</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.150.000	264.100.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.100.000	183.087.478	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>52.602.532.102</b>	<b>50.765.555.934</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.111.443.271</b>	<b>17.497.107.870</b>	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	445.900.000	814.889.727	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	230.983.689	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	854.999.171	834.795.032	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.539.795.000	1.544.795.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.944.808.000	6.831.780.500	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.646.296.100	3.646.296.100	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.589.436.000	3.593.567.822	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.427.425.292</b>	<b>33.204.784.714</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.865.200	89.338.600	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	416.828.000	416.828.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	43.500.000	72.746.900	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.687.900	33.538.800	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.500.000	24.500.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	55.766.500	35.150.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	34.000.000	34.000.130	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	285.933.600	285.933.588	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	754.999.000	734.757.108	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.000.000	32.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	135.000.000	192.469.050	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	30.000.000	33.399.190	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.000.000	49.340.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000	50.000.800	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	40.000.000	36.866.850	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	613.005.092	615.450.200	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.440.200.000	25.628.882.500	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	357.000.000	503.704.085	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.315.000.000	3.632.738.913	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	703.140.000	703.140.000	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>23.663.539</b>	<b>23.663.350</b>	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	23.663.539	23.663.350	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.000.000	40.000.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>108.667.720</b>	<b>113.667.720</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>89.588.200</b>	<b>94.588.200</b>	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	89.588.200	94.588.200	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.079.520</b>	<b>19.079.520</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.079.520	19.079.520	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>310.246.000</b>	<b>346.633.117</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>75.000.000</b>	<b>83.447.117</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75.000.000	83.447.117	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>235.246.000</b>	<b>263.186.000</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235.246.000	263.186.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>518.421.700</b>	<b>460.699.600</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>397.630.700</b>	<b>324.274.800</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	397.630.700	324.274.800	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>120.791.000</b>	<b>136.424.800</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	120.791.000	136.424.800	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0001</b>	<b>PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN</b>	<b>1.644.813.051</b>	<b>1.728.318.800</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.644.813.051</b>	<b>1.728.318.800</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.644.813.051</b>	<b>1.728.318.800</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	829.763.051	912.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	815.050.000	816.318.800	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0002</b>	<b>PUSKESMAS LAROMPONG</b>	<b>1.818.415.395</b>	<b>1.865.505.650</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.818.415.395</b>	<b>1.865.505.650</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.818.415.395</b>	<b>1.865.505.650</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	966.395.395	1.012.277.150	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	852.020.000	853.228.500	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0003</b>	<b>PUSKESMAS SULI</b>	<b>1.529.186.968</b>	<b>1.624.150.863</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.529.186.968</b>	<b>1.624.150.863</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.529.186.968</b>	<b>1.624.150.863</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	695.113.188	790.077.083	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	834.073.780	834.073.780	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0004</b>	<b>PUSKESMAS SULI BARAT</b>	<b>1.931.997.450</b>	<b>1.926.227.830</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.931.997.450</b>	<b>1.926.227.830</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.931.997.450</b>	<b>1.926.227.830</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.116.000.000	1.116.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	815.997.450	810.227.830	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0005</b>	<b>PUSKESMAS BELOPA</b>	<b>1.353.382.869</b>	<b>1.369.771.739</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.353.382.869</b>	<b>1.369.771.739</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.353.382.869</b>	<b>1.369.771.739</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	548.292.869	548.292.869	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	805.090.000	821.478.870	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.0.00.0.00.02.0006</b>	<b>PUSKESMAS BELOPA UTARA</b>	<b>1.157.667.394</b>	<b>1.219.647.330</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.157.667.394</b>	<b>1.219.647.330</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.157.667.394</b>	<b>1.219.647.330</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	456.667.394	558.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	701.000.000	661.647.330	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0007</b>	<b>PUSKESMAS BAJO</b>	<b>1.675.322.719</b>	<b>1.857.059.682</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.675.322.719</b>	<b>1.857.059.682</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.675.322.719</b>	<b>1.857.059.682</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	834.932.719	1.009.549.182	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	840.390.000	847.510.500	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0008</b>	<b>PUSKESMAS BAJO BARAT</b>	<b>1.737.394.500</b>	<b>1.801.086.428</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.737.394.500</b>	<b>1.801.086.428</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.737.394.500</b>	<b>1.801.086.428</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	899.507.500	968.645.198	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	837.887.000	832.441.230	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0009</b>	<b>PUSKESMAS KAMANRE</b>	<b>1.220.569.162</b>	<b>1.270.079.614</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.220.569.162</b>	<b>1.270.079.614</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.220.569.162</b>	<b>1.270.079.614</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	415.569.162	497.605.514	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	805.000.000	772.474.100	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0010</b>	<b>PUSKESMAS LATIMOJONG</b>	<b>1.842.443.434</b>	<b>1.884.176.863</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.842.443.434</b>	<b>1.884.176.863</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.842.443.434</b>	<b>1.884.176.863</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	632.011.434	632.011.434	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.210.432.000	1.252.165.429	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0011</b>	<b>PUSKESMAS PONRANG SELATAN</b>	<b>1.874.685.591</b>	<b>2.184.158.171</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.874.685.591</b>	<b>2.184.158.171</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.874.685.591</b>	<b>2.184.158.171</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.054.235.591	1.340.905.171	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	820.450.000	843.253.000	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0012</b>	<b>PUSKESMAS PONRANG</b>	<b>2.173.239.466</b>	<b>2.179.688.466</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.173.239.466</b>	<b>2.179.688.466</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.173.239.466</b>	<b>2.179.688.466</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.359.099.466	1.359.099.466	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	814.140.000	820.589.000	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0013</b>	<b>PUSKESMAS NOLING</b>	<b>2.355.412.806</b>	<b>2.368.632.760</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.355.412.806</b>	<b>2.368.632.760</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.355.412.806</b>	<b>2.368.632.760</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.508.612.506	1.508.612.505	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	846.800.300	860.020.255	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0014</b>	<b>PUSKESMAS BUA</b>	<b>2.482.649.736</b>	<b>2.733.087.549</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.482.649.736</b>	<b>2.733.087.549</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.482.649.736</b>	<b>2.733.087.549</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.555.849.416	1.820.699.226	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	926.800.320	912.388.323	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0015</b>	<b>PUSKESMAS BASTEM</b>	<b>1.899.692.180</b>	<b>1.941.129.495</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.899.692.180</b>	<b>1.941.129.495</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.899.692.180</b>	<b>1.941.129.495</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	779.192.180	839.999.995	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.120.500.000	1.101.129.500	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0016</b>	<b>PUSKESMAS BASTEM UTARA</b>	<b>2.046.636.717</b>	<b>2.035.457.183</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.046.636.717</b>	<b>2.035.457.183</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.046.636.717</b>	<b>2.035.457.183</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	938.636.717	938.636.717	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.108.000.000	1.096.820.466	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0017</b>	<b>PUSKESMAS WALENRANG</b>	<b>1.531.389.000</b>	<b>1.692.472.101</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.531.389.000</b>	<b>1.692.472.101</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.531.389.000</b>	<b>1.692.472.101</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	726.958.000	880.670.125	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	804.431.000	811.801.976	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0018</b>	<b>PUSKESMAS WALENRANG TIMUR</b>	<b>1.799.003.835</b>	<b>1.788.093.835</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.799.003.835</b>	<b>1.788.093.835</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.799.003.835</b>	<b>1.788.093.835</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	999.003.835	999.003.835	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	800.000.000	789.090.000	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0019</b>	<b>PUSKESMAS WALENRANG UTARA</b>	<b>1.508.218.788</b>	<b>1.615.379.263</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.508.218.788</b>	<b>1.615.379.263</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.508.218.788</b>	<b>1.615.379.263</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	680.355.288	770.355.288	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	827.863.500	845.023.975	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.0.00.0.00.02.0020</b>	<b>PUSKESMAS WALENRANG BARAT</b>	<b>2.108.945.098</b>	<b>2.054.258.450</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.108.945.098</b>	<b>2.054.258.450</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.108.945.098</b>	<b>2.054.258.450</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.018.144.448	1.018.144.448	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.090.800.650	1.036.114.002	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0021</b>	<b>PUSKESMAS LAMASI</b>	<b>1.606.632.409</b>	<b>1.909.369.600</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.606.632.409</b>	<b>1.909.369.600</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.606.632.409</b>	<b>1.909.369.600</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	789.581.409	1.093.867.250	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	817.051.000	815.502.350	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0022</b>	<b>PUSKESMAS LAMASI TIMUR</b>	<b>1.305.615.290</b>	<b>1.391.337.589</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.305.615.290</b>	<b>1.391.337.589</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.305.615.290</b>	<b>1.391.337.589</b>	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	479.765.290	611.969.689	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	825.850.000	779.367.900	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>159.750.930.046</b>	<b>252.938.981.758</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>159.750.930.046</b>	<b>252.938.981.758</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>159.702.330.436</b>	<b>252.934.387.808</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.498.090.795</b>	<b>11.665.983.266</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.179.730</b>	<b>50.179.730</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.425.130	39.425.130	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.754.600	10.754.600	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.744.158.316</b>	<b>8.705.918.774</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.404.966.916	8.350.527.374	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	329.520.000	345.720.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.671.400	9.671.400	
<b>1.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.881.380</b>	<b>9.881.380</b>	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.881.380	9.881.380	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>175.311.000</b>	<b>165.341.000</b>	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.511.000	64.661.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.800.000	100.680.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>833.791.410</b>	<b>966.184.151</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.306.000	10.306.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.846.450	222.397.900	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.130.700	31.130.700	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.515.800	21.515.800	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82.750.000	82.800.000	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	52.304.860	59.552.360	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.333.500	5.042.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.604.100	533.439.391	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.044.600.000</b>	<b>1.132.903.806</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.000.000	25.200.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000	263.803.806	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.800.000	843.900.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>640.168.959</b>	<b>635.574.425</b>	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.912.580	205.012.580	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	414.113.500	414.113.500	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	12.945.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.142.879	3.503.345	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>11.498.292.333</b>	<b>14.445.422.677</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.245.974.334</b>	<b>3.566.510.066</b>	
1.03.02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1.125.973.199	1.384.101.291	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.120.001.135	2.182.408.775	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.252.317.999</b>	<b>10.878.912.611</b>	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	80.000.000	79.500.000	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	99.989.805	99.989.805	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6.717.830.537	6.905.593.596	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.349.979.607	2.826.337.560	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	917.668.050	880.641.650	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	86.850.000	86.850.000	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>10.162.630.000</b>	<b>10.207.630.000</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.162.630.000</b>	<b>10.207.630.000</b>	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.511.530.000	3.511.530.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.334.731.875	5.379.731.875	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.316.368.125	1.316.368.125	
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>648.000.000</b>	<b>648.000.000</b>	
<b>1.03.04.2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>648.000.000</b>	<b>648.000.000</b>	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	648.000.000	648.000.000	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>4.647.115.052</b>	<b>5.563.120.140</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.647.115.052</b>	<b>5.563.120.140</b>	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.647.115.052	5.563.120.140	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>11.381.645.625</b>	<b>11.977.546.844</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>11.381.645.625</b>	<b>11.977.546.844</b>	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.099.648.686	3.369.733.751	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.281.996.939	8.607.813.093	
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>826.750.817</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>826.750.817</b>	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000	826.750.817	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>108.937.010.831</b>	<b>196.933.303.264</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>108.937.010.831</b>	<b>196.933.303.264</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0	750.000.000	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	0	1.075.000.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.000.000.000	3.100.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	20.749.791.831	49.549.533.998	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	4.239.993.653	45.682.700.900	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	50.647.964.127	50.628.118.814	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	722.099.062	721.797.091	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	23.122.000.000	23.122.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	833.666.231	4.078.498.023	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	7.621.495.927	18.225.654.438	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	100.000.000	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>629.545.800</b>	<b>566.630.800</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>599.250.000</b>	<b>536.335.000</b>	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	599.250.000	536.335.000	
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.295.800</b>	<b>30.295.800</b>	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	30.295.800	30.295.800	
<b>1.03.0.00.0.00.01.1301</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH I</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.797.950</b>	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.797.950</b>	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.797.950</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.199.870	1.797.950	
<b>1.03.0.00.0.00.01.1302</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH II</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.460.400</b>	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.460.400</b>	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.460.400</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.199.870	1.460.400	
<b>1.03.0.00.0.00.01.1303</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH III</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.335.600</b>	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.335.600</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.199.870</b>	<b>1.335.600</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.199.870	1.335.600	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>19.356.270.787</b>	<b>27.588.668.520</b>	
<b>1.04.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>19.356.270.787</b>	<b>27.588.668.520</b>	
<b>1.04.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>19.356.270.787</b>	<b>27.588.668.520</b>	
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.054.203.290</b>	<b>4.299.116.938</b>	
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.872.555.469</b>	<b>2.769.650.117</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.627.075.409	2.454.170.057	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.480.000	304.480.000	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.990	4.999.990	
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.999.920	2.999.920	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.150	3.000.150	
<b>1.04.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>24.137.800</b>	<b>24.137.800</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.137.800	24.137.800	
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>49.000.220</b>	<b>102.600.220</b>	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	78.600.000	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.220	24.000.220	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>492.947.801</b>	<b>749.166.801</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.002.500	35.001.500	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	194.500.000	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	21.200.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.120	20.000.120	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.620	40.009.620	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.980.000	19.980.000	
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.599.450	22.599.450	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.113.511	383.613.511	
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.262.600	12.262.600	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>455.540.000</b>	<b>413.540.000</b>	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.540.000	101.540.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.000.000	312.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.022.000</b>	<b>210.022.000</b>	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000	195.000.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.022.000	15.022.000	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>53.000.000</b>	<b>4.450.903.086</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	9.100.000	9.100.000	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.700.000	18.700.000	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	5.200.000	5.200.000	
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>4.397.903.086</b>	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	163.200.000	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	4.234.703.086	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4.200.701.000</b>	<b>4.235.701.000</b>	
<b>1.04.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	50.000.000	50.000.000	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12.000.000	12.000.000	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	11.500.000	11.500.000	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>4.127.201.000</b>	<b>4.162.201.000</b>	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	4.127.201.000	4.162.201.000	
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>545.000.000</b>	<b>917.500.000</b>	
<b>1.04.04.2.01</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>545.000.000</b>	<b>917.500.000</b>	
1.04.04.2.01.01	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	545.000.000	917.500.000	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>10.503.366.497</b>	<b>13.685.447.496</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>10.503.366.497</b>	<b>13.685.447.496</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	140.000.000	280.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.313.366.497	13.355.447.496	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.000.000	50.000.000	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>13.846.187.710</b>	<b>14.168.576.349</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>5.898.370.778</b>	<b>5.959.164.796</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>5.898.370.778</b>	<b>5.959.164.796</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.743.627.278</b>	<b>3.669.088.796</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.198.700</b>	<b>34.788.700</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.497.000	28.667.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.701.700	6.121.700	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.122.952.848</b>	<b>2.892.506.926</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.009.562.048	2.781.781.026	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.062.000	99.222.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.691.400	4.691.400	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.637.400	6.812.500	
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.676.000</b>	<b>7.276.000</b>	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.676.000	7.276.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	200.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>140.961.100</b>	<b>267.721.600</b>	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.442.750	12.442.750	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	656.200	656.200	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.010.000	10.010.000	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.148.600	8.148.600	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.190.000	8.190.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.513.550	228.274.050	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>188.637.840</b>	<b>188.637.840</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.200.000	26.200.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.660.840	24.660.840	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.327.000	5.327.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.450.000	132.450.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.200.790</b>	<b>78.157.730</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.200.790	78.157.730	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.154.743.500</b>	<b>2.290.076.000</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.942.871.100</b>	<b>1.936.903.750</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.926.192.500	1.924.725.150	
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12.178.600	12.178.600	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>211.872.400</b>	<b>353.172.250</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.039.600	49.867.100	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	183.890.300	303.305.150	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>5.103.476.199</b>	<b>5.273.313.067</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>5.032.810.899</b>	<b>5.202.647.767</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.032.810.899</b>	<b>5.202.647.767</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.896.700</b>	<b>7.896.700</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.896.700	7.896.700	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.144.987.999</b>	<b>2.174.874.869</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.032.949.799	2.062.836.669	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.800.000	103.800.000	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.238.200	8.238.200	
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	8.400.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>148.500.000</b>	<b>120.780.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148.500.000	120.780.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>277.836.200</b>	<b>336.372.795</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.700	9.999.700	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.996.900	19.996.900	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.674.795	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	17.050.000	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.768.600	31.185.400	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.990.000	62.990.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.081.000	184.476.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.354.665.000</b>	<b>2.380.119.353</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.400.000	28.150.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.875.000	57.037.676	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000	38.901.427	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.261.400.000	2.256.030.250	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.525.000</b>	<b>174.204.050</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.525.000	57.022.400	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	117.181.650	
<b>1.05.0.00.0.00.02.1502</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN SEKTOR I</b>	<b>23.555.100</b>	<b>23.555.100</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.555.100</b>	<b>23.555.100</b>	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>10.475.100</b>	<b>10.475.100</b>	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.629.700	6.629.700	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.705.000	1.705.000	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.140.400	2.140.400	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.080.000</b>	<b>13.080.000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.080.000	13.080.000	
<b>1.05.0.00.0.00.02.1503</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN SEKTOR II</b>	<b>23.555.100</b>	<b>23.555.100</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.555.100</b>	<b>23.555.100</b>	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>10.475.100</b>	<b>10.475.100</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.629.700	6.629.700	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.705.000	1.705.000	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.140.400	2.140.400	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.080.000</b>	<b>13.080.000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.080.000	13.080.000	
<b>1.05.0.00.0.00.02.1504</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN SEKTOR III</b>	<b>23.555.100</b>	<b>23.555.100</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.555.100</b>	<b>23.555.100</b>	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>10.475.100</b>	<b>10.475.100</b>	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.629.700	6.629.700	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.705.000	1.705.000	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.140.400	2.140.400	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.080.000</b>	<b>13.080.000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.080.000	13.080.000	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>2.844.340.733</b>	<b>2.936.098.486</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>2.844.340.733</b>	<b>2.936.098.486</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.228.993.733</b>	<b>2.351.351.486</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.643.750</b>	<b>6.999.750</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.794.000	4.150.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	243.500	243.500	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	237.200	237.200	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.500	300.500	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	248.100	248.100	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.820.450	1.820.450	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.693.706.542</b>	<b>1.726.464.491</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.615.855.192	1.642.613.141	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.080.000	82.080.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	826.500	826.500	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	944.850	944.850	
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.467.600</b>	<b>67.967.600</b>	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000	400.000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.067.600	67.567.600	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>185.863.650</b>	<b>287.179.050</b>	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.686.400	10.648.100	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	15.000.000	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.154.500	35.204.600	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.493.750	11.493.750	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.529.000	214.832.600	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.884.412</b>	<b>161.824.445</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91.200.000	75.600.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.684.412	32.224.445	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.000.000	54.000.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.427.779</b>	<b>100.916.150</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.777.550	95.825.150	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.091.000	5.091.000	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>615.347.000</b>	<b>584.747.000</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.000.000	1.000.000	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>591.600.000</b>	<b>561.000.000</b>	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	588.000.000	558.000.000	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	1.000.000	1.000.000	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.000.000	1.000.000	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>21.272.000</b>	<b>21.272.000</b>	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	9.732.000	9.732.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11.540.000	11.540.000	
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	675.000	675.000	
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	800.000	800.000	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>4.608.483.976</b>	<b>4.611.002.123</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>4.608.483.976</b>	<b>4.611.002.123</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>4.608.483.976</b>	<b>4.611.002.123</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.617.062.481</b>	<b>3.545.729.513</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.933.480</b>	<b>17.734.080</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.071.720	3.204.620	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	851.000	1.062.900	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	851.000	1.012.200	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.231.500	1.392.700	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	873.400	1.047.600	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.054.860	10.014.060	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.045.295.231</b>	<b>2.806.827.956</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.927.107.291	2.689.625.616	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112.200.000	109.930.000	
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.352.240	1.736.640	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.635.700	5.535.700	
<b>1.06.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.676.000</b>	<b>6.676.000</b>	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.676.000	6.676.000	
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	17.000.000	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>194.249.230</b>	<b>344.733.890</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.070.200	3.098.800	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000	65.958.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.963.050	6.587.550	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.817.650	4.262.140	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	10.800.000	
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.128.430	19.949.600	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000	2.250.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.919.900	231.827.800	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>267.861.500</b>	<b>273.070.902</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.201.500	18.201.500	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.260.000	73.269.402	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.400.000	181.600.000	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.047.040</b>	<b>79.686.685</b>	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.828.000	53.828.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.735.000	1.735.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.484.040	24.123.685	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>114.060.100</b>	<b>147.060.100</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.060.100</b>	<b>147.060.100</b>	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.255.800	134.255.800	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12.804.300	12.804.300	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>94.010.550</b>	<b>102.957.380</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>83.464.000</b>	<b>93.660.830</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	27.873.000	27.388.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	9.375.500	1.185.500	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.411.800	13.831.800	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	14.728.000	14.438.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	17.075.700	36.817.530	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>10.546.550</b>	<b>9.296.550</b>	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10.546.550	9.296.550	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>536.973.340</b>	<b>532.289.590</b>	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>536.973.340</b>	<b>532.289.590</b>	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91.407.250	74.000.150	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	445.566.090	458.289.440	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>216.932.960</b>	<b>258.616.860</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>46.336.750</b>	<b>43.422.700</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	46.336.750	43.422.700	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>170.596.210</b>	<b>215.194.160</b>	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	170.596.210	215.194.160	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>18.848.245</b>	<b>24.348.680</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>18.848.245</b>	<b>24.348.680</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.848.245	24.348.680	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>6.040.392.651</b>	<b>6.132.154.621</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>6.040.392.651</b>	<b>6.132.154.621</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>6.040.392.651</b>	<b>6.132.154.621</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.177.252.383</b>	<b>5.317.709.524</b>	
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.944.800</b>	<b>7.828.700</b>	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.659.400	5.543.300	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	390.000	390.000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	390.000	390.000	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	390.000	390.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	390.000	390.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	725.400	725.400	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.475.671.233</b>	<b>4.466.288.119</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.395.751.233	4.370.168.119	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.920.000	96.120.000	
<b>2.07.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.460.200</b>	<b>6.460.200</b>	
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.460.200	6.460.200	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>297.424.750</b>	<b>405.757.224</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.223.500	4.423.500	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.655.000	5.330.000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000	3.600.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.707.500	9.707.500	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	31.726.800	33.919.900	
2.07.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.493.500	14.743.500	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.018.450	325.032.824	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290.718.400</b>	<b>302.436.640</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.400.000	30.000.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.118.400	80.236.640	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.200.000	187.200.000	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98.033.000</b>	<b>128.938.641</b>	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.533.000	96.203.196	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	32.735.445	
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>34.434.100</b>	<b>37.545.100</b>	
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>34.434.100</b>	<b>37.545.100</b>	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	34.434.100	37.545.100	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>442.157.653</b>	<b>357.411.057</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>411.379.453</b>	<b>325.100.857</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	92.639.453	93.670.353	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	318.740.000	231.430.504	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>15.978.200</b>	<b>17.510.200</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.978.200	17.510.200	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.800.000</b>	<b>14.800.000</b>	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.800.000	14.800.000	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>47.249.990</b>	<b>47.249.990</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.673.490</b>	<b>40.673.490</b>	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	22.315.400	22.315.400	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	5.938.090	5.938.090	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	12.420.000	12.420.000	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.576.500</b>	<b>6.576.500</b>	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	6.576.500	6.576.500	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>339.298.525</b>	<b>372.238.950</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.060.300</b>	<b>17.985.300</b>	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.060.300	17.985.300	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>323.238.225</b>	<b>354.253.650</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.842.150	12.783.250	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.251.600	9.040.400	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	303.144.475	332.430.000	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>3.057.468.815</b>	<b>2.871.830.667</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>3.057.468.815</b>	<b>2.871.830.667</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>3.057.468.815</b>	<b>2.871.830.667</b>	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.695.996.165</b>	<b>2.510.428.217</b>	
<b>2.08.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.741.200</b>	<b>5.906.200</b>	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.604.000	3.769.000	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.137.200	2.137.200	
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.143.921.215</b>	<b>1.933.288.267</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.062.081.215	1.851.448.267	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.840.000	81.840.000	
<b>2.08.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.185.600</b>	<b>7.185.600</b>	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.185.600	7.185.600	
<b>2.08.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.125.000</b>	<b>22.117.000</b>	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	22.117.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>174.628.250</b>	<b>248.048.250</b>	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.012.500	30.012.500	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.135.250	3.135.250	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	3.300.000	
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.942.500	11.942.500	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.238.000	199.658.000	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>287.246.400</b>	<b>258.546.400</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.200.000	25.200.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.646.400	37.646.400	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.400.000	195.700.000	
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.336.500</b>	<b>35.336.500</b>	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.336.500	35.336.500	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>118.002.880</b>	<b>117.966.680</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>24.771.080</b>	<b>24.271.080</b>	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	24.771.080	24.271.080	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>35.111.800</b>	<b>35.575.800</b>	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.111.800	35.575.800	
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>58.120.000</b>	<b>58.119.800</b>	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.782.400	40.782.400	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.337.600	17.337.400	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>38.932.650</b>	<b>38.932.650</b>	
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>38.932.650</b>	<b>38.932.650</b>	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.932.650	38.932.650	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>81.062.020</b>	<b>74.762.020</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.949.400</b>	<b>24.649.400</b>	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.949.400	24.649.400	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.112.620</b>	<b>50.112.620</b>	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.112.620	50.112.620	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>41.742.200</b>	<b>50.908.200</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.742.200</b>	<b>50.908.200</b>	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	41.742.200	50.908.200	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>51.881.000</b>	<b>51.881.000</b>	
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>51.881.000</b>	<b>51.881.000</b>	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.881.000	51.881.000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>29.851.900</b>	<b>26.951.900</b>	
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.851.900</b>	<b>26.951.900</b>	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.851.900	26.951.900	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>6.833.384.504</b>	<b>6.947.756.686</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	<b>6.833.384.504</b>	<b>6.947.756.686</b>	
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	<b>6.833.384.504</b>	<b>6.947.756.686</b>	
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.194.385.834</b>	<b>3.313.465.256</b>	
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.694.440</b>	<b>31.874.440</b>	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.894.500	15.074.500	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.893.290	2.893.290	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.695.950	2.695.950	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.003.310	2.003.310	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.036.200	2.036.200	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.179.100	4.179.100	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.992.090	2.992.090	
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.538.058.349</b>	<b>2.627.851.741</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.942.999	2.474.315.191	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.860.000	130.860.000	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.061.000	5.061.000	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.194.350	17.615.550	
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.740.810</b>	<b>4.740.810</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.740.810	4.740.810	
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.607.050</b>	<b>6.607.050</b>	
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.607.050	6.607.050	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>254.771.035</b>	<b>323.548.865</b>	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.340.250	3.340.250	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.631.210	14.956.590	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.090.075	19.176.875	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.986.500	3.986.500	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.723.000	273.088.650	
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>291.058.150</b>	<b>251.386.350</b>	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.680.000	20.573.200	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.378.150	230.813.150	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.456.000</b>	<b>67.456.000</b>	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.375.000	60.375.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.081.000	7.081.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>3.008.300.000</b>	<b>3.005.125.000</b>	
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.008.300.000</b>	<b>3.005.125.000</b>	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3.008.300.000	3.005.125.000	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>579.073.400</b>	<b>582.248.400</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>339.073.400</b>	<b>342.248.400</b>	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	28.786.600	31.961.600	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	310.286.800	310.286.800	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	240.000.000	240.000.000	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>33.600.400</b>	<b>33.593.160</b>	
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>33.600.400</b>	<b>33.593.160</b>	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.600.400	33.593.160	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>18.024.870</b>	<b>13.324.870</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.024.870</b>	<b>13.324.870</b>	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18.024.870	13.324.870	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>2.428.146.710</b>	<b>3.296.887.758</b>	
<b>2.10.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN</b>	<b>2.428.146.710</b>	<b>3.296.887.758</b>	
<b>2.10.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN</b>	<b>2.428.146.710</b>	<b>3.296.887.758</b>	
<b>2.10.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.164.258.410</b>	<b>2.297.359.608</b>	
<b>2.10.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.265.550</b>	<b>12.345.750</b>	
2.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.925.950	8.006.150	
2.10.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.204.900	2.204.900	
2.10.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.134.700	2.134.700	
<b>2.10.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.725.234.470</b>	<b>1.660.521.718</b>	
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.623.546.970	1.576.288.618	
2.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.080.000	79.080.000	
2.10.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.607.500	5.153.100	
<b>2.10.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.609.590</b>	<b>286.437.190</b>	
2.10.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.308.800	33.498.500	
2.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.183.510	14.025.850	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.819.000	3.360.160	
2.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.560.000	8.880.000	
2.10.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.910.780	19.481.680	
2.10.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	7.320.000	
2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.827.500	199.871.000	
<b>2.10.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	
2.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	36.000.000	
<b>2.10.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>267.600.000</b>	<b>242.550.000</b>	
2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	8.550.000	
2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.400.000	228.000.000	
<b>2.10.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.548.800</b>	<b>59.504.950</b>	
2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.548.800	59.504.950	
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>37.590.800</b>	<b>78.439.100</b>	
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.590.800</b>	<b>78.439.100</b>	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.444.550	44.610.900	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.146.250	33.828.200	
<b>2.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>	<b>316.000.000</b>	
<b>2.10.05.2.01</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>316.000.000</b>	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	316.000.000	
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>16.122.300</b>	<b>46.119.150</b>	
<b>2.10.06.2.01</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.122.300</b>	<b>46.119.150</b>	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	16.122.300	46.119.150	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>210.175.200</b>	<b>558.969.900</b>	
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>210.175.200</b>	<b>558.969.900</b>	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	210.175.200	558.969.900	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>8.564.266.246</b>	<b>8.571.826.004</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>8.564.266.246</b>	<b>8.571.826.004</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>8.564.266.246</b>	<b>8.571.826.004</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.571.769.596</b>	<b>2.418.300.395</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.265.000</b>	<b>20.658.100</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.610.200	6.978.000	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.060.000	3.704.800	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.100.000	1.480.500	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.024.800	1.024.800	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.005.000	1.005.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.468.600	3.468.600	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.996.400	2.996.400	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.126.355.971</b>	<b>1.959.956.005</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.020.405.571	1.814.965.605	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.320.000	138.360.000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.935.200	3.935.200	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.695.200	2.695.200	
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>157.748.625</b>	<b>204.084.225</b>	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.127.500	3.127.500	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.280.000	2.280.000	
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.995.525	18.023.525	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.345.600	180.653.200	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>189.900.000</b>	<b>161.102.065</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	12.000.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.500.000	57.902.065	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	7.800.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.400.000	83.400.000	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.500.000</b>	<b>63.500.000</b>	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.500.000	63.500.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	100.000.000	150.000.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>3.893.501.000</b>	<b>3.866.529.959</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>3.893.501.000</b>	<b>3.866.529.959</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3.714.000.000	1.312.750.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	17.000.000	24.325.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	162.501.000	2.529.454.959	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>9.514.700</b>	<b>9.514.700</b>	
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.514.700</b>	<b>9.514.700</b>	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	9.514.700	9.514.700	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>16.637.500</b>	<b>16.637.500</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.637.500</b>	<b>16.637.500</b>	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.637.500	16.637.500	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1.972.843.450</b>	<b>2.110.843.450</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>1.972.843.450</b>	<b>2.110.843.450</b>	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	18.491.450	18.491.450	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.954.352.000	2.092.352.000	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.724.118.145</b>	<b>4.956.446.420</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.724.118.145</b>	<b>4.956.446.420</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.724.118.145</b>	<b>4.956.446.420</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.763.409.345</b>	<b>3.809.572.272</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.267.000</b>	<b>20.267.000</b>	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.924.800	13.924.800	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.233.400	1.233.400	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.225.600	1.225.600	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.225.600	1.225.600	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.075.600	1.075.600	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.582.000	1.582.000	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.025.963.745</b>	<b>2.772.116.838</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.924.118.145	2.670.271.238	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.115.200	98.115.200	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	989.200	989.200	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.741.200	2.741.200	
<b>2.12.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.251.600</b>	<b>9.251.600</b>	
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	697.400	697.400	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.554.200	8.554.200	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>281.729.253</b>	<b>509.355.100</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.939.000	3.939.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.540.000	210.162.547	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.594.250	12.594.250	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.848.500	37.851.800	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.920.000	29.920.000	
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.572.200	16.572.200	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.315.303	198.315.303	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>350.191.581</b>	<b>350.191.581</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.750.800	9.750.800	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.040.781	224.040.781	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.400.000	116.400.000	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.745.166</b>	<b>148.390.153</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.512.192	100.182.922	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.887.000	3.887.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.518.973	39.493.230	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.827.001	4.827.001	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>758.380.900</b>	<b>845.402.248</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>695.961.400</b>	<b>752.725.000</b>	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	57.882.100	57.882.100	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	66.622.700	75.386.300	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	310.056.600	358.056.600	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	261.400.000	261.400.000	
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>62.419.500</b>	<b>92.677.248</b>	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	62.419.500	92.677.248	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>132.604.500</b>	<b>167.012.250</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>70.185.000</b>	<b>70.185.000</b>	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.822.500	50.822.500	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	19.362.500	19.362.500	
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>62.419.500</b>	<b>96.827.250</b>	
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	62.419.500	96.827.250	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>62.419.500</b>	<b>127.155.750</b>	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>62.419.500</b>	<b>127.155.750</b>	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62.419.500	127.155.750	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>7.303.900</b>	<b>7.303.900</b>	
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>7.303.900</b>	<b>7.303.900</b>	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.576.000	5.576.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1.727.900	1.727.900	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>7.858.157.923</b>	<b>9.202.879.708</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>7.858.157.923</b>	<b>9.202.879.708</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>7.858.157.923</b>	<b>9.202.879.708</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.767.962.469</b>	<b>3.865.088.804</b>	
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.169.600</b>	<b>25.409.600</b>	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.823.200	11.823.200	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.346.400	13.586.400	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.184.348.078</b>	<b>3.115.912.030</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.999.068.078	2.965.552.030	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.280.000	150.360.000	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>237.574.260</b>	<b>309.695.900</b>	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	40.000.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.539.500	10.539.500	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.175.720	9.175.730	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.750.000	14.850.000	
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.799.040	26.778.670	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.310.000	208.352.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>271.191.200</b>	<b>262.791.200</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.300.000	8.900.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.891.200	7.891.200	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.000.000	246.000.000	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.679.331</b>	<b>151.280.074</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.679.331	151.280.074	
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>15.040.890</b>	<b>15.040.890</b>	
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>15.040.890</b>	<b>15.040.890</b>	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15.040.890	15.040.890	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.146.105.764</b>	<b>4.043.703.414</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>3.146.105.764</b>	<b>4.043.703.414</b>	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	856.049.969	729.015.219	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	11.434.030	11.434.030	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.217.653.865	3.242.286.265	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	34.904.760	34.904.760	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	11.063.140	11.063.140	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15.000.000	15.000.000	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>929.048.800</b>	<b>1.279.046.600</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>929.048.800</b>	<b>1.279.046.600</b>	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	29.048.800	29.048.800	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	900.000.000	1.249.997.800	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>10.527.770.529</b>	<b>10.329.909.258</b>	
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>10.527.770.529</b>	<b>10.329.909.258</b>	
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>10.527.770.529</b>	<b>10.329.909.258</b>	
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.664.336.851</b>	<b>2.467.445.185</b>	
<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	318.000	318.000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	318.000	318.000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	318.000	318.000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	318.000	318.000	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	318.000	318.000	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.881.020.606</b>	<b>1.658.191.175</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.881.020.606	1.658.191.175	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>365.219.580</b>	<b>412.896.820</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	512.400	512.400	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.000.000	46.500.000	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.311.000	6.138.200	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.182.500	13.289.700	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.060.000	12.060.000	
2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.085.280	35.313.070	
2.14.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.665.000	17.450.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.403.400	281.633.450	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>254.208.840</b>	<b>235.208.840</b>	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.400.000	10.400.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.438.840	15.438.840	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.370.000	209.370.000	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>162.297.825</b>	<b>159.558.350</b>	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.297.825	159.558.350	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>86.669.794</b>	<b>83.692.864</b>	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>86.669.794</b>	<b>83.692.864</b>	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.408.544	29.412.864	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	40.000.000	54.280.000	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>5.192.269.384</b>	<b>5.194.276.709</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.363.928.233</b>	<b>1.363.905.874</b>	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	583.752.340	590.039.740	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	780.175.893	773.866.134	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.089.600.000</b>	<b>1.089.600.000</b>	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.089.600.000	1.089.600.000	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.720.991.151</b>	<b>1.723.020.835</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000	22.500.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	701.234.152	701.230.986	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	997.256.999	999.289.849	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.017.750.000</b>	<b>1.017.750.000</b>	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.017.750.000	1.017.750.000	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.584.494.500</b>	<b>2.584.494.500</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>2.584.494.500</b>	<b>2.584.494.500</b>	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	642.000.000	642.000.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	43.444.500	43.444.500	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.899.050.000	1.899.050.000	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>8.599.297.013</b>	<b>9.146.573.581</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>8.599.297.013</b>	<b>9.146.573.581</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>8.498.312.013</b>	<b>8.987.089.931</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.020.460.681</b>	<b>4.149.259.712</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.612.490</b>	<b>29.612.490</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.212.300	8.212.300	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.615.000	3.615.000	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.950.000	1.950.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.732.000	5.732.000	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.720.000	4.720.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.995.000	3.995.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.388.190	1.388.190	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.219.929.497</b>	<b>3.185.440.442</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.211.948.897	3.170.749.842	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.840.200	8.825.200	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.140.400	5.865.400	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>151.613.334</b>	<b>310.862.860</b>	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.482.600	20.852.600	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.998.634	18.219.400	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.680.000	
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.750.600	41.526.360	
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.368.000	15.042.500	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.333.500	210.542.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>535.251.200</b>	<b>458.250.720</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.500.000	31.500.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.751.200	70.550.720	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.000.000	356.200.000	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.054.160</b>	<b>165.093.200</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.054.160	165.093.200	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>4.429.111.332</b>	<b>4.783.830.719</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>901.535.900</b>	<b>1.085.790.650</b>	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	901.535.900	1.085.790.650	
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>1.995.033.432</b>	<b>1.842.971.319</b>	
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	1.995.033.432	1.842.971.319	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.532.542.000</b>	<b>1.855.068.750</b>	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.205.000.000	1.560.976.250	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	327.542.000	294.092.500	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>48.740.000</b>	<b>53.999.500</b>	
<b>2.15.03.2.12</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>48.740.000</b>	<b>53.999.500</b>	
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	48.740.000	53.999.500	
<b>2.15.0.00.0.00.01.2151</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>100.985.000</b>	<b>159.483.650</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>100.985.000</b>	<b>159.483.650</b>	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>100.985.000</b>	<b>159.483.650</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	15.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	37.200.000	87.483.650	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	36.785.000	45.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000	12.000.000	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>5.251.321.166</b>	<b>5.420.837.874</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>	<b>5.251.321.166</b>	<b>5.420.837.874</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>	<b>5.251.321.166</b>	<b>5.420.837.874</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.224.622.106</b>	<b>3.212.372.734</b>	
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.187.600</b>	<b>13.644.600</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	862.800	12.319.800	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.324.800	1.324.800	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.932.534.857</b>	<b>2.856.283.046</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.754.386.057	2.673.944.046	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165.960.000	165.960.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.525.400	1.525.400	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.663.400	14.853.600	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>134.390.000</b>	<b>197.634.460</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	37.150.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	798.400	798.400	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.999.850	3.899.850	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.220.000	2.220.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	990.000	1.800.000	
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.320.350	13.444.510	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.061.400	138.321.700	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>132.800.299</b>	<b>118.203.878</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.400.000	8.400.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.299	19.803.878	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.400.000	90.000.000	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.709.350</b>	<b>26.606.750</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.709.350	26.606.750	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.472.170.880</b>	<b>1.662.114.320</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.472.170.880</b>	<b>1.662.114.320</b>	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	330.500.600	390.509.100	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	22.273.000	22.272.460	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	999.998.200	1.099.998.050	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	104.379.080	104.378.710	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	15.020.000	44.956.000	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>554.528.180</b>	<b>546.350.820</b>	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>554.528.180</b>	<b>546.350.820</b>	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	532.060.180	450.014.820	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	22.468.000	96.336.000	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>2.723.371.532</b>	<b>3.475.837.273</b>	
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>2.723.371.532</b>	<b>3.475.837.273</b>	
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>2.723.371.532</b>	<b>3.475.837.273</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.623.371.532</b>	<b>2.675.837.473</b>	
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.479.100</b>	<b>5.479.100</b>	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	930.000	930.000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	875.200	875.200	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	875.200	875.200	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	875.200	875.200	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	875.200	875.200	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.048.300	1.048.300	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.054.877.622</b>	<b>2.008.490.123</b>	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.923.258.822	1.875.761.323	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.590.000	122.700.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.122.000	2.122.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.906.800	7.906.800	
<b>2.17.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.499.600</b>	<b>2.499.600</b>	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.499.600	2.499.600	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>251.260.210</b>	<b>328.253.350</b>	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.524.260	10.524.260	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.889.000	5.889.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.444.900	23.487.590	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	9.600.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.402.050	264.352.500	
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	16.000.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>245.400.000</b>	<b>233.400.000</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	12.000.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	5.400.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.000.000	216.000.000	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.855.000</b>	<b>81.715.300</b>	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.495.000	75.355.300	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.360.000	6.360.000	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	50.000.000	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>0</b>	<b>699.999.800</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>699.999.800</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	699.999.800	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000	50.000.000	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>3.974.065.360</b>	<b>3.705.695.885</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.23.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>3.974.065.360</b>	<b>3.705.695.885</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.23.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>3.974.065.360</b>	<b>3.705.695.885</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.386.464.760</b>	<b>3.123.106.485</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.970.800</b>	<b>39.045.800</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.153.600	4.153.600	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.765.200	3.765.200	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.765.200	5.140.200	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.765.200	5.140.200	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.765.200	5.140.200	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.765.200	5.140.200	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.991.200	10.566.200	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.608.079.710</b>	<b>2.300.002.235</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.520.032.210	2.203.799.065	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.840.000	80.760.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.600.500	4.036.170	
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.602.500	3.602.500	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.004.500	7.804.500	
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.011.500</b>	<b>23.441.000</b>	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.011.500	23.441.000	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230.292.750</b>	<b>329.827.450</b>	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.540.000	3.540.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.008.750	12.998.750	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.296.000	13.764.700	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000	4.950.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	12.000.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.748.000	282.574.000	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>417.000.000</b>	<b>386.840.000</b>	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.600.000	67.440.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.400.000	319.400.000	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.110.000</b>	<b>43.950.000</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.110.000	43.950.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>60.928.300</b>	<b>60.928.100</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.928.300</b>	<b>60.928.100</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	60.928.300	60.928.100	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>56.317.000</b>	<b>51.306.000</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56.317.000</b>	<b>51.306.000</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	56.317.000	51.306.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>91.205.300</b>	<b>91.205.300</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>91.205.300</b>	<b>91.205.300</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	85.179.650	86.352.650	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.315.500	2.315.500	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.710.150	2.537.150	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>379.150.000</b>	<b>379.150.000</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>379.150.000</b>	<b>379.150.000</b>	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	180.613.500	274.766.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	98.780.200	104.384.000	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>7.916.558.866</b>	<b>10.780.075.093</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>7.916.558.866</b>	<b>10.780.075.093</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>7.916.558.866</b>	<b>10.780.075.093</b>	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.365.047.633</b>	<b>3.936.129.260</b>	
<b>2.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.022.000</b>	<b>42.142.000</b>	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.908.000	17.788.000	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.840.000	1.840.000	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.840.000	1.840.000	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.840.000	1.840.000	
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.840.000	1.840.000	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.754.000	16.994.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.693.167.433</b>	<b>2.415.083.660</b>	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.628.247.433	2.291.763.660	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.120.000	96.760.000	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	15.560.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.800.000	11.000.000	
<b>2.19.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>44.640.000</b>	<b>39.150.000</b>	
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.640.000	39.150.000	
<b>2.19.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	9.000.000	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>245.181.200</b>	<b>421.357.830</b>	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.171.200	2.171.200	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	
2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	51.000.000	61.147.680	
2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.414.000	18.414.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.596.000	327.624.950	
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>320.995.200</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	106.995.200	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	60.500.000	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	153.500.000	
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255.590.832</b>	<b>214.154.402</b>	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.590.832	24.554.402	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.000.000	189.600.000	
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.446.168</b>	<b>444.246.168</b>	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.724.436	68.724.436	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.658.000	2.658.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.063.732	372.863.732	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>321.139.400</b>	<b>625.384.000</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>321.139.400</b>	<b>625.384.000</b>	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	321.139.400	625.384.000	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>4.130.371.833</b>	<b>6.118.561.833</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.308.631.500</b>	<b>2.796.821.500</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.308.631.500	2.796.821.500	
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.500.000.000	2.000.000.000	
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>1.321.740.333</b>	<b>1.321.740.333</b>	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.321.740.333	1.321.740.333	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	100.000.000	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>37.299.450</b>	<b>67.264.050</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>	<b>37.299.450</b>	<b>67.264.050</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>	<b>37.299.450</b>	<b>67.264.050</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>37.299.450</b>	<b>67.264.050</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.299.450</b>	<b>67.264.050</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	26.269.450	63.234.050	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	11.030.000	4.030.000	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>44.690.250</b>	<b>74.723.250</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.2.21.2.20.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	44.690.250	74.723.250	
2.16.2.21.2.20.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	44.690.250	74.723.250	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	44.690.250	74.723.250	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.959.000	18.698.000	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.475.000	2.475.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.484.000	16.223.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	34.731.250	56.025.250	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.731.250	56.025.250	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	360.075.600	127.111.800	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	360.075.600	127.111.800	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	360.075.600	127.111.800	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	101.090.600	77.640.600	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.555.800	57.105.800	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	30.250.800	30.250.800	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50.305.000	26.855.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.534.800</b>	<b>20.534.800</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20.534.800	20.534.800	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>87.517.200</b>	<b>49.471.200</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>87.517.200</b>	<b>49.471.200</b>	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	87.517.200	49.471.200	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>14.162.890.513</b>	<b>13.862.713.247</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>14.162.890.513</b>	<b>13.862.713.247</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>14.162.890.513</b>	<b>13.862.713.247</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.840.835.138</b>	<b>3.540.657.872</b>	
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.851.550</b>	<b>9.851.550</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.552.900	6.552.900	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	381.500	381.500	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	283.750	283.750	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	381.500	381.500	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	367.500	367.500	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.884.400	1.884.400	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.120.630.760</b>	<b>2.787.831.069</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.022.361.560	2.722.081.869	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.200.000	61.680.000	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.034.600	2.034.600	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.034.600	2.034.600	
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.161.850</b>	<b>6.161.850</b>	
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.161.850	6.161.850	
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.261.000</b>	<b>30.261.000</b>	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.261.000	30.261.000	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>183.072.750</b>	<b>240.645.800</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	995.200	995.200	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.318.050	7.318.050	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.930.000	9.930.000	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.660.000	39.660.000	
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.251.500	21.424.550	
2.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.550.000	3.550.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.368.000	157.768.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>421.656.103</b>	<b>396.705.478</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.009.103	60.808.478	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.647.000	335.897.000	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.201.125</b>	<b>69.201.125</b>	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.700.890	51.700.890	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000	9.990.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.510.235	7.510.235	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>10.314.612.875</b>	<b>10.314.612.875</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.307.541.875</b>	<b>10.307.541.875</b>	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.250.738.700	10.250.738.700	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.949.200	19.949.200	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	21.201.500	21.201.500	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	15.652.475	15.652.475	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.071.000</b>	<b>7.071.000</b>	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	7.071.000	7.071.000	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>7.442.500</b>	<b>7.442.500</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.442.500</b>	<b>7.442.500</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	7.442.500	7.442.500	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>45.131.675</b>	<b>45.005.675</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>45.131.675</b>	<b>45.005.675</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>45.131.675</b>	<b>45.005.675</b>	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>45.131.675</b>	<b>45.005.675</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.225.300</b>	<b>43.199.300</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	10.769.800	10.769.800	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	28.455.500	32.429.500	
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.906.375</b>	<b>1.806.375</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	5.906.375	1.806.375	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>10.939.934.308</b>	<b>11.263.593.863</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>10.939.934.308</b>	<b>11.263.593.863</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>10.874.934.308</b>	<b>11.198.593.863</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.313.531.708</b>	<b>4.098.791.863</b>	
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.951.196</b>	<b>58.779.600</b>	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.023.196	19.090.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	4.549.400	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	14.575.000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	4.455.800	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.928.000	7.620.400	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.489.000	
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.624.127.068</b>	<b>3.263.746.986</b>	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.465.047.068	3.005.506.986	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.080.000	258.240.000	
<b>3.25.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	8.400.000	
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.125.000</b>	<b>17.003.000</b>	
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	17.003.000	
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>366.495.317</b>	<b>510.679.150</b>	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.519.000	4.519.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.000.000	93.000.000	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.270.000	8.270.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.212.000	13.212.000	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	69.992.000	72.393.150	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	8.750.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.202.317	299.735.000	
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>194.050.000</b>	<b>194.050.000</b>	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.450.000	34.450.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.600.000	159.600.000	
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.783.127</b>	<b>46.133.127</b>	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.228.127	39.228.127	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.555.000	6.905.000	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.194.960.000</b>	<b>3.459.460.000</b>	
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.808.400.000</b>	<b>2.954.010.000</b>	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.808.400.000	2.954.010.000	
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>386.560.000</b>	<b>505.450.000</b>	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	386.560.000	505.450.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>3.339.442.600</b>	<b>3.613.342.000</b>	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>3.335.892.000</b>	<b>3.613.342.000</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	746.804.000	1.029.364.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.589.088.000	2.583.978.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	27.000.000	27.000.000	
<b>3.25.0.00.0.00.03.3251</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>4.202.077.503</b>	<b>4.178.489.513</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>4.202.077.503</b>	<b>4.178.489.513</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>4.202.077.503</b>	<b>4.178.489.513</b>	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.435.557.489</b>	<b>3.161.969.500</b>	
<b>3.26.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24.061.200</b>	<b>22.335.100</b>	



## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.341.600	6.556.600	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.781.200	2.781.200	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.263.400	3.263.400	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.494.800	3.254.800	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.263.400	3.263.400	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.916.800	3.215.700	
<b>3.26.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.625.078.808</b>	<b>2.351.780.819</b>	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.488.428.008	2.214.840.019	
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.840.000	108.480.000	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.922.800	23.572.800	
3.26.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	675.600	675.600	
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.212.400	4.212.400	
<b>3.26.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.575.600</b>	<b>16.500.000</b>	
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	16.500.000	
<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>332.948.091</b>	<b>356.871.547</b>	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.602.750	1.600.550	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.705.000	45.500.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.779.000	8.459.150	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.840.000	8.840.000	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000	15.600.000	
3.26.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.378.740	18.710.600	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	5.000.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.042.601	253.161.247	
<b>3.26.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.575.000</b>	<b>15.860.605</b>	
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.575.000	15.860.605	
<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>305.496.744</b>	<b>292.996.644</b>	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.000.000	78.000.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.296.744	42.296.644	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.200.000	172.700.000	
<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118.822.046</b>	<b>105.624.785</b>	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.312.488	90.686.938	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.015.000	5.015.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.494.558	9.922.847	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>608.520.014</b>	<b>708.520.014</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>299.999.107</b>	<b>299.999.107</b>	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	299.999.107	299.999.107	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>308.520.907</b>	<b>408.520.907</b>	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	308.520.907	308.520.907	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	100.000.000	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>158.000.000</b>	<b>307.999.999</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>158.000.000</b>	<b>307.999.999</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8.000.000	8.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000	299.999.999	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>29.969.764.332</b>	<b>30.057.224.717</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>29.969.764.332</b>	<b>30.057.224.717</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>29.788.704.582</b>	<b>29.803.664.967</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.893.200.572</b>	<b>15.262.030.423</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.807.900</b>	<b>7.367.900</b>	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	790.000	790.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	595.000	595.000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	595.000	2.735.000	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	665.200	665.200	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	665.200	2.085.200	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.500	497.500	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.218.257.386</b>	<b>14.536.833.337</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.019.076.586	14.326.072.537	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.280.000	205.860.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.900.800	4.900.800	
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>47.556.000</b>	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	47.556.000	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>293.756.600</b>	<b>322.894.500</b>	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.000	500.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.050.000	8.050.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000	19.800.000	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	33.507.500	33.507.500	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.419.400	13.419.400	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.561.000	242.698.900	
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.918.700	4.918.700	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>248.018.400</b>	<b>248.018.400</b>	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.018.400	68.018.400	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.360.286</b>	<b>99.360.286</b>	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.360.286	99.360.286	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.517.500.000</b>	<b>3.241.500.000</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>3.317.500.000</b>	<b>2.941.500.000</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.317.500.000	2.941.500.000	
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>200.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200.000.000	300.000.000	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>7.158.480.340</b>	<b>8.221.820.874</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>102.108.340</b>	<b>151.103.340</b>	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	102.108.340	151.103.340	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>7.056.372.000</b>	<b>8.070.717.534</b>	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.607.668.700	2.857.293.700	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	528.000.000	528.000.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.590.000.000	2.321.625.000	
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	129.250.000	129.250.000	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.796.453.300	1.748.288.834	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	405.000.000	486.260.000	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>73.396.470</b>	<b>78.396.470</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.396.470</b>	<b>28.396.470</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23.396.470	28.396.470	
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	50.000.000	50.000.000	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>3.146.127.200</b>	<b>2.999.917.200</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>3.146.127.200</b>	<b>2.999.917.200</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	156.200.000	156.200.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.927.170.400	1.804.960.400	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.062.756.800	1.038.756.800	
<b>3.27.0.00.0.00.01.3271</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>181.059.750</b>	<b>253.559.750</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>181.059.750</b>	<b>253.559.750</b>	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>181.059.750</b>	<b>253.559.750</b>	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	181.059.750	253.559.750	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>7.423.821.451</b>	<b>7.817.654.304</b>	
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	<b>7.423.821.451</b>	<b>7.817.654.304</b>	
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	<b>7.423.821.451</b>	<b>7.817.654.304</b>	
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.750.125.571</b>	<b>4.609.386.708</b>	
<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.530.000</b>	<b>9.240.000</b>	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.120.000	1.120.000	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.400.000	1.400.000	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.120.000	1.120.000	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.120.000	1.120.000	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.480.000	4.480.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.067.715.298</b>	<b>3.849.482.035</b>	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.063.901.878	3.845.668.615	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.660.720	1.660.720	
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	976.900	976.900	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.175.800	1.175.800	
<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>235.625.560</b>	<b>332.409.960</b>	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	585.000	585.000	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000	18.650.000	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.834.000	8.400.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.499.210	2.499.210	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.450.350	1.450.350	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000	18.900.000	
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.789.900	29.825.300	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.675.000	2.000.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.392.100	250.100.100	
<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>387.355.584</b>	<b>375.355.584</b>	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.535.584	27.535.584	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.820.000	347.820.000	
<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.899.129</b>	<b>42.899.129</b>	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.899.129	42.899.129	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>2.468.248.120</b>	<b>2.973.146.341</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>2.468.248.120</b>	<b>2.973.146.341</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.097.388.160	2.390.218.272	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	370.859.960	582.928.069	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>100.623.820</b>	<b>127.234.615</b>	
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.670.000</b>	<b>6.129.050</b>	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.320.000	3.759.050	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	500.000	500.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	850.000	1.870.000	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>95.011.320</b>	<b>117.010.840</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30.566.570	55.566.090	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6.073.250	3.073.250	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	58.371.500	58.371.500	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.942.500</b>	<b>4.094.725</b>	
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	850.000	850.000	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1.242.500	1.242.500	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	850.000	2.002.225	
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>19.658.000</b>	<b>18.872.000</b>	
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.658.000</b>	<b>18.872.000</b>	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	19.658.000	18.872.000	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>85.165.940</b>	<b>89.014.640</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>85.165.940</b>	<b>89.014.640</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	45.660.850	49.509.550	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	26.509.090	26.509.090	
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	12.996.000	12.996.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>499.990.478</b>	<b>890.033.378</b>	
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>499.990.478</b>	<b>890.033.378</b>	
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>200.000.000</b>	<b>590.042.900</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>200.000.000</b>	<b>590.042.900</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>590.042.900</b>	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	540.042.900	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000	50.000.000	
<b>2.17.3.31.0.00.02.2902</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN INDUSTRI PANGAN</b>	<b>299.990.478</b>	<b>299.990.478</b>	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>299.990.478</b>	<b>299.990.478</b>	
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>65.766.750</b>	<b>65.766.750</b>	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.026.250	21.026.250	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.815.000	4.815.000	
3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.887.000	5.887.000	
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.450.000	20.450.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.588.500	13.588.500	
<b>3.31.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.000.000</b>	<b>141.000.000</b>	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.000.000	69.000.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	72.000.000	
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.723.728</b>	<b>85.723.728</b>	
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.723.728	85.723.728	
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>35.364.800</b>	<b>33.872.200</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>35.364.800</b>	<b>33.872.200</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>35.364.800</b>	<b>33.872.200</b>	
<b>3.32.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>35.364.800</b>	<b>33.872.200</b>	
<b>3.32.02.2.01</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>35.364.800</b>	<b>33.872.200</b>	
3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	35.364.800	33.872.200	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>29.018.792.265</b>	<b>33.717.549.150</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>29.018.792.265</b>	<b>33.717.549.150</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>29.018.792.265</b>	<b>33.717.549.150</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.668.168.275</b>	<b>27.125.116.647</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>357.263.300</b>	<b>450.317.170</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.890.000	231.325.470	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.921.350	26.921.350	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.642.350	20.642.350	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.995.400	69.129.800	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	40.318.350	47.802.350	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.257.300	20.257.300	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.238.550	34.238.550	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.574.275.947</b>	<b>8.999.114.628</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.386.854.327	7.780.869.408	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.059.870.470	1.080.641.320	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.533.850	29.933.850	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.179.450	24.679.450	
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	33.252.650	33.252.650	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.945.350	21.322.050	
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.639.850	28.415.900	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>139.687.200</b>	<b>157.796.700</b>	
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	105.102.050	123.211.550	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.255.000	10.255.000	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.330.150	24.330.150	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.100.000</b>	<b>23.100.000</b>	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.100.000	23.100.000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.736.655.535</b>	<b>2.153.296.785</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.528.000	25.527.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.500.000	54.500.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.452.000	19.452.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.455.985	254.711.085	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.900.000	73.350.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	180.000.000	188.640.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	499.988.950	643.155.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	596.158.650	861.289.150	
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.671.950	32.671.950	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>282.780.565</b>	<b>842.886.105</b>	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	133.750.000	329.875.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.530.105	211.530.105	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.500.460	301.481.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.688.057.300</b>	<b>7.529.239.300</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	206.400.000	198.600.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.464.480.000	1.548.480.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	470.365.600	642.441.100	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.546.811.700	5.139.718.200	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>837.540.224</b>	<b>1.635.689.477</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.671.300	215.277.300	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.973.390	483.025.270	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.755.502	913.051.867	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.506.029	24.335.040	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.523.083.244</b>	<b>1.556.379.741</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	702.933.244	736.229.741	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.150.000	150.150.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	220.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	450.000.000	450.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.737.249.190</b>	<b>2.716.891.741</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.372.540.586	1.362.690.387	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.020.038.241	1.014.434.491	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	344.670.363	339.766.863	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>411.036.020</b>	<b>460.545.750</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	92.384.900	141.894.900	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.128.010	125.127.740	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	69.407.430	69.407.430	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17.417.730	17.417.730	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	106.697.950	106.697.950	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>357.439.750</b>	<b>599.859.250</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	136.035.000	139.800.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	184.633.500	419.120.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36.771.250	40.939.250	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>4.410.572.900</b>	<b>5.511.834.000</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>432.870.000</b>	<b>432.870.000</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	151.058.450	151.058.450	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	154.053.060	154.053.060	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	127.758.490	127.758.490	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3.191.496.750</b>	<b>3.751.935.500</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	473.930.550	473.930.100	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.388.969.900	1.839.453.900	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.328.596.300	1.438.551.500	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>721.462.270</b>	<b>868.776.320</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	309.232.300	434.884.300	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	236.149.850	236.275.850	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	176.080.120	197.616.170	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>64.743.880</b>	<b>458.252.180</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	34.729.590	428.237.890	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.014.290	30.014.290	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>940.051.090</b>	<b>1.080.598.503</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>435.517.260</b>	<b>576.097.833</b>	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	177.703.300	318.283.873	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	99.458.550	99.458.550	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	22.754.430	22.754.430	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	135.600.980	135.600.980	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>77.509.250</b>	<b>77.509.250</b>	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	77.509.250	77.509.250	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>379.237.730</b>	<b>379.204.570</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	139.160.810	166.152.100	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	146.690.000	139.194.470	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	93.386.920	73.858.000	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>47.786.850</b>	<b>47.786.850</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	47.786.850	47.786.850	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>32.467.765.419</b>	<b>32.256.421.745</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>32.467.765.419</b>	<b>32.256.421.745</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>32.467.765.419</b>	<b>32.256.421.745</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.837.877.919</b>	<b>21.626.534.245</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.984.400</b>	<b>100.984.400</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.329.600	30.329.600	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.430.000	11.430.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.430.000	11.430.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.430.000	11.430.000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.430.000	11.430.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.934.800	24.934.800	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.721.878.769</b>	<b>3.510.535.095</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.337.741.569	3.126.397.895	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	341.670.000	341.670.000	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.329.600	12.329.600	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.817.400	11.817.400	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.320.200	18.320.200	
<b>4.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	8.400.000	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>356.286.000</b>	<b>356.286.000</b>	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.625.000	7.625.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.360.000	30.360.000	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.080.000	12.080.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	306.221.000	306.221.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>901.110.850</b>	<b>901.110.850</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.685.000	10.685.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.328.000	12.328.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.099.500	39.099.500	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.190.200	50.190.200	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	261.900.000	261.900.000	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	133.192.150	133.192.150	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	91.800.000	91.800.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.916.000	301.916.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>368.631.000</b>	<b>368.631.000</b>	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.725.000	195.725.000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.906.000	172.906.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>927.007.250</b>	<b>927.007.250</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.257.750	27.257.750	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.349.500	321.349.500	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	24.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.400.000	554.400.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>598.190.072</b>	<b>598.190.072</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.033.095	130.033.095	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.967.205	218.967.205	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.460.380	46.460.380	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.386.382	182.386.382	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.343.010	20.343.010	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>13.811.327.178</b>	<b>13.811.327.178</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.427.327.178	13.427.327.178	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	384.000.000	384.000.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.044.062.400</b>	<b>1.044.062.400</b>	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	120.000.000	120.000.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	924.062.400	924.062.400	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>10.629.887.500</b>	<b>10.629.887.500</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>2.995.313.000</b>	<b>2.995.313.000</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.000.000	8.000.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.811.313.000	2.811.313.000	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	36.000.000	36.000.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	140.000.000	140.000.000	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>623.538.000</b>	<b>623.538.000</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	28.785.000	28.785.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	28.785.000	28.785.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	202.796.000	202.796.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	202.796.000	202.796.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	160.376.000	160.376.000	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>204.631.500</b>	<b>204.631.500</b>	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	54.000.000	54.000.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	150.631.500	150.631.500	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.004.009.550</b>	<b>2.004.009.550</b>	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.515.105.500	1.515.105.500	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	121.639.550	121.639.550	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.000.000	100.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000	180.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	67.664.500	67.664.500	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	19.600.000	19.600.000	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.664.968.450</b>	<b>1.664.968.450</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	204.867.500	204.867.500	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	34.383.200	34.383.200	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.425.717.750	1.425.717.750	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>3.137.427.000</b>	<b>3.137.427.000</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.127.827.000	3.127.827.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	9.600.000	9.600.000	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>6.325.019.785</b>	<b>6.717.338.069</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH</b>	<b>6.325.019.785</b>	<b>6.717.338.069</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH</b>	<b>6.325.019.785</b>	<b>6.717.338.069</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.186.942.065</b>	<b>5.364.944.869</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.188.400</b>	<b>29.967.250</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.348.600	5.548.600	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.056.400	1.072.850	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.025.200	5.655.200	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.727.200	4.727.200	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.663.000	3.595.400	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.368.000	9.368.000	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.034.514.855</b>	<b>2.956.795.207</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.003.769.105	2.933.032.357	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.442.250	6.057.250	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.712.900	17.705.600	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>164.811.750</b>	<b>97.210.250</b>	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	25.125.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	164.811.750	72.085.250	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>933.927.192</b>	<b>1.084.651.360</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.612.600	32.050.250	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.875.200	12.104.000	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.975.300	49.997.550	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.577.000	31.577.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.540.000	99.540.000	
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	66.368.150	66.368.150	



## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.165.000	24.165.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.402.582	643.673.050	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	117.411.360	125.176.360	
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.246.000</b>	<b>74.140.000</b>	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	27.670.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.246.000	46.470.000	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>544.529.396</b>	<b>622.930.000</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.585.000	8.400.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.724.396	184.230.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.220.000	430.300.000	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>435.724.472</b>	<b>499.250.802</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.412.696	273.071.986	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.567.012	35.450.012	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.008.513	184.282.033	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.736.251	6.446.771	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>576.518.300</b>	<b>750.992.780</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>329.639.700</b>	<b>359.014.180</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	4.800.000	4.800.000	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	136.392.000	199.669.480	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.570.000	14.170.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	26.950.000	22.650.000	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	22.405.400	22.405.400	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	103.429.300	95.319.300	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>157.207.200</b>	<b>154.007.200</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	73.007.200	73.007.200	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	84.200.000	81.000.000	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>89.671.400</b>	<b>237.971.400</b>	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	0	155.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89.671.400	82.971.400	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>561.559.420</b>	<b>601.400.420</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>258.998.570</b>	<b>278.996.070</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.276.400	15.276.400	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.721.570	32.886.570	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	46.038.700	53.494.700	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.076.400	16.076.400	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.219.100	68.109.800	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	81.666.400	93.152.200	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>89.147.900</b>	<b>90.651.400</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.570.500	45.908.500	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.834.500	6.740.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.956.050	33.916.050	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.786.850	4.086.850	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>213.412.950</b>	<b>231.752.950</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.471.200	80.147.200	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.300.000	6.600.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	55.320.000	66.432.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.227.050	29.787.050	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.500.000	3.800.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	30.594.700	44.986.700	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>270.872.574.876</b>	<b>273.395.042.158</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>256.754.316.761</b>	<b>259.161.982.121</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>256.754.316.761</b>	<b>259.161.982.121</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.828.129.142</b>	<b>8.279.615.433</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>84.910.000</b>	<b>84.877.500</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.470.400	6.455.400	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.142.400	9.139.900	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.945.000	4.930.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.030.400	21.030.400	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.875.600	2.875.600	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.250.800	1.250.800	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.195.400	39.195.400	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.285.751.432</b>	<b>5.553.456.923</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.172.206.032	5.413.672.023	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.325.000	128.239.500	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.110.200	5.435.200	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.110.200	6.110.200	
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>23.655.400</b>	<b>27.590.400</b>	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.655.400	27.590.400	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>158.020.000</b>	<b>149.952.000</b>	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.680.000	20.776.000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.250.000	44.250.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82.090.000	84.926.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>596.964.400</b>	<b>1.014.609.400</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.657.700	8.557.700	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.053.500	29.053.500	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.741.000	27.541.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.840.000	133.840.000	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.414.500	23.629.500	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.677.500	89.437.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.580.200	702.550.200	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>177.086.200</b>	<b>824.170.800</b>	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.767.000	324.767.000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.319.200	499.403.800	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>272.575.960</b>	<b>277.346.560</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.107.000	19.212.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.468.960	192.134.560	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000	66.000.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>229.165.750</b>	<b>347.611.850</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.306.750	245.752.850	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.859.000	11.859.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	90.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>248.318.257.069</b>	<b>249.974.996.588</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.257.034.550</b>	<b>1.512.178.700</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.058.200	31.377.700	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	23.058.200	23.045.700	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	20.007.150	19.988.050	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	12.142.000	12.129.500	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	9.446.000	9.446.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	9.342.000	9.342.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	478.348.500	590.413.250	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	448.852.550	419.752.550	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	39.204.700	59.474.550	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	67.994.150	88.279.350	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	124.581.100	144.458.950	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	104.471.100	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>343.945.550</b>	<b>449.236.100</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	62.541.200	82.355.600	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.193.600	45.993.100	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	80.752.600	83.615.900	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	107.768.400	153.044.750	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	61.689.750	84.226.750	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>510.492.150</b>	<b>658.317.400</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	44.892.450	53.654.950	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	29.483.900	32.609.900	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48.740.550	62.235.050	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	109.136.100	121.982.600	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	65.023.550	65.004.200	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.612.300	6.612.300	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	73.499.050	96.105.100	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	36.045.000	84.090.950	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	26.891.400	65.854.500	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70.167.850	70.167.850	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>245.875.489.819</b>	<b>247.023.969.388</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	237.727.914.997	238.104.898.886	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.000.000.000	4.468.800.250	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.147.574.822	4.450.270.252	
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>331.295.000</b>	<b>331.295.000</b>	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	331.295.000	331.295.000	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>607.930.550</b>	<b>907.370.100</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>607.930.550</b>	<b>907.370.100</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	66.801.300	157.294.650	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.303.000	36.862.100	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	35.019.800	40.464.100	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	124.336.300	172.284.250	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	75.791.150	56.758.850	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	112.373.100	174.861.300	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	91.462.850	139.511.750	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.842.900	77.185.400	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	32.000.150	52.147.700	
<b>5.02.5.06.0.00.03.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>14.118.258.115</b>	<b>14.233.060.037</b>	
<b>5.02.5.06.0.00.03.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13.697.991.635</b>	<b>13.807.919.937</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.381.790.556</b>	<b>10.285.080.488</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74.351.400</b>	<b>88.105.400</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.366.400	26.366.400	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	225.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	6.554.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.185.000	54.960.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.515.827.235</b>	<b>6.003.018.425</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.283.241.035	5.772.582.225	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.920.000	216.920.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.016.200	7.116.200	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.650.000	6.400.000	
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12.000.000	
<b>5.02.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>64.222.000</b>	<b>58.492.350</b>	
5.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.600.000	2.600.000	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	3.360.000	990.000	
5.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	8.500.000	8.500.000	
5.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	32.400.000	24.000.000	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.362.000	22.402.350	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>33.804.000</b>	<b>33.679.000</b>	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	17.000.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.679.000	16.679.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>468.666.190</b>	<b>795.276.190</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.236.700	9.236.700	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	129.750.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.061.250	30.061.250	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.400.000	53.400.000	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	69.754.240	69.754.240	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	15.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.214.000	488.074.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.848.562.166</b>	<b>2.864.188.034</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.800.000	16.800.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.628.762.166	2.628.762.034	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	16.646.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.480.000	201.980.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>364.357.565</b>	<b>430.321.089</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.001.800	140.375.500	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.355.765	249.945.589	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.316.201.079</b>	<b>3.522.839.449</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>3.316.201.079</b>	<b>3.522.839.449</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	218.376.700	207.260.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	44.850.000	16.850.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	94.420.900	139.451.100	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	120.000.000	120.000.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.373.353.100	1.543.809.600	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	168.000.000	163.500.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	73.872.650	98.918.470	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	9.750.000	9.750.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	447.781.745	557.601.295	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	765.795.984	665.698.984	
<b>5.02.5.06.0.00.03.5203</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIKIS BADAN WILAYAH I</b>	<b>88.598.080</b>	<b>88.598.080</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>88.598.080</b>	<b>88.598.080</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>88.598.080</b>	<b>88.598.080</b>	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	88.598.080	88.598.080	
<b>5.02.5.06.0.00.03.5204</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIKIS BADAN WILAYAH II</b>	<b>131.878.520</b>	<b>131.878.020</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>131.878.520</b>	<b>131.878.020</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>131.878.520</b>	<b>131.878.020</b>	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	131.878.520	131.878.020	
<b>5.02.5.06.0.00.03.5205</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIKIS BADAN WILAYAH III</b>	<b>88.599.830</b>	<b>105.379.350</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>88.599.830</b>	<b>105.379.350</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>88.599.830</b>	<b>105.379.350</b>	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	88.599.830	105.379.350	
<b>5.02.5.06.0.00.03.5206</b>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN WILAYAH IV</b>	<b>111.190.050</b>	<b>99.284.650</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>111.190.050</b>	<b>99.284.650</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>111.190.050</b>	<b>99.284.650</b>	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	111.190.050	99.284.650	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>19.323.658.581</b>	<b>21.285.418.013</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>19.323.658.581</b>	<b>21.285.418.013</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>19.323.658.581</b>	<b>21.285.418.013</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.429.996.271</b>	<b>19.155.696.563</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>78.277.100</b>	<b>100.336.100</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.742.000	22.398.300	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.005.800	14.005.800	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.291.800	19.293.400	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.424.600	12.424.600	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.558.000	14.153.700	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.254.900	18.060.300	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.125.744.472</b>	<b>17.211.513.164</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.817.439.072	16.893.597.964	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	284.220.000	284.220.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.940.000	16.611.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.145.400	17.084.200	
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	8.400.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>555.626.900</b>	<b>1.124.911.300</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.453.400	7.803.800	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	458.900.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.991.200	16.891.200	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	174.200.000	244.400.000	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.206.300	25.206.300	
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.000.000	22.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.776.000	349.710.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80.008.800</b>	<b>154.237.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.008.800	154.237.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>464.400.000</b>	<b>498.400.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.800.000	100.800.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.600.000	367.600.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.538.999</b>	<b>57.898.999</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.940.000	39.350.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.598.999	18.548.999	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.893.662.310</b>	<b>2.129.721.450</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.058.466.200</b>	<b>583.168.100</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	60.032.600	97.234.700	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	797.651.500	197.919.700	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	48.716.000	66.635.400	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	49.070.300	67.216.500	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	49.038.900	74.172.500	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	53.956.900	79.989.300	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>483.353.560</b>	<b>438.473.400</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	89.013.560	114.823.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	394.340.000	323.650.400	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.185.359.750</b>	<b>982.094.650</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	256.510.600	153.071.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	263.697.150	263.697.150	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	376.037.000	216.261.000	
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	81.071.370	117.519.970	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	133.222.930	133.222.930	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	74.820.700	98.322.600	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>166.482.800</b>	<b>125.985.300</b>	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	102.019.100	42.171.100	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	64.463.700	83.814.200	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>895.478.000</b>	<b>1.316.790.100</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>895.478.000</b>	<b>1.316.790.100</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>895.478.000</b>	<b>1.316.790.100</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>895.478.000</b>	<b>1.316.790.100</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	300.000.000	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>895.478.000</b>	<b>1.016.790.100</b>	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	121.312.100	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	895.478.000	895.478.000	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>727.861.490</b>	<b>719.764.390</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH</b>	<b>727.861.490</b>	<b>719.764.390</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH</b>	<b>727.861.490</b>	<b>719.764.390</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>727.861.490</b>	<b>719.764.390</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>610.906.040</b>	<b>598.479.490</b>	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	300.000.000	252.792.250	
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	150.000.000	150.000.000	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	160.906.040	195.687.240	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>116.955.450</b>	<b>121.284.900</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	116.955.450	121.284.900	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.742.647.929</b>	<b>9.273.277.266</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.742.647.929</b>	<b>9.273.277.266</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.742.647.929</b>	<b>9.273.277.266</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.760.250.239</b>	<b>5.692.868.726</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>87.173.650</b>	<b>104.466.000</b>	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.319.350	55.159.400	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.568.150	9.458.400	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.994.450	8.994.450	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.186.350	7.228.400	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.952.800	7.952.800	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.152.550	15.672.550	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.675.036.811</b>	<b>4.375.646.149</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.473.361.211	4.169.990.549	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.940.000	179.930.000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.817.800	9.817.800	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.917.800	15.907.800	
<b>6.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12.000.000	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>220.740.000</b>	<b>217.055.000</b>	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	220.740.000	217.055.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>300.873.350</b>	<b>406.604.250</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.310.500	9.319.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.216.500	14.216.500	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.421.650	11.421.650	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.933.950	15.947.400	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.510.000	10.510.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.000.000	49.000.000	
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.335.750	38.335.750	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.500.000	14.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.645.000	243.853.950	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>362.580.000</b>	<b>335.100.000</b>	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.180.000	93.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000	242.100.000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101.846.428</b>	<b>241.997.327</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.769.250	82.390.883	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.480.000	11.360.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.597.178	148.246.444	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.354.245.550</b>	<b>3.073.803.400</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.179.245.300</b>	<b>1.553.409.300</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	560.093.700	502.817.900	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	142.400.000	698.539.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	53.400.000	53.400.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	17.800.000	8.070.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	218.038.200	134.938.200	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	71.200.000	32.300.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	116.313.400	123.343.400	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.175.000.250</b>	<b>1.520.394.100</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	365.009.600	310.378.450	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	809.990.650	1.210.015.650	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>628.152.140</b>	<b>506.605.140</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>10.759.250</b>	<b>39.009.250</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.759.250	39.009.250	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>617.392.890</b>	<b>467.595.890</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	74.161.000	53.823.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54.152.290	33.852.290	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	357.358.400	296.799.400	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	131.721.200	83.121.200	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>54.267.246.057</b>	<b>53.337.095.438</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN BAJO</b>	<b>2.606.450.141</b>	<b>2.602.326.221</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN BAJO</b>	<b>2.189.626.451</b>	<b>2.185.502.531</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.176.834.351</b>	<b>2.172.710.431</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.930.000</b>	<b>9.930.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.257.900	5.257.900	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	308.100	308.100	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	258.000	258.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	273.000	273.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	773.000	773.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.060.000	3.060.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.037.127.551</b>	<b>2.013.011.038</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.989.626.751	1.965.510.238	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.040.000	47.040.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	460.800	460.800	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.300.000	6.300.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.151.400</b>	<b>34.144.000</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.500	264.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.492.100	3.492.100	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.609.800	4.609.800	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.840.000	5.840.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.145.000	18.137.600	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.340.000</b>	<b>92.540.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.740.000	12.740.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	15.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.600.000	64.800.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.985.400</b>	<b>16.785.393</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.985.400	14.785.393	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>10.152.100</b>	<b>10.152.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.152.100</b>	<b>10.152.100</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.152.100	4.152.100	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000	6.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.640.000	2.640.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>KELURAHAN BAJO</b>	<b>416.823.690</b>	<b>416.823.690</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>416.823.690</b>	<b>416.823.690</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>266.823.690</b>	<b>266.823.690</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	266.823.690	266.823.690	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN BAJO BARAT</b>	<b>1.271.526.971</b>	<b>1.250.275.859</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN BAJO BARAT</b>	<b>1.271.526.971</b>	<b>1.250.275.859</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.259.001.971</b>	<b>1.195.360.859</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.920.270</b>	<b>3.220.270</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.933.000	2.233.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	193.830	193.830	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	225.600	225.600	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	202.800	202.800	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	273.000	273.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.040	92.040	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.125.587.721</b>	<b>1.034.313.359</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.071.550.221	980.275.859	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.725.500	53.725.500	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	312.000	312.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.352.530</b>	<b>60.676.530</b>	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.844.030	11.314.030	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	6.250.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.808.500	41.912.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.600.000</b>	<b>84.000.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	22.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000	50.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.541.450</b>	<b>13.150.700</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.541.450	13.150.700	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>10.000.000</b>	<b>27.840.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>27.840.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000	5.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	22.840.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>525.000</b>	<b>25.075.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>525.000</b>	<b>25.075.000</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	525.000	25.075.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000	1.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE</b>	<b>2.023.283.332</b>	<b>1.980.026.407</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE</b>	<b>2.023.283.332</b>	<b>1.980.026.407</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.992.516.232</b>	<b>1.949.259.307</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.001.060</b>	<b>8.001.060</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.549.500	3.549.500	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	484.000	484.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	485.560	485.560	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	484.000	484.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	484.000	484.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.514.000	2.514.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.476.411.861</b>	<b>1.383.155.312</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.680.641	1.331.424.092	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000	47.160.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.512.000	1.512.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.059.220	3.059.220	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	6.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>83.171.350</b>	<b>111.786.146</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000	22.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.191.700	2.191.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.594.700	4.602.496	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.894.950	9.011.950	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	10.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.590.000	55.580.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.118.000</b>	<b>18.168.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000	13.050.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.118.000	5.118.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.299.711</b>	<b>70.499.711</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000	8.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.499.711	4.499.711	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000	57.600.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>343.514.250</b>	<b>351.649.078</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.514.250	51.651.900	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	299.997.178	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>18.752.100</b>	<b>18.752.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.752.100</b>	<b>18.752.100</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.152.100	8.152.100	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.600.000	10.600.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>8.590.000</b>	<b>8.590.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>8.590.000</b>	<b>8.590.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.590.000	8.590.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.750.000	2.750.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	675.000	675.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA</b>	<b>1.317.109.001</b>	<b>1.292.585.955</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA</b>	<b>1.317.109.001</b>	<b>1.292.585.955</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.295.749.001</b>	<b>1.271.225.955</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.114.400</b>	<b>5.114.400</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.657.400	2.657.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	273.000	273.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	273.000	273.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	273.000	273.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	273.000	273.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.365.000	1.365.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.168.344.191</b>	<b>1.143.821.145</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.117.862.591	1.093.339.545	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000	47.160.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.512.000	1.512.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.809.600	1.809.600	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41.095.190</b>	<b>41.095.190</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	879.500	879.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.700.110	3.700.110	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.847.100	7.847.100	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.000	500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.848.480	26.848.480	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.420.320</b>	<b>49.420.320</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.420.320	1.420.320	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.974.900</b>	<b>26.974.900</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.974.900	11.974.900	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000	6.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.160.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>11.160.000</b>	<b>11.160.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.400.000	2.400.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.760.000	8.760.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	600.000	600.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.600.000	3.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN BELOPA</b>	<b>5.137.648.756</b>	<b>4.788.037.255</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN BELOPA</b>	<b>3.567.857.015</b>	<b>3.203.484.914</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.567.857.015</b>	<b>3.203.484.914</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.413.186.225</b>	<b>3.049.178.164</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.367.850.225	3.003.478.164	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.556.000	42.725.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.780.000	2.975.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.195.000</b>	<b>6.234.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.195.000	6.234.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>45.432.480</b>	<b>55.874.440</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.200	1.562.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.190.000	3.290.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.487.680	3.185.390	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000	2.880.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.045.600	18.644.850	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.267.000	16.912.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.096.510</b>	<b>70.896.510</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.496.510	14.496.510	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.600.000	50.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.946.800</b>	<b>21.301.800</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.809.400	13.164.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.137.400	8.137.400	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0001</b>	<b>KELURAHAN BALO BALO</b>	<b>390.791.986</b>	<b>405.552.586</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>390.791.986</b>	<b>405.552.586</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>390.791.986</b>	<b>405.552.586</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	241.258.000	256.018.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.533.986	149.533.986	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0002</b>	<b>KELURAHAN SENGGA</b>	<b>393.999.990</b>	<b>393.999.990</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>393.999.990</b>	<b>393.999.990</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>393.999.990</b>	<b>393.999.990</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	243.999.990	243.999.990	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0003</b>	<b>KELURAHAN TAMPUMIA RADDA</b>	<b>421.000.000</b>	<b>421.000.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>421.000.000</b>	<b>421.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>421.000.000</b>	<b>421.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	271.400.000	271.400.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.600.000	149.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0004</b>	<b>KELURAHAN TANAMANAI</b>	<b>363.999.765</b>	<b>363.999.765</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>363.999.765</b>	<b>363.999.765</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>363.999.765</b>	<b>363.999.765</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	214.008.000	214.008.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.991.765	149.991.765	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN BELOPA UTARA</b>	<b>3.545.203.537</b>	<b>3.215.749.557</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN BELOPA UTARA</b>	<b>2.652.203.556</b>	<b>2.322.749.664</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.648.051.456</b>	<b>2.318.597.564</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.092.000</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	523.000	523.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	523.000	523.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	523.000	523.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	523.000	523.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.493.016.559</b>	<b>2.124.540.567</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.452.196.159	2.083.720.167	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.820.400	40.820.400	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.940.400</b>	<b>4.940.400</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.940.400	4.940.400	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.500.000	5.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	14.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>56.871.566</b>	<b>62.919.566</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.880.860	1.880.860	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.800.000	15.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	6.600.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.199.520	11.199.520	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.215.000	7.215.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.176.186	17.224.186	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>28.800.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	28.800.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.258.481</b>	<b>69.658.481</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.258.481	19.258.481	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000	46.800.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.372.450</b>	<b>6.146.550</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.232.450	5.006.550	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.140.000	1.140.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4.152.100</b>	<b>4.152.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.152.100</b>	<b>4.152.100</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.152.100	4.152.100	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0001</b>	<b>KELURAHAN PAMMANU</b>	<b>458.799.988</b>	<b>458.799.900</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>458.799.988</b>	<b>458.799.900</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>458.799.988</b>	<b>458.799.900</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.918.960	149.918.960	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	308.881.028	308.880.940	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0002</b>	<b>KELURAHAN SABE</b>	<b>434.199.993</b>	<b>434.199.993</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>434.199.993</b>	<b>434.199.993</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>434.199.993</b>	<b>434.199.993</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	284.634.366	284.634.366	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.565.627	149.565.627	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN BUPON</b>	<b>2.255.666.236</b>	<b>2.090.786.413</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN BUPON</b>	<b>1.766.866.236</b>	<b>1.601.986.413</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.753.399.236</b>	<b>1.587.919.413</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.122.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	624.000	624.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	312.000	312.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	234.000	234.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	484.000	484.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	468.000	468.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.508.346.297</b>	<b>1.339.069.475</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.467.284.897	1.302.409.075	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.740.400	35.300.400	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	712.000	751.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	609.000	609.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.140.400</b>	<b>6.140.400</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.140.400	6.140.400	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>51.950.530</b>	<b>140.122.738</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.546.500	6.954.750	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.554.030	2.508.060	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000	2.880.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.956.550	44.668.290	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.013.450	83.111.638	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.767.000</b>	<b>67.171.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.142.000	19.171.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.825.000	43.200.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>29.073.009</b>	<b>33.293.800</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.723.009	31.943.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.350.000	1.350.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.117.000</b>	<b>6.117.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.117.000</b>	<b>6.117.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.117.000	6.117.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.400.000</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>3.400.000</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.400.000	4.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.550.000	1.550.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.400.000	2.400.000	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0001</b>	<b>KELURAHAN NOLING</b>	<b>488.800.000</b>	<b>488.800.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>488.800.000</b>	<b>488.800.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>488.800.000</b>	<b>488.800.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	100.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238.800.000	238.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMANRE</b>	<b>1.964.993.697</b>	<b>2.072.727.713</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMANRE</b>	<b>1.529.745.111</b>	<b>1.646.771.127</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.524.805.111</b>	<b>1.641.831.127</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.855.000</b>	<b>2.235.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.855.000	2.235.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.367.591.711</b>	<b>1.309.330.647</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.329.745.211	1.267.133.147	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.240.000	40.680.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.606.500	1.517.500	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	6.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.241.000</b>	<b>52.615.000</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.771.900	4.771.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000	2.820.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.419.100	10.253.100	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	7.650.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.230.000	27.120.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.301.400</b>	<b>78.101.400</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000	4.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	17.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.701.400	4.701.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.600.000	51.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.816.000</b>	<b>193.549.080</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.816.000	14.612.550	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	178.936.530	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.940.000	4.940.000	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0001</b>	<b>KELURAHAN CILALLANG</b>	<b>435.248.586</b>	<b>425.956.586</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>435.248.586</b>	<b>425.956.586</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>86.560.700</b>	<b>77.268.700</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	86.560.700	77.268.700	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>348.687.886</b>	<b>348.687.886</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.487.886	149.487.886	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.200.000	199.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN LAMASI</b>	<b>2.624.990.728</b>	<b>2.570.758.202</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN LAMASI</b>	<b>2.119.990.728</b>	<b>2.065.758.202</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.102.590.728</b>	<b>2.043.558.202</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000	250.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	250.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	250.000	250.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000	250.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.977.643.928</b>	<b>1.897.100.502</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.335.728	1.835.103.202	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.308.200	61.997.300	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.502.200</b>	<b>12.448.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.502.200	12.448.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>28.561.100</b>	<b>43.526.200</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.268.000	2.268.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.306.750	4.897.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.006.350	13.430.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.380.000	19.330.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.700.000</b>	<b>83.300.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	18.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.300.000	35.300.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.200.000	30.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.183.500</b>	<b>6.183.500</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.433.500	4.433.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.750.000	1.750.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>10.800.000</b>	<b>7.200.000</b>	
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>10.800.000</b>	<b>7.200.000</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.800.000	7.200.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>6.600.000</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>6.600.000</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.600.000	15.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0001</b>	<b>KELURAHAN LAMASI</b>	<b>505.000.000</b>	<b>505.000.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>505.000.000</b>	<b>505.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>505.000.000</b>	<b>505.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	100.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	255.000.000	255.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN LAMASI TIMUR</b>	<b>1.355.850.235</b>	<b>1.233.494.209</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN LAMASI TIMUR</b>	<b>1.355.850.235</b>	<b>1.233.494.209</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.339.050.235</b>	<b>1.215.294.209</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000	1.200.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.155.850.235</b>	<b>1.033.576.859</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.155.850.235	1.033.576.859	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>61.823.200</b>	<b>69.760.550</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.070.000	7.070.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.379.200	16.054.550	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.574.000	44.836.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.856.800</b>	<b>85.856.800</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.696.800	5.696.800	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.360.000	75.360.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.120.000</b>	<b>23.700.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.620.000	1.200.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000	22.500.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.400.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.400.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	13.400.000	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN LAROMPONG</b>	<b>2.562.703.424</b>	<b>2.506.843.208</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN LAROMPONG</b>	<b>2.087.903.424</b>	<b>2.032.043.208</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.087.903.424</b>	<b>2.032.043.208</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.450.000</b>	<b>850.000</b>	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.450.000	850.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.888.171.999</b>	<b>1.832.311.783</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.888.171.999	1.832.311.783	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>44.524.075</b>	<b>58.724.075</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.710.200	2.710.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.473.875	26.273.875	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	150.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.790.000	27.790.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>143.719.200</b>	<b>130.119.200</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.291.900	43.291.900	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.700.000	18.100.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.727.300	68.727.300	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.038.150</b>	<b>10.038.150</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.038.150	10.038.150	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0001</b>	<b>KELURAHAN LAROMPONG</b>	<b>474.800.000</b>	<b>474.800.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>474.800.000</b>	<b>474.800.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>474.800.000</b>	<b>474.800.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	324.800.000	324.800.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN LAROMPONG SELATAN</b>	<b>2.316.591.946</b>	<b>1.998.708.059</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN LAROMPONG SELATAN</b>	<b>1.900.644.803</b>	<b>1.582.760.916</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.900.644.803</b>	<b>1.582.760.916</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.130.700</b>	<b>13.230.700</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	5.100.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.050.500	5.050.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.050.000	2.050.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.030.200	1.030.200	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.703.617.673</b>	<b>1.385.734.374</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.700.651.633	1.382.768.334	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.171.040	1.171.040	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	690.000	690.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.105.000	1.105.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>57.157.310</b>	<b>89.831.250</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	485.000	1.886.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.030.800	7.030.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	1.560.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.549.660	40.408.400	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	18.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.531.850	20.945.850	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.539.120</b>	<b>82.308.532</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.230.000	10.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.869.120	2.868.532	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.440.000	68.940.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.200.000</b>	<b>11.656.060</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.200.000	11.656.060	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0001</b>	<b>KELURAHAN BONEPUTE</b>	<b>415.947.143</b>	<b>415.947.143</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>415.947.143</b>	<b>415.947.143</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>415.947.143</b>	<b>415.947.143</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	96.849.200	96.849.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.297.943	149.297.943	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.800.000	169.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN LATIMOJONG</b>	<b>1.431.926.111</b>	<b>1.426.889.301</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN LATIMOJONG</b>	<b>1.431.926.111</b>	<b>1.426.889.301</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.408.974.011</b>	<b>1.413.537.201</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.175.200</b>	<b>9.175.200</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.083.200	7.083.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	523.000	523.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	523.000	523.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	523.000	523.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	523.000	523.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.083.171.802</b>	<b>1.078.334.992</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.031.908.202	1.027.071.392	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000	47.160.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.512.000	1.512.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.591.600	2.591.600	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>62.625.323</b>	<b>72.025.323</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.184.750	3.184.750	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.640.000	7.640.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.450.350	10.450.350	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.120.000	21.520.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.030.223	28.030.223	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	39.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>210.201.686</b>	<b>210.201.686</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.701.700	9.701.700	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000	500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.999.986	199.999.986	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>22.952.100</b>	<b>13.352.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.752.100</b>	<b>8.152.100</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.152.100	8.152.100	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.200.000	5.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN PONRANG</b>	<b>4.200.666.033</b>	<b>4.149.191.631</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN PONRANG</b>	<b>3.239.566.561</b>	<b>3.188.092.159</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.237.566.561</b>	<b>3.186.092.159</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.079.800</b>	<b>3.569.800</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.523.000	673.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	639.200	109.200	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	639.200	1.339.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	639.200	109.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	639.200	1.339.200	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.112.051.765</b>	<b>3.028.101.963</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.039.999.565	2.964.027.163	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.454.000	62.571.600	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.061.000	966.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	537.200	537.200	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.070.800</b>	<b>6.070.800</b>	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	650.300	650.300	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.420.500	5.420.500	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.942.150</b>	<b>64.120.850</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	16.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.140.500	1.191.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.911.650	3.911.650	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.490.000	40.118.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.189.546</b>	<b>77.996.246</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.087.850	13.087.850	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.901.696	8.208.396	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.200.000	56.700.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.232.500</b>	<b>6.232.500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.232.500	6.232.500	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	2.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.0.00.0.00.14.0001</b>	<b>KELURAHAN PADANG SUBUR</b>	<b>510.100.000</b>	<b>510.100.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>510.100.000</b>	<b>510.100.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>510.100.000</b>	<b>510.100.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	100.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260.100.000	260.100.000	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0002</b>	<b>KELURAHAN PADANG SAPP</b>	<b>450.999.472</b>	<b>450.999.472</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>450.999.472</b>	<b>450.999.472</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>450.999.472</b>	<b>450.999.472</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	301.000.000	301.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.999.472	149.999.472	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN PONRANG SELATAN</b>	<b>2.671.582.146</b>	<b>2.597.567.862</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN PONRANG SELATAN</b>	<b>2.285.982.146</b>	<b>2.171.997.862</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.266.751.146</b>	<b>2.152.766.862</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.859.400</b>	<b>12.859.400</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.665.800	2.665.800	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.670.800	1.670.800	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.670.800	1.670.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.250.000	2.250.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.750.000	1.750.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.051.000	2.051.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	801.000	801.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.088.933.620</b>	<b>1.974.949.336</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.965.020	1.971.980.736	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.968.600	2.968.600	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>28.350.526</b>	<b>28.350.526</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.041.300	1.041.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.495.126	1.495.126	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.006.600	1.006.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.407.500	18.407.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124.927.000</b>	<b>124.927.000</b>	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.648.600	6.648.600	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.278.400	106.278.400	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.680.600</b>	<b>11.680.600</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.680.600	11.680.600	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.031.000</b>	<b>6.031.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.031.000</b>	<b>6.031.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.700.000	1.700.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.331.000	4.331.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.600.000	3.600.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.600.000	9.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0001</b>	<b>KELURAHAN PATTEDONG</b>	<b>385.600.000</b>	<b>425.570.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>385.600.000</b>	<b>425.570.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>385.600.000</b>	<b>425.570.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	235.909.952	275.879.952	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.690.048	149.690.048	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN SULI</b>	<b>2.121.124.128</b>	<b>1.949.932.579</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN SULI</b>	<b>1.586.724.818</b>	<b>1.415.533.269</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.580.649.818</b>	<b>1.409.458.269</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.422.964.818</b>	<b>1.251.773.269</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.386.724.818	1.215.533.269	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.240.000	36.240.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.140.400</b>	<b>6.140.400</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.140.400	6.140.400	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>37.354.200</b>	<b>50.111.600</b>	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.549.200	17.661.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	6.025.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.425.000	26.425.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	6.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.140.400</b>	<b>92.353.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.140.400	12.140.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	17.812.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	62.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.050.000</b>	<b>3.080.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.400.000	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	1.080.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.075.000</b>	<b>6.075.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.075.000</b>	<b>6.075.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.075.000	6.075.000	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0001</b>	<b>KELURAHAN SULI</b>	<b>534.399.310</b>	<b>534.399.310</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>534.399.310</b>	<b>534.399.310</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>534.399.310</b>	<b>534.399.310</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	385.796.750	385.796.750	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	148.602.560	148.602.560	
<b>7.01.0.00.0.00.17.0000</b>	<b>KECAMATAN SULI BARAT</b>	<b>1.850.880.830</b>	<b>1.887.871.812</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.17.0000</b>	<b>KECAMATAN SULI BARAT</b>	<b>1.489.880.830</b>	<b>1.526.871.812</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.479.580.830</b>	<b>1.512.471.812</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.721.200</b>	<b>3.367.200</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.115.600	811.600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000	350.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	805.600	805.600	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.085.953.217</b>	<b>922.944.199</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.044.743.017	881.733.999	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.210.200	41.210.200	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.970.200</b>	<b>4.970.200</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.970.200	4.970.200	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>46.680.100</b>	<b>104.308.650</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	4.572.500	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	20.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	1.521.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.217.000	4.997.750	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.301.600	4.812.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.673.500	18.000.900	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.488.000	38.404.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>68.701.390</b>	<b>69.310.397</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.301.390	10.510.397	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	53.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>268.554.723</b>	<b>407.571.166</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.078.000	33.977.282	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253.476.723	373.593.884	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000	6.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4.300.000</b>	<b>8.400.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>4.300.000</b>	<b>8.400.000</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.300.000	8.400.000	
<b>7.01.0.00.0.00.17.0001</b>	<b>KELURAHAN LINDAJANG</b>	<b>361.000.000</b>	<b>361.000.000</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>361.000.000</b>	<b>361.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>361.000.000</b>	<b>361.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	104.200.000	104.200.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106.800.000	106.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.18.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG</b>	<b>3.151.472.870</b>	<b>3.285.319.360</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.18.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG</b>	<b>2.751.472.870</b>	<b>2.885.319.369</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.737.152.870</b>	<b>2.870.999.369</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	800.000	800.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400.000	400.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	400.000	400.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	400.000	400.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	400.000	400.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	750.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.602.104.898</b>	<b>2.735.951.697</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.944.898	2.684.791.697	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.160.000	50.160.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	500.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>49.375.000</b>	<b>49.374.700</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.865.000	4.864.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.516.000	12.516.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.394.000	28.394.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.764.000</b>	<b>57.764.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.400.000	18.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.964.000	10.964.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.400.000	28.800.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.958.972</b>	<b>19.958.972</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.958.972	19.958.972	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.520.000</b>	<b>9.520.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.520.000</b>	<b>9.520.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.520.000	9.520.000	
<b>7.01.0.00.0.00.18.0001</b>	<b>KELURAHAN BULO</b>	<b>400.000.000</b>	<b>399.999.991</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>400.000.000</b>	<b>399.999.991</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>400.000.000</b>	<b>399.999.991</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	250.016.014	250.000.000	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.983.986	149.999.991	
<b>7.01.0.00.0.00.19.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG BARAT</b>	<b>1.479.927.662</b>	<b>1.648.406.984</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.19.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG BARAT</b>	<b>1.479.927.662</b>	<b>1.648.406.984</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.466.907.662</b>	<b>1.633.046.984</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.692.000</b>	<b>3.672.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.871.000	851.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	434.000	434.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	434.000	434.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	434.000	434.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	434.000	434.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.085.000	1.085.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.321.735.662</b>	<b>1.236.135.213</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.279.927.662	1.198.407.213	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.720.000	35.640.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.062.000	1.062.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.026.000	1.026.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>53.459.200</b>	<b>59.616.970</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.820.200	1.820.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.925.000	2.930.070	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.530.000	13.792.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.384.000	39.274.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.000.000	12.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.420.000</b>	<b>42.030.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.400.000	14.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.020.000	1.230.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	26.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.800.800</b>	<b>274.792.801</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.800.800	24.800.800	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	249.992.001	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000	4.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.360.000</b>	<b>11.360.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>3.360.000</b>	<b>11.360.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.680.000	9.680.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.680.000	1.680.000	
<b>7.01.0.00.0.00.20.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG TIMUR</b>	<b>1.642.827.390</b>	<b>1.712.085.306</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.20.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG TIMUR</b>	<b>1.642.827.390</b>	<b>1.712.085.306</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.631.627.390</b>	<b>1.697.685.306</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.300.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	800.000	800.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	375.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000	375.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	750.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.488.347.421</b>	<b>1.376.605.485</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.827.421	1.332.085.485	

## Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.520.000	44.520.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70.251.570</b>	<b>71.351.660</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.010.800	1.742.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.633.400	3.377.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.216.420	4.121.060	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.655.500	20.978.200	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.935.450	39.332.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.239.699</b>	<b>30.750.091</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.039.699	1.950.091	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.400.000	24.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.438.700</b>	<b>211.878.070</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.043.700	30.455.700	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.395.000	1.395.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	180.027.370	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.800.000	4.800.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.400.000</b>	<b>9.600.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>6.400.000</b>	<b>9.600.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.200.000	4.800.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.200.000	4.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.21.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG UTARA</b>	<b>2.743.401.190</b>	<b>2.979.626.126</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.21.0000</b>	<b>KECAMATAN WALENRANG UTARA</b>	<b>2.359.587.814</b>	<b>2.373.812.863</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.346.167.814</b>	<b>2.345.187.863</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.910.350</b>	<b>12.936.870</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.108.800	4.108.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.141.000	1.141.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.141.000	1.141.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.141.000	1.141.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.141.000	1.141.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.237.550	4.264.070	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.211.059.829</b>	<b>2.198.740.958</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.159.887.829	2.144.018.958	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.520.000	47.520.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.051.000	4.351.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.601.000	2.851.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>43.698.630</b>	<b>49.911.030</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.037.800	3.037.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.997.400	5.129.550	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.860.000	5.860.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.253.430	12.933.680	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.750.000	21.150.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.459.505</b>	<b>64.059.505</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.059.505	10.059.505	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	54.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.039.500</b>	<b>14.539.500</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.039.500	14.539.500	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.400.000</b>	<b>8.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2.400.000</b>	<b>8.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.400.000	8.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4.400.000</b>	<b>8.625.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>4.400.000</b>	<b>8.625.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.400.000	8.625.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.500.000	6.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.120.000</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.120.000</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.120.000	6.000.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>7.01.0.00.0.00.21.0001</b>	<b>KELURAHAN BOSSO</b>	<b>383.813.376</b>	<b>605.813.263</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>383.813.376</b>	<b>605.813.263</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>383.813.376</b>	<b>605.813.263</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	233.829.595	456.168.615	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.983.781	149.644.648	
<b>7.01.0.00.0.00.22.0000</b>	<b>KECAMATAN BUA</b>	<b>3.991.419.693</b>	<b>4.097.885.419</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.22.0000</b>	<b>KECAMATAN BUA</b>	<b>3.569.609.559</b>	<b>3.676.075.285</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.561.609.559</b>	<b>3.668.075.285</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.431.871.883</b>	<b>3.488.638.277</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.369.609.883	3.426.376.277	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.262.000	62.262.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.151.000</b>	<b>5.151.000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.151.000	5.151.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>37.770.860</b>	<b>85.450.560</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.113.060	3.113.060	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000	3.300.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.164.550	10.168.250	



**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000	16.700.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.673.250	52.169.250	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.655.116</b>	<b>84.674.748</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000	4.900.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.755.116	28.774.748	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000	51.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.160.700</b>	<b>4.160.700</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.160.700	4.160.700	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000	4.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	4.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.22.0001</b>	<b>KELURAHAN SAKTI</b>	<b>421.810.134</b>	<b>421.810.134</b>	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>421.810.134</b>	<b>421.810.134</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>421.810.134</b>	<b>421.810.134</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	271.865.219	271.865.219	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.944.915	149.944.915	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4.146.901.287</b>	<b>4.279.066.672</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4.146.901.287</b>	<b>4.279.066.672</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4.146.901.287</b>	<b>4.279.066.672</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.791.965.660</b>	<b>2.938.131.045</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.865.090</b>	<b>7.865.090</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.553.590	3.553.590	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.580.000	1.580.000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.731.500	2.731.500	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.223.466.340</b>	<b>2.131.175.175</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.064.128.840	1.974.297.675	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.580.000	142.580.000	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.287.500	8.862.500	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.470.000	5.435.000	
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.309.700</b>	<b>1.309.700</b>	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.309.700	1.309.700	
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>25.380.000</b>	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	25.380.000	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>270.275.330</b>	<b>431.267.630</b>	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.380.000	69.380.000	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.253.500	1.253.500	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.330.690	11.340.690	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	3.600.000	
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.081.340	45.082.440	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.545.150	4.188.100	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.484.650	296.422.900	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	15.000.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	20.000.000	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.531.200</b>	<b>238.531.200</b>	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.131.200	8.131.200	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.400.000	230.400.000	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.518.000</b>	<b>67.602.250</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.488.000	65.572.250	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>22.814.450</b>	<b>22.814.450</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>22.814.450</b>	<b>22.814.450</b>	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.844.250	15.844.250	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.970.200	6.970.200	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1.199.962.727</b>	<b>1.199.962.727</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1.199.962.727</b>	<b>1.199.962.727</b>	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.177.519.904	1.177.519.904	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12.345.600	12.345.600	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.097.223	10.097.223	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>17.474.700</b>	<b>17.474.700</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>17.474.700</b>	<b>17.474.700</b>	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.145.600	15.145.600	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.329.100	2.329.100	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>24.246.250</b>	<b>24.246.250</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>24.246.250</b>	<b>24.246.250</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21.944.250	21.944.250	

**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.302.000	2.302.000	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>90.437.500</b>	<b>76.437.500</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>90.437.500</b>	<b>76.437.500</b>	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17.600.000	30.800.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.302.000	2.302.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.735.500	3.735.500	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	66.800.000	39.600.000	

#### **4.2. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN TIDAK TERDUGA**

Pemerintah Kabupaten Luwu pada Anggaran perubahan tahun 2023 merencanakan pengalokasian belanja pegawai belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang ditetapkan sesuai peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN, yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. adapun rencana alokasi belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Luwu pada perubahan anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 569.369.332.611,- berkurang 1,09% atau sebesar Rp. 6.275.017505,- dibandingkan anggaran pokok tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga yang pada dasarnya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Pada perubahan anggaran tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu merencanakan pengalokasian belanja barang dan jasa sebesar Rp. 400.206.149.482,- cenderung meningkat 47,56% atau sebesar Rp. 128.997.842.346,- dibandingkan anggaran pokok tahun 2022.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu belanja hibah juga dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun rencana alokasi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk belanja hibah sebesar Rp. 18.170.147.834,- cenderung mengalami penurunan 77,72% dibandingkan anggaran pokok tahun 2022 sebelumnya.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dimana pada perubahan anggaran tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 394.500.000,- cenderung tetap dibandingkan anggaran pokok tahun 2022.

e. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pemerintah Kabupaten Luwu pada perubahan anggaran tahun 2022 merencanakan belanja modal sebesar Rp. 313.036.955.798,- mengalami peningkatan 52,14% dibandingkan anggaran pokok tahun 2022.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan belanja yang dianggarkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana belanja tersebut terdiri dari belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota



dan Desa, dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Pada anggaran perubahan tahun 2022 untuk jenis belanja ini dianggarkan sebesar Rp. 4.450.270.252,- mengalami peningkatan 7,30%.

g. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Selain itu belanja bantuan keuangan juga dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun rencana belanja bantuan keuangan pada perubahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 238.104.898.886,- cenderung mengalami peningkatan 0,16%.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dimana pada perubahan anggaran tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu merencanakan anggaran untuk belanja ini sebesar Rp.4.468.800.250,- mengalami peningkatan dibandingkan anggaran pokok sebesar 11,72%.

Secara lebih rinci untuk melihat plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan bantuan tidak terduga dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2  
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,  
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,  
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	575.644.350.116	569.369.332.611
2	Belanja Barang dan Jasa	271.208.307.136	400.206.149.482
3	Belanja Hibah	81.535.371.773	18.170.147.834
4	Belanja Bantuan Sosial	394.500.000	394.500.000
5	BELANJA MODAL	205.754.548.632	313.036.955.798
	Belanja Modal Tanah	0	316.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.043.842.625	37.436.770.332
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.097.874.606	50.629.655.510
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.859.381.401	214.414.555.049
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.753.450.000	10.239.974.907
6	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.468.800.250
7	Belanja Bagi Hasil	4.147.574.822	4.450.270.252
8	Belanja Bantuan Keuangan	237.727.914.997	238.104.898.886
	<b>TOTAL</b>	<b>1.418.789.508.460</b>	<b>1.548.201.055.113</b>

## **BAB V**

### **RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah salah satu cara menutup defisit untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar dalam APBD, dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022 pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **5.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan pada hakikatnya digunakan untuk menutup defisit yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah telah menyediakan beberapa alternative pembiayaan yang dapat dimanfaatkan seperti Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLpa), Dana Cadangan, Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, serta pembiayaan lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada perubahan Anggaran tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 61.026.240.136,- meningkat sebesar Rp. 48.026.240.136 ,- dibandingkan anggaran APBD pokok tahun 2022. Peningkatan penerimaan pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### **5.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pemerintah Kabupaten Luwu untuk APBD perubahan Anggaran tahun 2022 menetapkan kebijakan untuk pengeluaran pembiayaan dengan memfokuskan pada Badan Usaha Milik Daerah hal tersebut didasarkan karena pemerintah berkeinginan memperkuat struktur permodalan BUMD agar dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan lebih berkembang dibandingkan yang sebelumnya sehingga tentunya dapat meningkatkan profit serta sekaligus merupakan bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam perekonomian untuk mengendalikan pasar dan mencegah terjadinya *market failure*. Pemerintah Kabupaten Luwu merencanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada perubahan

anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.181.000.000,-. Pengeluaran pembiayaan tersebut diperuntukkan kepada penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1  
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>61.026.240.136</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.000.000.000	61.026.240.136	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>61.026.240.136</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>61.026.240.136</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	2.181.000.000	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.181.000.000</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>58.845.240.136</b>	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disepakati dengan sebuah Nota Kesepakatan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif yang ditanda tangani secara bersama-sama.